SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas tersusunnya Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2023. Penyusunan Laporan Kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah dalam mencapai tujuan/sasaran strategis Instansi Pemerintah yang disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung ini berisikan informasi mengenai penetapan kinerja dan capaian tujuan/sasaran kinerja atas semua program dan kegiatan yang dilakukan guna mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian indikator sasaran dikaitkan dengan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, Laporan Kinerja ini merupakan analisis realisasi kinerja capaian sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Semoga Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan umpan balik terhadap perbaikan dan peningkatan kinerja bagi pembangunan Kabupaten Belitung di masa yang akan datang.

Tanjungpandan, Februari 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG

PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG SEKRETARIAT DAERAH

H. MZ. HENDRA CAYA, S.E., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196509041990031004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Daftar Tabel iii

Daftar Gambar vi

Ringkasan Eksekutif vii

Bab 1 Pendahuluan 1-1
- A. Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung 1-2
- B. Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung 1-4
- C. Aspek Strategis Organisasi 1-6
- D. Sistematika Laporan 1-11

Bab 2 Perencanaan Kinerja 2-1
- A. Target Kinerja tahun 2018-2023 2-1
- B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 2-3

Bab 3 Akuntabilitas Kinerja 3-1
- A. Capaian Kinerja Tahun 2023 3-1
- B. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah 3-48
- C. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja 3-49
- D. Kinerja Lainnya 3-51
- E. Akuntabilitas Keuangan 3-55

Bab 4 Penutup 4-1
- A. Kesimpulan Kinerja Tahun 2023 4-1
- B. Rencana Tindak Lanjut Tahun 2024 4-2

Lampiran

a. Target, Realisasi dan Capaian sasaran Program/Kegiatan
b. Perbandingan Realisasi Sasaran Program/Sasaran Kegiatan
c. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Output Kegiatan (IOK)
d. Perbandingan Realisasi Indikator Ouput Kegiatan (IOK)
e. Jumlah Program Prioritas Yang Tercapai Sesuai Target
f. Jumlah Kegiatan Prioritas Yang Tercapai Sesuai Target
g. Jumlah Proyek Prioritas Strategis Yang Tercapai Sesuai Target
h. Jumlah Proyek Strategis Nasional Yang Tercapai Sesuai Target
i. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
j. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2023

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pegawai Sekretariat Daerah Berdasarkan Pangkat/Golongan 1-2

Tabel 1.2 Pegawai Sekretariat Daerah Berdasarkan Pendidikan 1-2

Tabel 1.3 Pemetaan Permasalahan Prioritas dan Sasaran Sekretariat Daerah 1-18

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023 2-1

Tabel 2.2 Komponen Penilaian Reformasi Birokrasi 2-3

Tabel 2.3 Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2-3

Tabel 2.4 Sasaran dan Indikator sasaran misi ke-1 RPJMD 2-4

Tabel 2.5 Sasaran dan Indikator sasaran misi ke-3 RPJMD 2-4

Tabel 2.6 Sasaran dan Indikator sasaran misi ke-2 RPJMD 2-5

Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 2-6

Tabel 3.1 Skala Nilai Kinerja 3-1

Tabel 3.2 Sasaran Strategis, Indikator, Target dan Realisasi Capaian Tahun 2023 3-2

Tabel 3.3 Target dan Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2019-2023 3-3

Tabel 3.4 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel 3-4

Tabel 3.5 Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023 3-5

Tabel 3.6 Nilai Angka dan Persepsi Indeks Reformasi Birokrasi 3-8

Tabel 3.7 Target dan Realisasi Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2019-2023 3-8

Tabel 3.8 Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023 3-10

Tabel 3.9 Nilai Angka dan Persepsi Indeks AKIP 3-10

Tabel 3.10 Target dan Capaian Nilai SAKIP Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023 3-11

Tabel 3.11 Nilai Komponen Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja Kabupaten Belitung Tahun 2021-2023 3-13

Tabel 3.12 Target dan Capaian Nilai Komponen Pengukuran dan Pelaporan Kinerja pada Evaluasi SAKIP Kabupaten Belitung Tahun 2021-2023 3-14

Tabel 3.13 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Pencapaian Sasaran Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesra Tahun 2023 3-15

Tabel 3.14 Realisasi Capaian Indikator Persentase Ketercapaian Sasaran Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesra Tahun 2023 3-16

Tabel 3.15 Target dan Realisasi Indikator Sasaran Misi ke-1 RPJMD 3-16

Tabel 3.16 Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Pogram Bidang Pemerintahan dan Kesra Tahun 2023 3-21

Tabel 3.17 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Pencapaian Sasaran Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan 3-24

Tabel 3.18 Realisasi Capaian Indikator Persentase Ketercapaian Sasaran Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Tahun 2023 3-25

Tabel 3.19 Target dan Realisasi Indikator Sasaran Misi ke-3 RPJMD 3-25

Tabel 3.20 Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Pogram Bidang Perekonomian dan Pembangunan Tahun 2023 3-30

Tabel 3.21 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Pencapaian Sasaran Pembangunan Daerah Bidang Administrasi Umum 3-33

Tabel 3.22 Realisasi Capaian Indikator Persentase Ketercapaian Sasaran Pembangunan Daerah Bidang Administrasi Umum Tahun 2023 3-34

Tabel 3.23 Target dan Realisasi Indikator Sasaran Misi ke-2 RPJMD 3-34

Tabel 3.24 Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan Dan Kinerja Unit Organisasi 3-37

Tabel 3.25 Realisasi Capaian Indikator Persentase Ketercapaian Sasaran Pembangunan Daerah Bidang Administrasi Umum Tahun 2023 3-37

Tabel 3.26 Perbandingan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah Tahun 2021-2023 3-38

Tabel 3.27 Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Pogram Bidang Administrasi Umum Tahun 2023..... 3-41

Tabel 3.28 Realisasi Kinerja dan Target Jangka Menengah Rencana Strategis Sekretariat Daerah 3-48

Tabel 3.29 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Anggaran 3-50

Tabel 3.30 Anggaran dan Realisasi Keuangan Tahun 2023 Menurut Jenis Belanja 3-56

Tabel 3.31 Anggaran dan Realisasi Keuangan Tahun 2023 Menurut Program/Kegiatan 3-57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung 1-4

Gambar 3.1 Target dan Realisasi Persentase Ketercapaian Sasaran Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesra 3-17

Gambar 3.2 Target dan Realisasi Persentase Ketercapaian Sasaran Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan..... 3-26

Gambar 3.3 Target dan Realisasi Persentase Ketercapaian Sasaran Pembangunan Daerah Bidang Administrasi Umum..... 3-35

Gambar 3.4 Target dan Capaian Indikator Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung..... 3-39

Gambar 3.5 Pagu dan Anggaran Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2023..... 3-57

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Kabupaten Belitung tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung atas target kinerja yang telah ditetapkan. Laporan ini disusun dengan berpedoman Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sehingga dengan tersusunnya laporan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung tahun 2023 dapat memberikan informasi capaian kinerja atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai.

Pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung tahun 2023 mengacu pada sasaran strategis yang ditetapkan dalam rencana strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung yang terdiri dari empat sasaran strategis dengan tujuh indikator kinerja. Secara umum capaian indikator kinerja menunjukkan kinerja yang baik, dengan capaian indikator Indeks Reformasi Birokrasi tercapai kategori "BB" sesuai dengan target yang ditetapkan "BB", Nilai SAKIP Kabupaten Belitung dengan target kategori "BB" tercapai "B". Meskipun secara kategori/predikat belum mencapai target, namun secara kuantitas menunjukkan peningkatan capaian dengan nilai sebesar 63,52 meningkat 2,54 poin dibandingkan dengan tahun 2022, Nilai Komponen Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja Pada Evaluasi SAKIP Kabupaten Belitung dengan target 31 terealisasi sebesar 26,41 dengan capaian pengukuran kinerja sebesar 16,16 dan pelaporan sebesar 10,25. Capaian ini meningkat sebesar 1,31 poin dibandingkan dengan capaian tahun 2021 dengan realisasi sebesar 25,1.
Pada capaian indikator kinerja Persentase Ketercapaian Sasaran Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesra terealisasi sebesar 83,33% dari target kinerja 100%. Capaian kinerja ini meningkat 16,66% dibandingkan capaian tahun 2022 dengan realisasi 66,67%. Capaian indikator kinerja Persentase Ketercapaian Sasaran Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan tahun 2023 tercapai 66,67%.Capaian dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Dibandingkan capaian tahun menurun 22,22% dengan capaian sebesar 77,78%. Sedangkan capaian indikator kinerja Persentase Ketercapaian Sasaran Pembangunan Daerah Bidang Administrasi Umum, capaiannya belum tersedia dikarenakan masih menunggu rilis dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Kepegawaian Negara terkait capaian kinerja Opini BPK dan Indeks Profesionalitas ASN dan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dengan target 3,61 tercapai 3,73 dan meningkat 0,01 poin dibandingkan capaian tahun 2022 sebesar 3,72 dengan kategori "SANGAT BAIK".
Pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung pada tahun 2023 didukung adanya kebijakan pemerintah daerah yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan, komitmen pimpinan dalam mencapai kinerja yang telah ditetapkan, adanya kerjasama dan koordiansi yang baik dengan semua elemen penyelenggara pemerintahan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan menetapkan standar pelayanan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat Daerah dalam melaksankan tugas dan fungsinya. Walaupun dari pencapaian kinerja dan anggaran termasuk dalam kategori tinggi, akan tetapi masih ditemui kendala seperti kompetensi aparatur yang masih kurang karena belum optimalnya pengelolaan manajemen aparatur, monitoring dan evaluasi yang

dilaksanakan belum optimal sehingga berdampak pada belum maksimalnya capaian kinerja. Kendala yang dihadapi menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan dan pencapain kinerja di masa mendatang

Dalam melaksanakan program-program dalam mendukung tercapainya kinerja sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung didukung oleh anggaran dengan pagu sebesar Rp. 67.618.973.250,-terealisasi Rp.59.242.187.711,- atau 87,61%, meliputi Belanja Operasi dengan pagu sebesar Rp. 60.012.694.450,- terealisasi Rp. 52.366.890.811,- atau 87,26% dan Belanja Modal dengan pagu sebesar Rp. 7.606.278.800,- terealisasi Rp. 6.875.296.900,- atau 90,39%.

Selain itu, capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung dapat dilihat melalui penghargaan yang diterima yaitu penghargaan Nominasi TPID Kabupaten/Kota Berkinerja Terbaik Kawasan Sumatera, Predikat Kategori Eka Acalapati dalam Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Predikat Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia, Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggraan Pelayanan Pubik, Kepatuhan harmonisasi dan Kerjasama dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah, Anugerah Rekor Batu Granit Terbesar Berbentuk Kepala Burung Garuda, Pemimpin terpopuler di media pemberitaan online pada ajang The 1st Indonesia GPR Award (IGA) dan Pemimpin berdampak di Media Digital Tahun 2023 pada Award The 2nd Indonesia DEI & ESG (IDEAS). Dengan adanya penghargaan yang diterima dapat dijadikan motivasi agar berkinerja lebih optimal dalam pencapaian sasaran stategis Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung untuk tercapainya sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Belitung.

1 PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan *Good Governance*, kinerja merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi dengan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business prosess) dan sumber daya manusia aparatur. Mendukung hal tersebut, akuntabilitas kinerja menjadi langkah awal agar penyelenggaraan pemerintah yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instani Pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instani Pemerintah, salah satu komponen SAKIP adalah Pelaporan Kinerja sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja. Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam rangka melakukan penilaian atas keberhasilan atau kegagalan dari setiap pelaksanaan tujuan, sasaran, program dan kegiata yang dilaksanakan, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung sebagai penyelenggara pemerintahan mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang diwujudkan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung ini merupakan implementasi tahun kelima dari Rencana Strategis tahun 2018-2023 yang diperjanjikan melalui perjanjian kinerja pimpinan. Melalui perjanjian kinerja terwujudlah terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Disamping itu penyusunan Laporan Kinerja ini juga bertujuan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

A. Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung

Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung. Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan fungsi membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
d. Pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada instansi daerah; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi dalam lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut:

1. Sekretaris Daerah
2. Asisten Pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
   a. Bagian Pemerintahan, terdiri dari :
      - Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
   b. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
      - Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
   c. Bagian Hukum, terdiri dari:
      - Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari:
   a. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri dari:
      - Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
   b. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari:
      - Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
   c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri dari:
      - Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
      - Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
4. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari:
   a. Bagian Umum, terdiri dari:
      - Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
   b. Bagian Organisasi, terdiri dari:
      - Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
   c. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, terdiri dari:
      - Sub Bagian Protokol
      - Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

B. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 110 pegawai, terdiri dari pejabat struktural sebanyak 16 pegawai, Jabatan Fungsional Tertentu sebanyak 39 pegawai, Jabatan Fungsional Umum sebanyak 49 pegawai dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebanyak 6 pegawai , Rincian jumlah pegawai berdasarkan golongan dan latar belakang Pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Pegawai Sekretariat Daerah Berdasarkan Pangkat/Golongan

Rincian	Jumlah PNS		Jumlah CPNS		Jumlah P3K		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	
Gol. IV	13	2	-	-	-	-	15
Gol. III	41	42	-	-	-	-	83
Gol. II	4	2	-	-	-	-	6

Rincian	Jumlah PNS		Jumlah CPNS		Jumlah P3K		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	
Gol. I	-	-	-	-			0
Gol.IX					1	2	3
Gol VII	-	-	-	-	-	3	3
Total	**58**	**46**	**-**	**-**	**1**	**5**	**110**

Tabel 1.2
Pegawai Sekretariat Daerah Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	PNS		CPNS		P3K		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	
1	S-3	-	1	-	-	-	-	1
2	S-2	9	2	-	-	-	-	11
3	S-1	35	26	-	-	-	3	64
4	D-4	1	3	-	-	-	-	4
5	D-3	5	8	-	-	0	3	16
6	SLTA/Sederajat	9	5	-	-	-	-	14
	Total	**59**	**45**	**0**	**0**	**0**	**6**	**110**

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung

Stuktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung tertuang dalam Peraturan Bupati Belitung Nomor 67 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung sebagai berikut

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung
(Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2022)

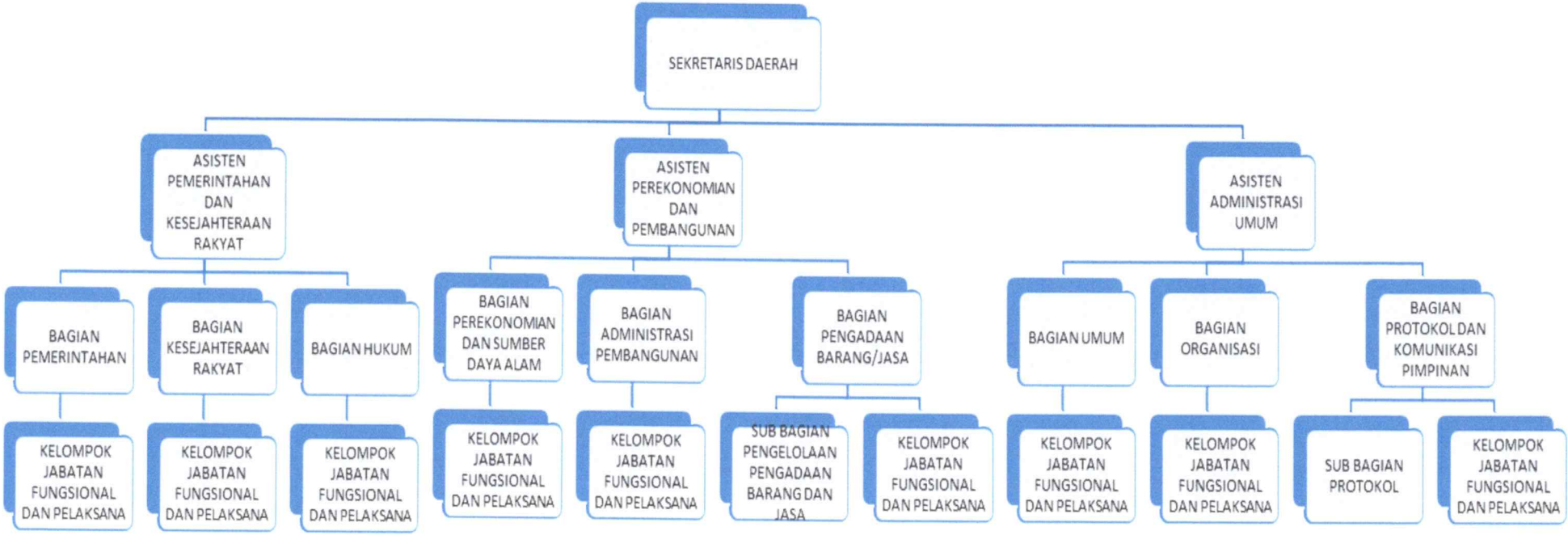

Berdasarkan struktur organisasi yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung, maka dapat dilihat bahwa Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan terdiri dari 3 (tiga) Asisten dan 9 (sembilan) bagian, dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. **Sekretaris Daerah**

   Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan berkedudukan di bawah dan bertangungjawab kepada Bupati.

2. **Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**

   Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah di bidang Pemerintahan dan hukum, dan pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejaheraan rakyat. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menyelengarakan fungsi:

   a. Penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah, hukum dan kesejahteraan rakyat;
   b. Pengkorrdinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, hukum dan kesejahteraaan rakyat:
   c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Pemerintahan, hukum dan Kesejahteraan rakyat;
   d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemerintahan, hukum dan Kesejahteraan rakyat;
   e. Pematauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang Pemerintahan, hukum dan Kesejahteraan rakyat;
   f. Penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya aparatur di bidang Pemerintahan, hukum dan Kesejahteraan rakyat; dan
   g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang pemerintahan hukum, dan kesejahteraan rakyat yang berkaitan dengan tugasnya

   Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas :

   a) Bagian Pemerintahan

   Bagian Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, dan kerja sama dan otonomi Daerah. Bagian Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

   a. penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, dan kerja sama dan otonomi Daerah;
   b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, dan kerja sama dan otonomi Daerah;
   c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, dan kerja sama dan otonomi Daerah;

d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, dan kerja sama dan otonomi Daerah;
e. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, dan kerja sama dan otonomi Daerah;
f. penyusunan rencana program kerja dan anggaran Bagian, pengelolaan administrasi ASN, rumah tangga dan tata usaha Bagian;
g. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
h. pengoordinasian Forum Komunikasi Pimpinan Daerah;
i. pengoordinasian administrasi pemerintahan kecamatan, kelurahan dan desa;
j. pengoordinasian pembentukan, penghapusan, penggabungan dan pemekaran wilayah kecamatan dan/atau kelurahan;
k. pengoordinasian penegasan batas Daerah, kecamatan, kelurahan, dan/atau pemindahan ibukota kecamatan;
l. pengoordinasian toponimi dan pemetaan wilayah;
m. penyiapan bahan penetapan kode dan data kewilayahan;
n. sinkronisasi perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas perangkat Daerah, serta pemantauan dan evaluasi pelaksaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah;
o. penyusunan bahan kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada camat;
p. penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
q. penghimpunan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD);
r. pelaksanaan fasilitasi penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Organisasi Perangkat Daerah;
s. pengoordinasian persiapan dan pelaksanaan pemilihan Bupati;
t. pengoordinasian proses pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian Bupati
u. dan Wakil pengoordinasian pengusulan izin dan cuti Bupati dan Wakil Bupati;
v. pengoordinasian persiapan dan pelaksanaan pemilihan umum;
w. pengoordinasian proses administrasi pergantian antar waktu pimpinan dan anggota legislatif;
x. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah bidang otonomi Daerah;
y. penyiapan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang kerja sama dalam negeri dan luar negeri;
z. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan naskah kerja sama Daerah:
aa. pelaksanaan pengolahan data kerja sama Daerah dalam negeri dan luar negeri;
bb. pelaksanaan pengendalian dan perumusan data hasil kerja sama Daerah dalam negeri dan luar negeri;
cc. pengoordinasian forum dan asosiasi pemerintah Daerah;
dd. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kerja sama Daerah dalam negeri yang dilakukan oleh perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Daerah;
ee. pelaksanaan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kerja sama Daerah dalam negeri dan luar negeri;

ff. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
gg. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Bagian Kesejahteraan Rakyat

Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Bagian Kesra menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan data tentang sarana peribadatan, sarana Pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan yang berhubungan dengan sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;
c. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan urusan pemerintahan bidang keagamaan;
d. penyiapan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan sarana peribadatan, sarana Pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;
e. penyiapan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan di bidang sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan Pendidikan keagamaan;
f. penyiapan bahan pertimbangan pemberian bantuan di bidang sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan Pendidikan keagamaan;
g. penyiapan bahan, mengoordinasikan dan melakukan perumusan kebijakan Daerah bidang lembaga dan kerukunan keagamaan;
h. penyiapan dan mengoordinasikan bahan pedoman pembinaan lembaga keagamaan dan kerukunan umat beragama;
i. melakukan pembinaan, fasilitasi dan pengembangan kerja sama antar lembaga keagamaan dan kerukunan umat beragama;
j. penyiapan bahan pengolahan data, saran, pertimbangan serta koordinasi kegiatan dan penyusunan laporan program pembinaan umat beragama dan kerja sama antar Lembaga keagamaan;
k. pengoordinasian lintas sektor dan pertemuan/rapat-rapat koordinasi di bidang kerukunan umat beragama dan serta kerja sama antar lembaga keagamaan;
l. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kerukunan umat beragama dan aliran kepercayaan serta kerja sama antar lembaga keagamaan;
m. pengoordinasian kegiatan musyawarah antar umat beragama dan aliran kepercayaan;
n. penyiapan bahan dan mengoordinasikan kegiatan forum kerukunan umat beragama dan konsultasi kerukunan hidup antar umat beragama dan aliran kepercayaan;
o. pengoordinasian kerja sama sosial kemasyarakatan dan konsultasi penanggulangan secara dini masalah dan kasus kerukunan hidup antar umat beragama dan aliran kepercayaan;
p. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kegiatan kerukunan umat beragama dan aliran kepercayaan;

q. penyiapan bahan, dan melakukan pemantauan dan evaluasi kebijakan Daerah bidang lembaga dan kerukunan keagamaan;
r. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan pemerintah Daerah di bidang sosial, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
s. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pemerintah Daerah di bidang sosial, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
t. penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintah Daerah di bidang sosial, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
u. penyiapan bahan pelayanan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
v. pengoordinasian pemberian hibah dan bantuan sosial kepada badan/lembaga, organisasi kemasyarakatan, kelompok masyarakat;
w. penyiapan bahan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan hibah dan bantuan sosial kepada badan/lembaga, organisasi kemasyarakatan, kelompok masyarakat;
x. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan pemerintah Daerah di bidang kepemudaan dan olahraga, dan pendidikan dan kebudayaan;
y. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pemerintah Daerah di bidang kepemudaan dan olahraga, dan pendidikan dan kebudayaan;
z. penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintah Daerah di bidang kepemudaan dan olahraga, dan pendidikan dan kebudayaan;
aa. penyiapan bahan pelayanan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, dan pendidikan dan kebudayaan serta kemasyarakatan lainnya;
bb. penyusunan rencana program kerja dan anggaran Bagian, pengelolaan administrasi ASN, rumah tangga dan tata usaha Bagian;
cc. penyiapan bahan koordinasi dengan dinas terkait di bidang pendidikan dan kebudayaan;
dd. penyiapan bahan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya;
ee. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
ff. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c) Bagian Hukum

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi. Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum perencanaan dan penyusunan produk hukum Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. penyiapan bahan penyusunan rencana program kerja dan anggaran di bidang tugasnya;
c. penyiapan bahan pengoordinasian perencanaan program pembentukan peraturan Daerah dan peraturan Bupati;
d. penyiapan bahan penyusunan produk hukum Daerah;
e. pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum Daerah;
f. penyiapan bahan penjelasan Bupati dalam proses penetapan peraturan Daerah;
g. penyiapan bahan analisa dan kajian produk hukum Daerah;
h. pelaksanaan pembinaan penyusunan produk hukum Daerah;
i. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan produk hukum Daerah;
j. pelaksanaan koordinasi permasalahan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
k. pelaksanaan fasilitasi bantuan hukum, konsultasi hukum dan pertimbangan hukum serta perlindungan hukum bagi unsur pemerintah Daerah dalam sengketa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;
l. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kerja sama dalam penanganan perkara hukum;
m. pelaksanaan koordinasi dan evaluasi penegakan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM);
n. penyiapan bahan penyusunan pendapat hukum (legal opinion);
o. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap hasil penanganan perkara sengketa hukum;
p. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kajian contract drafting naskah perjajian kerja sama Daerah;
q. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengawasan dan pelayanan hukum di Daerah;
r. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Daerah;
s. pelaksanaan inventarisasi dan dokumentasi produk hukum Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;
t. penghimpunan serta mengolah data dan informasi sebagai bahan dalam rangka pembentukan kebijakan Daerah;
u. pelaksanaan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
v. pemberian pelayanan administrasi informasi produk hukum;
w. pelaksanaan sosialisasi, penyuluhan dan desiminasi produk hukum Daerah maupun peraturan perundang-undangan lainnya;
x. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap dokumentasi dan informasi produk hukum Daerah;
y. penyusunan rencana program kerja dan anggaran Bagian, pengelolaan administrasi ASN, rumah tangga dan tata usaha Bagian;
z. penyiapan bahan administrasi pengundangan dan autentifikasi produk hukum Daerah;
aa. penyiapan bahan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya;
bb. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
cc. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. **Asisten Perekonomian dan Pembangunan**

Asisten perekonomian dan pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, dan pengadaan barang/jasa. Asisten Perekonomian dan Pembangunan menyelengarakan fungsi:

a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, dan pengadaan barang/jasa;
b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, dan pengadaan barang/jasa;
c. penyusunan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang/jasa;
d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perekonomian dan sumber daya alam, dan administrasi pembangunan serta pengadaan barang/jasa;
e. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri atas :

a) **Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam**

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah, perekonomian, dan sumber daya alam. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan penetapan kebijakan teknis pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
b. penyiapan bahan pembinaan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
c. pelaksanaan analisa perkembangan dan pencapaian kinerja Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
e. pengoordinasian pengelolaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
f. pengoordinasian dan penyiapan bahan terkait penyertaan modal pemerintah Daerah;
g. pengoordinasian penyusunan bahan dan data serta Analisa pengembangan pariwisata, perhubungan, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan dan ketenagakerjaan;
h. pengoordinasian penyusunan bahan perumusan kebijakan pengembangan pariwisata, perhubungan, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan dan ketenagakerjaan;
i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait terhadap pelaksanaan kegiatan pengembangan pariwisata, perhubungan, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan dan ketenagakerjaan;

j. pengoordinasian penyusunan petunjuk pelaksanaan dan pedoman umum pengembangan pariwisata, perhubungan, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan dan ketenagakerjaan;
k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan pariwisata, perhubungan, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan dan ketenagakerjaan;
l. pengoordinasian dan pembinaan di bidang pengembangan pariwisata, perhubungan, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan dan ketenagakerjaan;
m. penyusunan rencana program kerja dan anggaran Bagian, pengelolaan administrasi ASN, rumah tangga dan tata usaha Bagian;
n. pengoordinasian penyusunan bahan dan data serta analisa di bidang pertanian, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan, perikanan dan kelautan, energi dan sumber daya mineral, dan lingkungan hidup dan kehutanan;
o. pengoordinasian penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pertanian, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan, perikanan dan kelautan, energi dan sumber daya mineral, dan lingkungan hidup dan kehutanan;
p. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang pertanian, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan, perikanan dan kelautan, energi dan sumber daya mineral, dan lingkungan hidup dan kehutanan;
q. pengoordinasian penyusunan petunjuk pelaksanaan dan pedoman umum kegiatan di bidang pertanian, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan, perikanan dan kelautan, energi dan sumber daya mineral, dan lingkungan hidup dan kehutanan;
r. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang pertanian, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan, perikanan dan kelautan, energi dan sumber daya mineral dan lingkungan hidup dan kehutanan;
s. pengoordinasian fasilitasi kegiatan dan pembinaan di bidang pertanian, perkebunan, dan ketahanan pangan, peternakan, perikanan dan kelautan, energi dan sumber daya mineral, dan lingkungan hidup dan kehutanan;
t. penyiapan bahan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya;
u. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
v. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Bagian Administrasi Pembangunan

Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang fasilitasi penyusunan program pembangunan, pengendalian dan evaluasi program pembangunan, dan pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan. Bagian Administrasi Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan Daerah dalam pelaksanaan administrasi pembangunan;
b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan tugas perangkat Daerah terkait bidang tugas administrasi pembangunan;

c. pelaksanaan penyusunan rencana, program dan kegiatan pada Bagian Adminstrasi Pembangunan;
d. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran di lingkungan Sekretariat Daerah;
e. pengoordinasian penyusunan dokumen evaluasi kinerja di lingkungan Sekretariat Daerah;
f. fasilitasi penyusunan program pembangunan dalam rangka mengembangkan akses pembangunan Daerah di lingkungan Sekretariat Daerah;
g. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan program pembangunan dalam rangka mengurangi risiko dan kerugian pihak lain dalam rangka kelancaran pelaksanaan program pembangunan Daerah di lingkungan Sekretariat Daerah;
h. penyusunan bahan kebijakan pengendalian pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun pihak lain agar sesuai dengan program pembangunan Daerah;
i. pengoordinasian pengendalian sinergitas program pembangunan baik oleh lembaga pemerintah maupun pihak lain;
j. fasilitasi dan pembinaan dalam rangka pengendalian dan evaluasi program pembangunan;
k. pelaksanaan kegiatan pembangunan di lingkungan Sekretariat Daerah;
l. penyusunan laporan hasil pengendalian dan evaluasi program pembangunan;
m. penyusunan rencana pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan;
n. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan;
o. penyusunan laporan hasil pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan;
p. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
q. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c) Bagian Pengadaan Barang/Jasa

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa. Bagian Pengadaan Barang/Jasa menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;
b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;
c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;
d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;

e. penyusunan rencana program kerja dan anggaran Bagian, pengelolaan administrasi ASN, rumah tangga dan tata usaha Bagian;
f. pelaksanaan pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa (termasuk akun pengguna sistem pengadaan secara elektronik) dan infrastrukturnya;
g. pelaksanaan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik;
h. fasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa;
i. pengidentifikasian kebutuhan pengembangan sistem informasi;
j. pelaksanaan pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
k. pelaksanaan pelayanan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah kepada masyarakat luas;
l. pengelolaan informasi kontrak;
m. pelaksanaan inventarisasi permasalahan dan mempersiapkan solusi pemecahan di bidang tugasnya;
n. pelaksanaan pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah, terutama para pengelola pengadaan barang/jasa dan personel Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
o. pelaksanaan pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa;
p. pelaksanaan pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan;
q. pelaksanaan pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
r. pelaksanaan analisis beban kerja Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
s. pelaksanaan pengelolaan personil Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
t. pelaksanaan pengembangan sistem insentif personil Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
u. fasilitasi implementasi standarisasi layanan pengadaan secara elektronik;
v. pelaksanaan pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah;
w. pelaksanaan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah di Daerah dan desa;
x. pelaksanaan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah;
y. pelaksanaan layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi;
z. pelaksanaan inventarisasi permasalahan dan mempersiapkan solusi pemecahan di bidang tugasnya;
aa. penyiapan bahan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya;
bb. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
cc. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Asisten Administrasi Umum

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan kebijakan, penyusunan kebijakan daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan. Asisten Administrasi Umum menyelengarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan;
c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan;
d. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang umum, organisasi, protocol dan komunikasi pimpinan;
e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan;
f. penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan ASN pada instansi daerah;
g. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dibidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya;
h. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Asisten Bidang Administrasi Umum, terdiri atas:

a) Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan dan evaluasi di bidang kepegawaian, tata usaha pimpinan, Staf Ahli dan pegawai, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan. Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkantoran yang meliputi kegiatan kepegawaian, tata usaha umum, persuratan, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli, dan rapat-rapat dinas;
b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan administrasi perkantoran yang meliputi kegiatan kepegawaian, tata usaha umum, persuratan, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli dan rapat-rapat dinas;
c. penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan administrasi perjalanan dinas Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat Daerah, Camat, Administrator, Pengawas, Fungsional dan Pelaksana di lingkungan Sekretariat Daerah;
d. pelaksanaan pengelolaan kearsipan;
e. penyiapan bahan penyusunan program pengelolaan administrasi kepegawaian;
f. penyiapan bahan penetapan keputusan kenaikan gaji berkala di Sekretariat Daerah;
g. penyiapan bahan pembinaan dan peningkatan disiplin pegawai di Sekretariat Daerah;
h. penyiapan bahan pengembangan sumber daya aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah;
i. penyiapan bahan pengelolaan sistem informasi manajemen kepegawaian dan sasaran kinerja pegawai di Sekretariat Daerah;
j. penyiapan bahan penetapan kartu kepegawaian di Sekretariat Daerah;
k. penyiapan bahan administrasi kepegawaian Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf Ahli;
l. penyusunan rencana program kerja dan anggaran Bagian, pengelolaan administrasi ASN, rumah tangga dan tata usaha Bagian;

m. perumusan kebijakan penyelenggaraan anggaran, verifikasi dan perbendaharaan, pembukuan dan pelaporan keuangan Bupati/Wakil Bupati dan Sekretariat Daerah;
n. pengoordinasian dalam rangka penyusunan, pengolahan data anggaran Bupati/Wakil Bupati dan Sekretariat Daerah;
o. pengoordinasian administrasi dan pengelolaan keuangan Bupati/Wakil Bupati dan Sekretariat Daerah;
p. pembinaan dan pelaksanaan fungsi perbendaharaan dan pembukuan Bupati/Wakil Bupati dan Sekretariat Daerah;
q. pelaksanaan pembinaan terhadap bendahara Bupati/Wakil Bupati, dan bendahara/bendahara pembantu Sekretariat Daerah;
r. penyusunan laporan keuangan Bupati/Wakil Bupati dan Sekretariat Daerah;
s. pelaksanaan tugas penatausahaan keuangan di lingkunganSekretariat Daerah;
t. pelaksanaan sistem pengendalian intern keuangan;
u. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fungsi perbendaharaan, anggaran dan pertanggungjawaban di lingkungan Sekretariat Daerah;
v. pelaksanaan pengelolaan urusan rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati serta Sekretariat Daerah;
w. pelaksanaan penyediaan akomodasi, transportasi, jamuan, makanan dan minuman untuk kegiatan pemerintah Daerah, tamu pemerintah Daerah dan rapat-rapat;
x. pelaksanaan kebijakan pengamanan, pemeliharaan sarana dan prasarana serta menjaga kebersihan kantor di lingkup Sekretariat Daerah;
y. pelaksanaan kebijakan pengadaan perlengkapan, peralatan Bupati dan Wakil Bupati serta di lingkup Sekretariat Daerah;
z. pelaksanaan kebijakan pengelolaan, penggunaan, pengendalian dan pemeliharaan kendaraan dinas Bupati dan Wakil Bupati serta di lingkup Sekretariat Daerah dan sewa kendaraan;
aa. pelaksanaan kebijakan pengamanan, pemeliharaan sarana dan prasarana, menjaga kebersihan dan pemeliharaan rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati serta rumah dinas Sekretaris Daerah;
bb. pelaksanaan penyiapan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan Bupati dan Wakil Bupati serta Sekretariat Daerah;
cc. penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta pengelolaan asrama mahasiswa dan mess pemerintah Daerah di dalam/luar Daerah;
dd. penyiapan bahan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya;
ee. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
ff. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

b) Bagian Organisasi

Bagian Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, serta kinerja dan reformasi birokrasi. Bagian Organisasi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan struktur organisasi dan tata kerja;
b. penyusunan bahan koordinasi perumusan tugas dan fungsi jabatan organisasi perangkat Daerah;
c. penyusunan bahan evaluasi kelembagaan perangkat Daerah dan unit pelaksana teknis Daerah;
d. penyusunan standar kompetensi jabatan;
e. penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan;
f. penyiapan bahan penyusunan tambahan penghasilan pegawai;
g. penyusunan kajian akademik terhadap usulan penataan organisasi perangkat Daerah;
h. penyusunan rencana program kerja dan anggaran Bagian, pengelolaan administrasi ASN, rumah tangga dan tata usaha Bagian;
i. penyusunan pedoman tata naskah dinas, pakaian dinas, jam kerja, metode kerja, prosedur kerja, budaya kerja, dan pola hubungan kerja;
j. penyiapan bahan pembinaan serta bimbingan teknis di bidang ketatalaksanaan dan pelayanan publik bagi unit kerja/organisasi perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Daerah;
k. pelaksanaan sosialisasi dan fasilitasi penyusunan standar pelayanan publik dan sistem informasi pelayanan publik;
l. penyiapan bahan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, evaluasi dan fasilitasi, pelaporan survei kepuasan masyarakat;
m. pelaksanaan sosialisasi, fasilitasi penyusunan peta proses bisnis;
n. penghimpunan dan fasilitasi standar operasional prosedur yang disusun oleh masing-masing perangkat Daerah;
o. penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang tugasnya;
p. pengoordinasian dan fasilitasi inovasi pelayanan publik;
q. penyusunan bahan kebijakan teknis peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi;
r. penyusunan bahan laporan kinerja instansi pemerintah Daerah;
s. penyusunan road map reformasi birokrasi;
t. pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
u. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi;
v. penyiapan bahan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya;
w. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
x. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c) Bagian Protokol dan komunikasi Pimpinan

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, serta publikasi dan dokumentasi kegiatan pimpinan. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang protokol, komunikasi pimpinan, serta publikasi dan dokumentasi kegiatan pimpinan;

b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, serta publikasi dan dokumentasi kegiatan pimpinan;
c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait protokol, komunikasi pimpinan, serta publikasi dan dokumentasi kegiatan pimpinan;
d. penyusunan rencana program kerja dan anggaran Bagian, pengelolaan administrasi ASN, rumah tangga dan tata usaha Bagian;
e. menjalin hubungan dengan berbagai pihak terkait pelaksanaan fungsi juru bicara pimpinan Daerah;
f. pemberian masukan kepada pimpinan Daerah tentang penyampaian informasi tertentu;
g. pemberian informasi dan penjelasan kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan kebutuhan dan/atau atas arahan pimpinan;
h. penghimpunan dan pengolahan informasi yang bersifat penting dan mendesak sesuai kebutuhan Bupati dan Wakil Bupati;
i. penyiapan dan penggandaan bahan materi rapat;
j. penyiapan dan penggandaan bahan materi kebijakan;
k. penyusunan naskah sambutan dan pidato Bupati dan Wakil Bupati;
l. mendokumentasikan kegiatan Bupati dan Wakil Bupati;
m. menyusun notulensi rapat Bupati dan Wakil Bupati;
n. memfasilitasi peliputan dan publikasi media terhadap kegiatan Bupati dan Wakil Bupati;
o. penyiapan bahan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya;
p. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
q. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Aspek Strategis Organisasi

Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah dalam merumuskan kebijakan pemerintah daerah, menyelenggarakan administrasi pemeritahan, penatalaksanaan organisasi serta memberikan fasilitasi administrasi kepada seluruh perangkat daerah. Koordinasi yang dilaksanakan tidak hanya terbatas secara horizontal, vertikal, maupun diagonal dalam lingkup koordinasi.

Pemetaan permasalahan dalam penentuan prioritas dan sasaran Sekretariat Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tabel 1.3
Pemetaan Permasalahan prioritas dan sasaran Sekretariat Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Belum optimalnya kinerja penyelenggaraan administrasi pemerintahan	Belum maksimalnya pelaksanaan kerjasama daerah oleh tim koordinasi kerjasama daerah	- Belum adanya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama daerah - kurangnya koordinasi antar Lintas Sektor dan Lintas Pemangku Kepentingan - Belum adanya sosialisasi tentang tindak lanjut Kerjasama daerah
		Belum optimalnya Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD)	- Kurang maksimalnya koordinasi antar perangkat daerah - Data dari OPD kurang valid - Penyampaian data dari OPD tidak tepat waktu - Kurangnya kapasitas SDM yang berkompeten
		Administrasi pengembangan wilayah dan batas administrasi pemerintahan yang belum tertata dengan baik	Belum adanya penegasan dan penetapan wilayah administrasi kecamatan
2	Belum optimalnya kebijakan kesejahteraan rakyat	Pemenuhan layanan Bina Mental Spiritual belum maksimal	- Masih rendahnya frekuensi pelaksanaan kegiatan pembinaan mental dan spiritual - Kurangnya SDM yang membidangi
		Monitoring dan evaluasi layanan kesejahteraan masyarakat belum maksimal	Kurangnya koordinasi antar perangkat daerah terkait kebutuhan pelayanan kesejahteraan masyarakat
		Monitoring dan evaluasi layanan kesejahteraan sosial belum maksimal	- Kurang maksimalnya koordinasi antar perangkat daerah terkait kebutuhan pelayanan kesejahteraan sosial - Kurangnya sosialisasi kegiatan ke OPD terkait

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
3	Belum optimalnya pembentukan produk hukum daerah	Belum optimalnya harmonisasi produk hukum daerah	- Kurangnya sumber daya aparatur tenaga fungsional perancang perundang-undangan - Penyampaian rancangan produk hukum daerah yang diajukan oleh OPD tidak tepat waktu sesuai dengan program pembentukan peraturan daerah (propemperda) dan program pembentukan peraturan bupati (propemperbup) - Kurangnya sosialisasi kegiatan ke OPD terkait
4	Belum optimalnya pelaksanaan administrasi perekonomian dan sumber daya alam	Belum optimalnya pendampingan kebijakan sumber daya alam	- Lemahnya koordinasi lintas bidang dari perangkat daerah teknis dan stake holder terkait - Belum maksimalnya sosialisasi kegiatan pada OPD terkait - Kurangnya Sumber Daya Aparatur (ASN) yang membidangi
		Belum terkendalinya tingkat inflasi daerah	- Lemahnya koordinasi lintas bidang dari perangkat daerah teknis terkait - Kurangnya data dan informasi terkait perekonomian dan perdagangan yang akurat - Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengendalian inflasi daerah - Regulasi yang telah ada belum di implementasikan dengan maksimal - Kurangnya SDM pengendali inflasi daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
		- Pengembangan, evaluasi dan pengendalian bidang pariwisata, perhubungan, lingkungan hidup, bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, perindustrian, dan BUMD - Belum optimalnya koordinasi dalam hal pengembangan, pengendalian pariwisata, perhubungan, lingkungan hidup, PTSP, PM, perindustrian dan BUMD	- Lemahnya koordinasi lintas bidang dari perangkat daerah teknis dan stake holder terkait - Belum adanya kajian investasi dan penanaman modal Kab.Belitung - Kurangnya sosialisasi kegiatan kepada OPD terkait - Kurang lengkapnya data dan informasi terkait pengembangan, pengendalian pada sektor terkait - Kurangnya SDM pengembangan, pengendalian pada sektor terkait
		- Belum optimalnya pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan - Belum optimalnya pembinaan BUMD dan BLUD	- Lemahnya koordinasi lintas bidang dari perangkat daerah teknis dan stakeholder terkait - Kurang maksimalnya sosialisasi kegiatan terhadap OPD terkait - Kurang maksimalnya pelaksanaan regulasi / kebijakan daerah terhadap kegiatan terkait - Kurangnya data dan informasi dari *stakeholder* terkait - Belum adanya pedoman dan SOP pembinaan BUMD dan BLUD - Kurangnya SDM
5	Belum optimalnya Penyelenggaraan perencanaan, penyerapan realisasi anggaran dan penyelenggaraan pembangunan fisik	Penyampaian dokumen perencanaan anggaran tidak tepat waktu	Penyampaian data perencanaan anggaran dari masing-masing bagian tidak tepat waktu
		Realisasi anggaran belum sesuai dengan target	Realisasi anggaran per OPD belum sesuai dengan target waktu yang sudah di tentukan

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
		Penyampaian laporan realisasi fisik dan keuangan tidak tepat waktu	- Lambatnya proses penginputan data pada aplikasi SIPK dan tepra dari masing-masing operator OPD - Belum optimalnya penggunaan aplikasi SIPK dan Tepra - Adanya perubahan kebijakan yang berdampak pada sistem pelaporan dan keuangan - Kurangnya jumlah SDM yang berkompeten
		Kurangnya pemahaman OPD dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan fisik	- Lemahnya koordinasi OPD terkait dalam hal pembangunan fisik - Kurangnya kompetensi aparatur dalam hal mekanisme proses pelaksanaan pembangunan - Kurangnya jumlah SDM yang membidangi
6	Belum Optimalnya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan	Sumber Daya Aparatur yang kompeten belum terpenuhi	- Belum adanya Jabatan fungsional pengadaan barang jasa - Kurangnya Jabatan fungsional pengadaan barang jasa - Kurangnya frekuensi pelaksanaan Pendidikan dan Latihan bagi SDM yang membidangi
		- Belum seluruh Pengadaan Barang/Jasa - Pemerintah Daerah melalui Sistem Pengadaan Secara - Elektronik (e-procurement)	Pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara E-procurement belum maksimal - Kurangnya sosialisasi ke OPD dan Penyedia - Kurang maksimalnya koordinasi dengan OPD - Impelementasi terhadap regulasi yang ada belum sepenuhnya di optimalkan OPD terkait - Sering terjadinya gangguan pada sistem aplikasi pengadaan secara elektronik yang di kelola oleh LKPP

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
		Pelaksanaan pengadaan barang jasa belum seluruhnya tepat waktu	- Masih ada perangkat daerah untuk pengadaan konstruksi tidak sesuai jadwal rencana - Kurangnya koordinasi dan supervisi terhadap OPD terkait - Kurangnya data dan informasi (dokumen perencanaan) dari OPD terkait - Kurang tanggapnya OPD dalam menindak lanjuti hasil supervisi pelaksanaan pengadaan - Adanya perubahan kebijakan yang berdampak pergeseran personil yang membidangi
7	Belum optimalnya pelayanan tata usaha, sarana prasarana dan rumah tangga KDH/WKDH dan Sekretariat Daerah	Administrasi tata usaha dan kepegawaian belum tertata dengan baik	- Belum tertatanya dokumen administrasi tata usaha dan kepegawaian - Belum adanya sistem pendokumentasian administrasi tata usaha secara elektronik
		Pemenuhan kebutuhan layanan sarana prasarana dan rumah tangga belum maksimal	- Kondisi sarana prasarana dan rumah tangga belum memadai
		Penyampaian administrasi keuangan tidak tepat waktu	- Lambatnya data administrasi keuangan dari masing-masing bagian - Kurangnya SDM yang membidangi - Kurang tertibnya administrasi keuangan terhadap jadwal pelaksanaan kegiatan
		- Kurangnya SDM dalam hal pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dan minimnya ilmu pengetahuan tentang pengelolaan BMD - Belum optimalnya pengelolaan BMD	- Peningkatan pengetahuan tentang pengelolaan BMD - Kurangnya kompetensi dan pengetahuan SDM terhadap pengelolaan BMD - Kurangnya data dan informasi BMD yang di kelola - Kurangnya Implementasi regulasi terhadap pengelolaan BMD

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
8	Belum optimalnya penyelenggaraan tata laksana, kelembagaan, manajemen ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	- Pelaksanaan reformasi birokrasi belum optimal - Manajemen ASN belum terimplementasi dengan baik - Akuntabilitas kinerja perangkat daerah masih rendah	- Reformasi birokrasi perangkat daerah belum terlaksana secara optimal - Kurangnya penataan kelembagaan perangkat daerah - Kurangnya koordinasi antar OPD - Belum optimalnya monitoring dan evaluasi - Dukungan kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur kurang optimal
9	Kurang optimalnya pelayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan	Belum optimalnya pelayanan kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Sekda	- Tingkat beban kerja pelayanan makin besar seiring dengan kecepatan layanan berbasis teknologi - Dukungan kualitas dan kuantitas SDM belum seimbang dengan tuntutan pelayanan yang makin tinggi - Dukungan sarana dan prasarana kurang maksimal - Terlambatnya data dan informasi dari perangkat daerah terkait

Berdasarkan pemetaan permasalahan yang dijabarkan tabel diatas, maka dapat disimpulkan isu strategis Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tupoksi untuk mewujudkan komitmen.

D. Sistematika Laporan

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Kata Pengantar
2. Ringkasan Eksekutif
3. Bab I Pendahuluan
   a. Tugas dan Fungsi
   b. Struktur Organisasi
   c. Aspek Strategis Organisasi
   d. Sistematika Pelaporan

4. Bab II Perencanaan Kinerja
    a. Target Kinerja Tahun 2018-2023
    b. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
5. Bab III Akuntabiltas Kinerja
    a. Capaian Kinerja Tahun 2023
    b. Kinerja Lainnya
    c. Akuntabilitas Keuangan
6. Bab IV Penutup
    a. Kesimpulan Kinerja Tahun 2023
    b. Rencana Tindaklanjut Tahun 2024
7. Lampiran

2 PERENCANAAN KINERJA

A. Target Kinerja Tahun 2018-2023

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten Belitung nomor 3 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung tahun 2018–2023. Visi dan misi jangka menengah yang tertuang dalam RPJMD kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 adalah:

"Mewujudkan Ekonomi Yang Berkeadilan, Berdaya Saing dan Inovatif di Kabupaten Belitung Tahun 2023"

Implementasi visi dijabarkan kedalam misi yang merupakan penggambaran visi yang ingin di capai dan menguraikan upaya-upaya apa saja yang harus dilakukan untuk mewujudkannya. Dengan memperhatikan visi, maka ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan
2. Meningkatkan pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, professional, akuntabel dan transparan
3. Meningkatkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan

Berdasarkan tugas dan fungsi yang dilaksnakana oleh Sekretariat Daerah maka misi yang selaras adalah misi ke-2 yaitu Meningkatkan pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, professional, akuntabel dan transparan. Sehingga untuk mendukung tercapainya visi dan misi Kepala Daerah, maka Sekretariat menyusun Rencana Strategsi Tahun 2018-2023. Pada tahun 2023 merupakan tahun kelima periode Rencana Strategis, dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023

Tujuan	Sasaran	indikator	satuan	Target				
				2019	2020	2021	2022	2023
Terwujudnya Pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel		Indeks Reformasi Birokrasi		CC	CC	B	BB	BB
		Nilai SAKIP Kabupaten Belitung		B	B	BB	BB	BB
		Nilai Komponen pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja pada evaluasi SAKIP Kabupaten		-	-	28	30	31

Tujuan	Sasaran	indikator	satuan	Target				
				2019	2020	2021	2022	2023
		Belitung - Pengukuran Kinerja - Pelaporan Kinerja				17 11	18 12	19 12
	Meningkatnya Pencapaian sasaran Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesra	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah bidang pemerintahan dam kesra	persen	-	-	100	100	100
	Meningkatnya Pencapaian sasaran Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah bidang Perekonomian dan Pembangunan	persen	-	-	100	100	100
	Meningkatnya Pencapaian sasaran Pembangunan Daerah Bidang Administrasi Umum	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah bidang Administrasi Umum	persen	-	-	100	100	100
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	persen	-	-	3.60	3.60	3.61

Pada perubahahan ketiga Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung terdapat 1 (satu) tujuan dan 3 (tiga) sasaran yang disertai dengan 7 (tujuh) indikator kinerja dengan rincian sebagai berikut:

1. Indeks Reformasi Birokrasi

   Penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tujuan memudahkan Pemerintah Daerah dalam menyediakan informasi mengenai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dan upaya-upaya perbaikan yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi mencakup penilaian terhadap dua komponen yaitu Pengungkit (*Enablers*) dengan bobot 60% dan Hasil (*Results)* dengan bobot 40%. Komponen pengungkit sangat menentukan keberhasilan tugas instansi, sedangkan komponen hasil berhubungan dengan kepuasan para pemangku kepentingan.

Tabel 2.2
Komponen Penilaian Reformasi Birokrasi

No	Komponen Penilaian	Bobot
A	**Komponen Pengungkit**	
1	Pemenuhan	20,00
2	Hasil Antara Area Perubahan	10,00
3	Reform	30,00
	Total Komponen Pengungkit	**60,00**
B	**Komponen Hasil**	
1	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00
2	Kualitas Pelayana Publik	10,00
3	Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00
4	Kinerja Organisasi	10,00
	Total Komponen Hasil	**40,00**
	Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit dan Hasil)	**100,00**

2. Nilai SAKIP Kabupaten Belitung
   Nilai SAKIP Kabupaten Belitung diperoleh berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi pada hasil (*result oriented government)*. Ruang lingkup evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah meliputi 4 komponen, yaitu:

Tabel 2.3
Komponen Evaluasi Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah

	Komponen Yang Dinilai	Bobot
1.	Perencanaan kinerja	30
2.	Pengukuran Kinerja	30
3.	Pelaporan Kinerja	15
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25
	Nilai Hasil Evaluasi	**100**

3. Nilai komponen pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja pada evaluasi SAKIP Kabupaten Belitung
   Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat 4 (empat) komponen evaluasi Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah dan berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah maka terdapat 2 (dua) komponen yang menjadi target kinerja yaitu pengukuran kinerja dengan bobot penilaian sebesar 30 dan pelaporan kinerja dengan bobot 15. Kedua komponen ini menjadi komponen dalam evaluasi SAKIP Kabupaten Belitung yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
4. Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah bidang pemerintahan dan kesra
   Pengukuran capaian kinerja persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah bidang pemerintahan dan kesra diukur berdasarkan ketercapaian indikator sasaran pada misi ke-1 RPJMD yang memenuhi target dibandingkan dengan jumlah indikator sasaran

RPJMD misi ke-1. Terdapat 5 (lima) sasaran dan 6 (enam) indikator kinerja pada misi ke-1RPJMD sebagai barikut:

Tabel 2.4
Sasaran dan Indikator Sasaran misi ke-1 RPJMD

No	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja	Satuan
1	Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	persen
		Angka Kemiskinan	persen
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun
3	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun
4	Meningkatnya Daya BeliMasyarakat	Pengeluaran per kapita	Rupiah
5	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan	Status desa"Maju"	Desa

Rumusan

$$\frac{Jumlah\ indikator\ sasaran\ RPJMD\ yang\ memenuhi\ target\ pada\ misi\ ke-1}{Jumlah\ indikator\ sasaran\ RPJM\ pada\ misi\ ke-1}\ x\ 100\%$$

5. Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah bidang Perekonomian dan Pembangunan

Pengukuran capaian kinerja persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah bidang perekonomian dan pembangunan diukur berdasarkan ketercapaian indikator sasaran pada misi ke-3 RPJMD yang memenuhi target dibandingkan dengan jumlah indikator sasaran RPJMD misi ke-3. Terdapat 8 (delapan) sasaran dan 9 (sembilan) indikator kinerja pada misi ke-3 RPJMD sebagai barikut:

Tabel 2.5
Sasaran dan Indikator Sasaran misi ke-3 RPJMD

No	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja	Satuan
1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen
2	Meningkat nya pengembangan pariwisata	Jumlah kunjungan Wisatawan (domestik dan mancanegara)	Orang
3	Meningkatnya produksi pertanian dan perikanan	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan terhadap PDRB	Persen
4	Meningkatnya pengembangan koperasi dan usaha mikro	Nilai Omset Koperasi (dalam ribu)	Rupiah
		Nilai Omset Usaha Mikro (dalam ribu)	Rupiah
5	Meningkatnya investasi	Nilai investasi (dalam juta)	Rupiah
6	Meningkatnya infrastruktur kewilayahan	Persentase pemenuhan infrastruktur kewilayahan	Persen
7	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	
8	Meningkatnya pengelolaan sampah	Persentase Cakupan Pelayanan Persampahan	Persen

Rumusan

$$\frac{Jumlah\ indikator\ sasaran\ RPJMD\ yang\ memenuhi\ target\ pada\ misi\ ke-3}{Jumlah\ indikator\ sasaran\ RPJM\ pada\ misi\ ke-3}\ x\ 100\%$$

6. Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah bidang Administrasi Umum
   Pengukuran capaian kinerja persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah bidang Administrasi Umum diukur berdasarkan ketercapaian indikator sasaran pada misi ke-2 RPJMD yang memenuhi target dibandingkan dengan jumlah indikator sasaran RPJMD misi ke-2. Terdapat 4 (empat) sasaran dan 5 (lima) indikator kinerja pada misi ke-2 RPJMD sebagai barikut:

Tabel 2.6
Sasaran dan Indikator Sasaran misi ke-2 RPJMD

No	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja	Satuan
1	Terwujudnya pelayanan birokrasi yg bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan	Indeks Reformasi Birokrasi	
2	Terciptanya Birokrasi yang Bersih, Transparan dan Akuntabel	Opini BPK	
		Nilai SAKIP Kabupaten Belitung	
3	Terciptanya Birokrasi yang Inovatif dan Profesional	Indeks Profesionalitas ASN	Persen
4	Birokrasi yang mengedepankan pelayanan masyarakat yang berkualitas	Survey Kepuasan Masyarakat	Persen

Rumusan

$$\frac{Jumlah\ indikator\ sasaran\ RPJMD\ yang\ memenuhi\ target\ pada\ misi\ ke-2}{Jumlah\ indikator\ sasaran\ RPJM\ pada\ misi\ ke-2}\ x\ 100\%$$

7. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
   Survei Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung, serta untuk mendapatkan umpan balik secara berkala atas pencapaian kinerja atau kualitas pelayanan dan sebagai bahan acuan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas publik selanjutnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik terdapat 9 (Sembilan) unsur SKM meliputi 1) Persyaratan, 2) Prosedur Pelayanan, 3) Waktu Pelayanan, 4) Biaya/Tarif, 5) Produk Spesifikasi Jenis Layanan, 6) Kompetensi Pelaksana, 7) Perilaku Pelaksana, 8) Sarana dan Prasarana dan 9) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, dengan rumusan sebagai berikut:

$$Bobot\ nilai\ tertimbang = \frac{Jumlah\ bobot}{Jumlah\ unsur}$$

$$SKM = \frac{Total\ dari\ Nilai\ Persepsi\ Per\ Unsur}{Total\ Unsur\ yang\ Terisi}\ x\ Nilai\ Penimbang$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25 – 100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

SKM Unit Layanan x 25

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2023 merupakan target kinerja tahun terakhir pada Perubahan Ketiga Rencana Strategis Tahun 2018-2023. Melalui perjanjian kinerja maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati sebagai pemberi amanah dan Pimpinan Perangkat Daerah sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Dalam Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target indikator kinerja mengacu pada Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran. Indikator dan target indikator kinerja sasaran yang diperjanjikan sebagaimana dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.7
Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Tujuan			
1	Terwujudnya Pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	BB
		Nilai SAKIP Kabupaten Belitung	BB
		Nilai Komponen Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja pada Evaluasi SAKIP Kabupaten Belitung	31%
Sasaran			
2	Meningkatnya pencapaian sasaran pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan Kesra	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100%
3	Meningkatnya pencapaian sasaran pembangunan daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
4	Meningkatnya pencapaian sasaran pembangunan daerah Bidang Administrasi Umum	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah Bidang Administrasi Umum	100%
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	3,61

Jumlah Anggaran Sekretariat Daerah Tahun 2023

	Program/Kegiatan	Anggaran		Ket.
A	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**	**Rp**	**48.295.731.736**	**PAPBD**
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Rp	84.277.645	PAPBD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	21.320.726.488	PAPBD
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp	313.000.000	PAPBD
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	5.152.300.862	PAPBD
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	5.483778..800	PAPBD
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	2.424.466.000	PAPBD
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	6.005.065.000	PAPBD
8	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp	136.294.6166	PAPBD
9	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Rp	1.687.321.200	PAPBD
10	Penataan organisasi	Rp	317.637.000	PAPBD
11	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Rp	4.144.212.575	PAPBD
B	**Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan**	**Rp**	**77.002.900**	**PAPBD**
1	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp	77.002.900	PAPBD
C	**Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat**	**Rp**	**15.997.823.271**	**PAPBD**
1	Administrasi Tata Pemerintahan	Rp	98.018.6741	PAPBD
2	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Rp	14.590.990.800	PAPBD
3	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Rp	426.645.730	PAPBD
D	**Program Perekonomian Dan Pembangunan**	**Rp**	3.248.415.343	**PAPBD**
1	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Rp	134.081.284	PAPBD
2	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Rp	668.230.775	PAPBD
3	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp	2.336994..264	PAPBD
4	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Rp	109.109.020	PAPBD
	Total Anggaran	**Rp**	**67.618.973.250**	

3 AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan suatu instansi pemerintah untuk mempertangungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan. Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa penyelenggaraan SAKIP meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta reviu dan evaluasi kinerja. Sehingga Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung bertangungjawab untuk melakukan pengukuran kinerja organisasi sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja.

A. Capaian Kinerja Tahun 2023

Capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung dilihat dari ketercapaian realisasi kinerja terhadap target yang telah ditetapkan dalam sasaran strategis yang terdapat pada Perubahan Ketiga Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 yang terdiri dari 1 (satu) tujuan dan 3 (tiga) sasaran dan terjabarkan dalam program dan kegiatan. Sasaran strategis dituangkan kedalam perjanjian kinerja Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung dengan Bupati Belitung dan dijadikan tolah ukur evaluasi kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis.

Dalam pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah maka perlu dilakukan pemetaan kriteria penilaian sehingga lebih mudah dalam menginterpretasikan capaian kinerja:

Tabel 3.1
Skala Nilai Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 ≤ 100 %	Sangat Tinggi
2	76 ≤ 90 %	Tinggi
3	66 ≤ 75 %	Sedang
4	51 ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

1. Ringkasan Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran strategis tercapai atau tidak. Rincian target dan capaian kinerja tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.2
Sasaran Strategis, Indikator, Target dan Realisasi Capaian Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
Tujuan							
1	Terwujudnya Pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi		BB	BB	100	Tercapai
		Nilai SAKIP Kabupaten Belitung		BB	B	89,46	Belum tercapai
		Nilai Komponen pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja pada evaluasi SAKIP Kabupaten Belitung	persen	31	26,41	85,19	Belum tercapai
Sasaran							
1.1	Meningkatnya Pencapaian sasaran Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesra	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah bidang pemerintahan dan kesra	persen	100	83,33	83,33	Belum tercapai
1.2	Meningkatnya Pencapaian sasaran Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah bidang Perekonomian dan Pembangunan	persen	100	66,67	66,67	Belum tercapai
1.3	Meningkatnya Pencapaian sasaran Pembangunan Daerah Bidang Administrasi Umum	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah bidang Administrasi Umum	persen	100	n/a	n/a	Belum tersedia
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)		3,61	3,73	103,32	Tercapai

Sasaran kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung pada tahun 2023 terdiri dari 7 (tujuh) indikator kinerja. Pada ketujuh capaian indikator kinerja terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang telah mencapai target atau realisasi capaian kinerja sangat tinggi yaitu Indeks Reformasi Birokrasi dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan capaian 100%. Terdapat 3 (tiga) capaian kinerja dengan realisasi tinggi (76≤90%) yaitu Nilai SAKIP Kabupaten, nilai komponen pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja pada evaluasi SAKIP Kabupaten Belitung serta persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah bidang pemerintahan dan kesra. Padaindikator kinerja persentase ketercapaian sasaran

pembangunan daerah bidang perekonomian dan pembangunan menunjukkan kinerja sedang dengan capaian kinerja 66,67% dan persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah bidang administrasi umum belum tersedia dikarenakan terdapat indikator kinerja belum rilis datanya dari Badan Kepegawaian Negara dan Badan Pemeriksa Keuangan Pusat.

2. Uraian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Sekretariat Daerah tahun 2023 mengacu pada sasaran strategis yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja. Sebelum diuraikan capaian kinerja tahun 2023, berikut disajikan target dan realisasi kinerja 2019-2023 sehingga dapat diketahui progres ketercapaian kinerja Sekretariat Daerah pada periode renstra 2018-2023.

Tabel 3.3

Target dan Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja	Target Renstra					Realisasi					Persentase (%)				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
A	**Tujuan**															
A.1	Terwujudnya Pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel															
1	Indeks Reformasi Birokrasi	CC	B	B	BB	BB	C	CC	CC	CC	BB	78,82	88,43	89,54	81,28	100
2	Nilai SAKIP Kabupaten Belitung	CC	B	BB	BB	BB	CC	B	B	B	B	100	100	85,77	85,89	89,46
3	Nilai Komponen pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja pada evaluasi SAKIP Kabupaten Belitung			28	30	31			22,78	25,1	26,41			81,36	83,67	85,19
B	**Sasaran**															
B.1	Meningkatnya Pencapaian sasaran Pembangunan															
1	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah bidang pemerintahan dan kesra			100%	100%	100%			33,33%	66,67%	66,67%			33,33	66,67	83,33
B.2	Meningkatnya Pencapaian sasaran Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan															
2	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah bidang Perekonomian dan Pembangunan			100%	100%	100%			100%	77,78%	66,67%			100	77,78	66,67
B.3	Meningkatnya Pencapaian sasaran Pembangunan Daerah Bidang Administrasi Umum															
1	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah bidang Administrasi Umum			100%	100%	100%			20%	40%	60%			20	40	Belum tersedia

No	Indikator Kinerja	Target Renstra					Realisasi					Persentase (%)				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
2	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)			3,60	3,60	3,61			3,6	3,72	3,73			100	103	103

Dari penjabaran tabel 3.3, capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung pada tahun 2019-2023 menunjukkan kinerja yang baik. Hal tersebut dapat dilihat dengan meningkatnya capaian kinerja pada tahun 2023 dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022. Capaian indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi telah tercapai sesuai target yang telah ditetapkan yaitu tercapai 100%. Pada indikator Nilai SAKIP Kabupaten Belitung dan Nilai Komponen pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja pada evaluasi SAKIP Kabupaten Belitung belum mencapai target akhir renstra, akan tetapi secara kuantitaf meningkat pada setiap tahunnya dengan capaian akhir renstra >85%. Capaian indikator persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah bidang pemerintahan dan kesra, walau belum mencapai target sebesar 100%, namun capaian kinerja meningkat pada tiap tahunnya dengan capaian akhir renstra sebesar 83,33%, indikator persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah bidang perekonomian dan pembangunan tercapai 66,67% dan capaian indikator persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah bidang administrasi umum belum tersedia. Sedangkan pada indikator Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), capaiannya telah melampaui dari target yang telah ditetapkan atau menunjukkan realisasi kinerja yang tinggi dengan capaian sebesar 103%.

2.1 Sasaran Strategis (tujuan): Terwujudnya Pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel

Tabel 3.4
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis
Terwujudnya Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Transparan, dan Akuntabel

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
TUJUAN							
1	Terwujudnya Pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi		BB	BB	100	Tercapai
		Nilai SAKIP Kabupaten Belitung		BB	B	89,46	Belum tercapai
		Nilai Komponen pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja pada evaluasi SAKIP Kabupaten Belitung	persen	31	26,41	85,19	Belum tercapai

Pencapaian sasaran strategis (tujuan) 1: terwujudnya pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel diukur dengan menggunakan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu:

1. Indeks Reformasi Birokrasi
2. Nilai SAKIP Kabupaten Belitung
3. Nilai Komponen pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja pada Evaluasi SAKIP Kabupaten Belitung

Uraian kinerja atas 3 (tiga) indikator kinerja terwujudnya pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sebagai berikut:

2.1.1 Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pada tahun 2023, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tengah melakukan penajaman evaluasi reformasi birokrasi dengan lebih mengukur indeks reformasi birokrasi dari sisi dampak kinerja dibandingkan dengan sisi proses yang cenderung bersifat administratif yang disebut dengan reformasi birokrasi tematik yang terdiri dari empat tema yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, dan percepatan prioritas aktual presiden (peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri dan Pengendalian Inflasi). Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Sehingga untuk mengetahui gambaran tingkat kemajuan Pemerintah Kabupaten Belitung dalam menciptakan birokrasi yang berkualitas maka dapat dilihat melalui capaian Indeks Reformasi Birokrasi.

Evaluasi reformasi birokrasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari siklus pengelolaan reformasi birokrasi. Pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi pada tahun 2023 dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023. Laporan hasil evaluasi reformasi birokrasi didalamnya memuat besaran indeks reformasi birokrasi serta rekomendasi yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi. Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Belitung tahun 2023 tercapai sebesar 75,14 dengan kategori "BB". Capaian ini telah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu target kategori "BB". Dalam mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Pemerintah Kabupaten Belitung telah menetapkan Peraturan Bupati Belitung Nomor 50 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2023-2024 dan ditetapkannya keputusan Sekretaris daerah Kabupaten Belitung Nomor :188.45/001/VIII/2023 tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2023.

Berikut perkembangan dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Belitung berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2019-2023:

Tabel 3.5
Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi
Kabupaten Belitung Tahun 2019

No	Komponen Penilaian	Bobot	Hasil Evaluasi KemenPANRB	
			Nilai	%
A.	**Pengungkit/Proses**			
	1. Manajemen Perubahan	5,00	0,7	14
	2. Penataan Peraturan Perundang-Undangan	5,00	0,41	8,20
	3. Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00	0,38	6,33
	4. Penataan Tatalaksana	5,00	1,09	21,80
	5. Penataan Sistem Manajemen SDM	15,00	4,27	28,47
	6. Penguatan Akuntabilitas	6,00	1,66	27,67
	7. Penguatan Pengawasan	12,00	1,65	13,75
	8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,00	1,83	30,50
	Total Komponen Pengungkit/Proses	**60,00**	**11,99**	**19,98**
B	**Hasil**			
	1. Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	20,00	7,09	35,20
	2. Pemerintah Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	4,27	42,70
	3. Kualitas Pelayanan Publik	10,00	6,20	62
	Total Komponen Hasil	**40,00**	**28,21**	**70,53**
	Indeks Reformasi Birokrasi	**100,00**	**40,20**	

Sumber data: LHE KemenPAN dan RB, tahun 2019

Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Kabupaten Belitung Tahun 2021 - 2022

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai		
			2020	2021	2022
A.	**Komponen Pengungkit**				
	I. Pemenuhan	20,00	9,03	9,14	6,45
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	4,86	5,45	6,46
	III. Reform	30,00	8,55	8,89	9,85
Total Komponen Pengungkit		**60,00**	**22,44**	**23,48**	**25,81**
B	**Komponen Hasil**				
	1. Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	5,65	7,20	7,27
	2. Kualitas Pelayanan Publik	10,00	9,48	8,57	9,14
	3. Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	9,73	8,61	8,55
	4. Kinerja Organisasi	10,00	6,65	6,67	6,94
Total Komponen Hasil		**40,00**	**31,94**	**31,14**	**31,90**
Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit+Hasil)		**100,00**	**53,94**	**54,62**	**57,71**

Sumber data: LHE KemenPAN dan RB, tahun 2020-2022

Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Kabupaten Belitung Tahun 2023

No	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index
1	RB General	Strategi Pelaksanaan RB General	Rencana Aksi Pembangunan RB General	3	1,88	1,88
			Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General	7	100	4,39
		Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Persentase Penyderhanaan Struktur Organisasi	2	99,62	1,99
			Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyderhanaan Birokrasi	2	2	0,8
			Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	4	3,2	2,56
			Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	3,5	1,5	1,5
			Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	4	63,52	2,54
			Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,5	1	0,5
			Tingkat Digitalisasi Arsip	2,5	93,22	2,33
			Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan	2,5	3	1,5
			Indeks Kualitas Kebijakan	2,5		
			Indeks Reformasi Hukum	2,5	45,61	1,14
			Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	2,5	2,12	1,06
			Indeks Tata Kelola Pengadaan	2,5	72,4	1,81
			Indeks Sistem Merit	4	252,5	2,46
			Indeks Pelayanan Publik	1,5	3,89	1,17

No	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index
			Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	1,5	88,87	1,33
		Capaian Sasaran Strategis	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	9	3,11	5,6
			Capaian Indikator Kinerja Utama Makro	2	98	1,96
			Capaian Indikator Kinerja Non Makro	8	57,14	2,9
			Opini BPK	5	5	5
			Tindak Lanjut Rekomendasi	4	80,1	3,2
			Indeks BerAkhlak	4	61,6	2,46
			Survei Penilaian Integritas	10	76,61	7,66
			Survei Kepuasan Masyarakat	8	89,33	7,15
		Koefisien	Koefisien	10		
	Total RB General					**64,89**
2	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Pengentasan Kemiskinan (Rencana Aksi)	0,4	0,28	0,28
			Realisasi Investasi (Rencana Aksi)	0,4	0,28	0,28
			Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Rencana Aksi)	0,4		
			Penggunaan Produk Dalam Negeri (Rencana Aksi)	0,4	0,4	0,4
			Pengendalian Inflasi (Rencana Aksi)	0,4	0,27	0,27
			Pengentasan Kemiskinan (Capaian Output)	0,6	54,61	0,23
			Realisasi Investasi (Capaian Output)	0,6		
			Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Capaian Output)	0,6		
			Penggunaan Produk Dalam Negeri (Capaian Output)	0,6	100	0,42
			Pengendalian Inflasi (Capaian Output)	0,6		
		Capaian Indikator Dampak RB Tematik	Pengentasan Kemiskinan (Capaian Dampak)	3	1,5	1,5
			Realisasi Investasi (Capaian Dampak)	3	1,61	1,61
			Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Capaian Dampak)	3		
			Penggunaan Produk Dalam Negeri (Capaian Dampak)	3	2,8	2,8
			Pengendalian Inflasi (Capaian Dampak)	3	2,46	2,46
	Total RB Tematik					**10,25**
	Indeks Reformasi Birokrasi (RB General dan RB Tematik)					**75,14**

Sumber data: Bagian Organisasi-Setda, data diolah

Tabel 3.6
Nilai angka dan Persepsi Indeks Reformasi Birokrasi

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1.	AA	>100	Sangat Memuskan
2.	A	>80-90	Memuaskan
3.	A-		Memuaskan dengan catatan
4.	BB	>70-80	Sangat Baik
5	B	>60-70	Baik
6	CC	>50-60	Cukup
7	C	>30-50	Kurang
8	D	0-30	Sangat Kurang

Sumber: Permenpan RB Nomor 9 Tahun 2023

Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2023 terealisasi sebesar 75,14 dengah kategori "BB". Capaian ini telah mencapai target yang telah ditetapkan dengan kategori "BB". Hasil evaluasi tahun 2023 tidak dapat diperbandingkan dengan capaian tahun tahun 2022 dikarenakan evaluasi Reformasi Birokrasi tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023, meliputi komponen reformasi birokrasi dan general dan tematik sedangkan pada tahun 2022 meliputi komponen pengungkit dan komponen hasil.

Perkembangan realisasi Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2019-2023 dan perbandingan tahun realisasi tahun 2023 dengan target tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.7
Target dan Realisasi Indeks Reformasi Birokrasi
Tahun 2019-2023

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Nilai	Realisasi
Indeks Reformasi Birokrasi	2019	CC	40.20	C
	2020	CC	53.94	CC
	2021	B	54.62	CC
	2022	BB	57,71	CC
	2023	BB	75,14	BB

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Belitung mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan hasil yang semakin baik. Dan capaian pada tahun 2023 telah mencapai target yang telah dilah ditetapkan yaitu kategori "BB". Hasil evaluasi ini diharapkan dapat menjadi pemacu sekaligus pemicu bagi seluruh jajaran birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung untuk terus berubah dan berbenah dalam rangka penguatan dan pencapaian reformasi birokrasi. Walaupun capaian kinerja tahun 2023 telah mencapai target, masih terdapat faktor penghambat dalam pencapaian kinerja yaitu kurangnya kesadaran dan komitmen Bersama diantara seluruh elemen pemerintahan dalam rangka menciptakan kesuksesan reformasi birokrasi yang merupakan tanggung jawab bersama.

Upaya-upaya penting yang telah dilakukan dalam tahun 2023 untuk mendukung pencapaian kinerja antara lain:

1. Kabupaten Belitung telah menetapkan Peraturan Bupati Belitung Nomor 50 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2023-2024.
2. Komitmen melaksanakan reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung ditunjukkan dengan ditetapkannya Keputusan

Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Nomor: 188.45/001/VIII/2023 tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2023.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja tahun 2023 atau untuk memperbaiki kinerja tahun 2023 dengan melakukan:

1. Melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga pengampu dalam rangka meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Belitung
2. Membangun budaya kerja ASN BerAKHLAK di Kabupaten Belitung sebagai bentuk penguatan reformasi birokrasi

2.1.2 Nilai SAKIP Kabupaten Belitung

Akuntabilitas sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instasi yang bersangkutan.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten. Penerapan reformasi birokrasi berorientasi pada pencapaian *outcomes* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Kementerian PANRB perlu melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Belitung. Pelaksanaan evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bertujuan untuk mengetahui tingkat implemetasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dakam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*).

Nilai SAKIP Kabupaten Belitung Tahun 2023 mencapai 63,52 dan berpredikat "B" dengan capaian kinerja sebesar 89,46%. Capaian ini merupakan realisasi nilai SAKIP Kabupaten Belitung Tahun 2023 terhadap nilai minimal SAKIP dengan predikat "BB (>70-80). Hal tersebut menunjukkan bahwa implemetasi AKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan Sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja. Capaian ini belum sesuai dengan target Pemerintah Kabupaten Belitung yang menargetkan kategori BB. Namun, Pemerintah Kabupaten Belitung berupaya meningkatkan kinerja yang tepat sasaran dalam peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented*). Perkembangan dan pelaksanaan SAKIP Kabupaten Belitung yang didasarkan pada hasil evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai berikut:

Tabel 3.8
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2019-2021

	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai		
			2019	2020	2021
a.	Perencanaan Kinerja	30	18,83	22,17	22,46
b.	Pengukuran Kinerja	25	11,00	12,76	12,98
c.	Pelaporan Kinerja	15	7,88	9,72	9,80
d.	Evaluasi Internal	10	4,53	4,53	4,63
e.	Capaian Kinerja	20	9,90	10,85	11,03
	Nilai Hasil Evaluasi	**100**	**52,14**	**60,03**	**60,90**
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		**CC**	**B**	**B**

Sumber: Hasil Evaluasi AKIP KemenpanRB Tahun 2019-2021

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2022 -2023

	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2022	2023
1.	Perencanaan Kinerja	30	21,68	22,40
2.	Pengukuran Kinerja	30	15,26	16,16
3.	Pelaporan Kinerja	15	9,84	10,25
4.	Evaluasi Internal	25	14,20	14,71
	Nilai Hasil Evaluasi	**100**	**60,98**	**63,52**
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		**B**	**B**

Sumber: Hasil Evaluasi AKIP KemenpanRB Tahun 2022-2023

Tabel 3.9
Nilai angka dan Persepsi Indeks AKIP

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1.	AA	>90-100	Sangat Memuaskan
2.	A	>80-90	Memuaskan
3.	BB	>70-80	Sangat Baik
4.	B	>60-70	Baik
5.	CC	>50-60	Cukup (Memadai)
6.	C	>30-50	Kurang
7.	D	>0-30	Sangat Kurang

Sumber: PermenPAN RB Nomor 88 Tahun 2021

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Belitung pada tahun 2023 mencapai nilai 63,52 dan meningkat sebesar 2,54 poin dibandingkan dengan tahun 2022 dengan nilai sebesar 60,98. Sedangkan capaian pada tahun 2019 sampai dengan 2021 dengan 5 (lima) komponen penilaian, capaian pada tahun 2021 meningkat sebesar 0,87 dibandingkan tahun 2020 dan meningkat sebesar 7,89 poin dibandingkan tahun 2019.

Perkembangan realisasi Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2019-2023 dan perbandingan tahun realisasi tahun 2023 dengan target tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.10
Target dan Capaian Indikator Nilai SAKIP Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023

Indikator	Tahun	Target	Nilai	Realisasi
Nilai SAKIP Kabupaten Belitung	2019	CC	52.14	CC
	2020	B	60.03	B
	2021	BB	60.90	B
	2022	BB	60,98	B
	2023	BB	63,52	B

Nilai SAKIP Kabupaten Belitung tahun 2023 berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, secara kategori/predikat masih belum mencapai target yaitu dengan target "BB" tercapai "B" dengan nilai sebesar 63,98 atau tercapai 89,46%. Meskipun selama tiga tahun terakhir secara predikat masih sama dan belum mencapai target, namun secara kuantitafif capaian kinerja pada tahun 2023 meningkat sebesar 2,54 poin dibandingkan tahun 2022 dan meningkat sebesar 2,62 poin pada tahun 2021.

Faktor penghambat dalam pencapaian kinerja pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan dan penataan asset oleh Perangkat Daerah yang belum optimal dan juga kurangnya Kerjasama dan koordinasi yang baik dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Belitung terkait pengelolaan/pengamanan Barang Milik Daerah
2. Belum optimalnya pengawasan kinerja pemerintah daerah dipengaruhi oleh nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang belum optimal
3. Kompetensi aparatur yang masih kurang karena belum optimalnya pengelolaan manajemen aparatur
4. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran di Kabupaten Belitung masih rendah dan diindikasikan adanya potensi terjadinya inefisiensi. Inefisiensi ini dapat terjadi karena tujuan dan sasaran tidak berorientasi hasil, ukuran kinerja tidak jelas (tidak ada keterkaitan antara program dan kegiatan) atau kegiatan tidak sesuai dengan maksud kegiatan.

Upaya-upaya penting yang telah dilakukan dalam tahun 2023 untuk mendukung pencapaian kinerja antara lain:

1. Komitmen pimpinan untuk meraih opini WTP, Indeks Reformasi Birokrasi dan peningkatan nilai SAKIP Kabupaten Belitung
2. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah diarahkan pada pembinaan, peringatan dini dan manajemen resiko penyelenggaraan pemerintahan daerah, meningkatkan kapabilitas Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah, serta penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
3. Adanya penyesuaian kebijakan sesuai dengan kondisi saat ini diantaranya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023, Peraturan Bupati Belitung Nomor 75 Tahun 2021 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 24A Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 dan Peraturan Bupati Belitung Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 26 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023.

4. Pelaksanaan Bimbingan Teknis mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terhadap seluruh Kepala OPD beserta staf perencanaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung dengan melaksanakan Bimbingan Teknis Evaluasi secara daring melalui aplikasi *Zoom Cloud Meeting* yang bekerja sama dengan Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitungdan juga Sosialisasi SAKIP bersama BPKP Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pemerintah Kabupaten Belitung juga berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja dengan berkoordinasi dengan Kementerian PAN RB Republik Indonesia, Inspektorat dan Biro Organiasi Setda Provinsi Kep. Babel

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja tahun 2023 atau untuk memperbaiki kinerja tahun 2023 maka dilakukan:

1. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh perangkat daerah dan instansi pusat terkait perencanaan, pengukuran kinerja, pencapaian kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja
2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung

Rapat Pembahasan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023

Sosiliasasi SAKIP OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung bersama dengan Tim BPKP PErwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023

2.1.3 Nilai Komponen Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja pada Evaluasi SAKIP Kabupaten

Pelaksanaan Evaluasi atas implementasi SAKIP Kabupaten Belitung berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrorasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Ruang lingkup evaluasi meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Kinerja pencapaian SAKIP pada Sekretraiat Daerah Kabupaten Belitung pada komponen pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja. Capaian

kinerja kedua komponen tersebut pada tahun 2023 mencapai 26,41 (pengukuran kinerja sebesar 16,16 dan pelaporan kinerja sebesar 10,25). Perkembangan capaian nilai komponen pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja tahun pada tahun 2021-2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.11
Nilai Komponen Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja Kabupaten Belitung Tahun 2021

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Sub Komponen	Nilai
				2021
1.	Pengukuran Kinerja	25	a. Pemenuhan pengukuran (5%) b. Kualitas pengukuran (12,5%) c. Implementasi pengukuran (7,5%)	12,98
2.	Pelaporan Kinerja	15	a. Pemenuhan pelaporan (3%) b. Kualitas Pelaporan (7,5%) c. Pemanfaatan pelaporan (4,5%)	9,80
	Nilai Hasil Evaluasi	**40**		**22,78**

Sumber: LHE PermenpanRB, Tahun 2021

Nilai Komponen Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja Kabupaten Belitung Tahun 2022 - 2023

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Sub Komponen	Nilai	
				2022	2023
1.	Pengukuran Kinerja	30	a. Keberadaan (6%) b. Kualitas (9%) c. pemanfaatan (15%)	15,26	16,16
2.	Pelaporan Kinerja	15	a. Keberadaan (3%) b. Kualitas (4,5%) c. Pemanfaatan (7,5%)	9,84	10,25
	Nilai Hasil Evaluasi	**45**		**25,10**	**26,41**

Sumber: LHE PermenpanRB, Tahun 2022-2023

Pada data diatas diketahui bahwa capaian nilai komponen pengukuran kinerja dan pelaporan periode 2021-2023 terdapat perbedaan bobot dan sub komponen penilaian. Pada tahun 2021 bobot pengukuran kinerja sebesar 25 dan pelaporan kinerja sebesar 15. Sedangkan evaluasi kinerja pada tahun 2022 dan 2023 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrorasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan bobot pengukuran kinerja sebesar 30 dan pelaporan kinerja sebesar 15.

Capaian kinerja pada tahun 2023 mencapai 26,41 meliputi capaian Pengukuran Kinerja sebesar 16,16% capain ini meningkat sebesar 0,9% dibandingkan tahun 2022. Sedangkan pada komponen pelaporan kinerja mencapai 10,25% dan meningkat sebesar 0,41% dibandingkan tahun 2022.

Perkembangan realisasi Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja pada Evaluasi SAKIP KabupatenTahun 2021-2023 dan perbandingan tahun realisasi tahun 2023 dengan target tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.12
Target dan Capaian Nilai Komponen Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja pada Evaluasi SAKIP Kabupaten Belitung Tahun 2021-2023

Komponen	Target					Realisasi				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Pengukuran Kinerja	-	-	17	18	19	-	-	12.98	15,26	16,16
Pelaporan Kinerja	-	-	11	12	12	-	-	9.80	9,84	10,25
Total			28	30	31	-	-	22.78	25,1	26,41

Capaian nilai komponen pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja berdasarkan hasil evaluasi SAKIP Kabupaten Belitung yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mulai tahun 2021 sampai dengan 2023 menunjukkan peningkatan kinerja. Pada tahun 2023 dengan target 31 tercapai sebesar 26,41 atau 85,19%. Capaian tersebut meningkat sebesar 1,31 poin dibandingkan tahun 2022 dan meningkat 3,63 dibandingkan tahun 2021. Meskipun capaian kinerja meningkat pada tiap tahunnya, tetapi masih terdapat faktor penghambat agar capaian lebih optimal. Faktor penghambat pencapaian kinerja dalam pencapaian kinerja tahun 2023 antara lain:

1. Belum terintegrasinya perencanaan dan penganggaran sampai dengan pelaporan kinerja
2. Belum optimalnya pembinaan kepada Perangkat Daerah
3. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan SAKIP di Kabupaten Belitung, sehingga pengukuran secara berjenjang pada Perangkat Daerah belum optimal yang berpengaruh terhadap capaian atau perkembangan kinerja belum dapat diidentifikasi secara tepat dan cepat.

Upaya-upaya penting yang telah dilakukan dalam tahun 2023 untuk mendukung pencapaian kinerja antara lain:

1. Tersedianya Peraturan Bupati tentang Perjanjian Kinerja sampai dengan eselon IV
2. Penetapan Indikator Kinerja Individu sampai dengan level pelaksana dilaksanakan
3. Penyampaian Laporan Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja tahun 2023 atau untuk memperbaiki kinerja tahun 2023 dilakukan:

1. Pemerintah Kabupaten Belitung berinovasi dengan membangun website *e monev pro* yang salah satu itemnya meliputi e sakip Kabupaten Belitung dengan bekerja sama dengan pengembang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung.
2. Melalui bagian organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung melaksanakan asistensi penyusunan laporan kinerja instansi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung dengan melibatkan inspektorat Kabupaten Belitung.

Website Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Kabupaten Belitung

Website sakip.belitung.go.id

2.2 Sasaran Strategis 1.1 : Meningkatnya Pencapaian sasaran Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesra.

Sasaran strategis merupakan penjabaran dari tujuan yang dicapai melalui tindakan yang akan dilakukan oleh Sekreariat Daerah dalam mencapainya. Terdapat 3 (tiga) sasaran pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2018-2023. Pada sasaran pertama yaitu meningkatnya pencapaian sasaran pembangunan daerah bidang pemerintahan dan kesra terdapat 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah bidang pemerintahan dan kesra.Target dan realisasi kinerja strategis ke-1 tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.13
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Pencapaian Sasaran Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
1	Meningkatnya Pencapaian sasaran Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesra	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah bidang pemerintahan dan kesra	persen	100	83,33	83,33	Belum tercapai

Capaian Kinerja sasaran strategis 1.1 : Meningkatnya pencapaian sasaran pembangunan daerah bidang pemerintahan dan kesra dengan indikator persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah bidang pemerintahan dan kesra pada tahun 2023 terealisasi sebesar 83,33%.

Uraian kinerja atas indikator meningkatnya pencapaian sasaran pembangunan daerah bidang pemerintahan dan kesra sebagai berikut:

2.2.1 Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah bidang pemerintahan dan kesra

Pengukuran indikator kinerja diukur untuk mengetahui tingkat ketercapaian sasaran pembangunan di bidang pembangunan dan kesra dengan membandingkan ketercapaian jumlah indikator sasaran RPJMD yang memenuhi target pada misi ke-1 terhadap jumlah indikator sasaran RPJMD pada misi ke-1. Dalam RPJMD Kabupaten Belitung 2018-2023 terdapat 6 (enam) indikator kinerja yaitu Indeks Pembangunan Manusia, Angka

Kemiskinan, Angka Harapan Hidup, Rata-rata Lama Sekolah, Pengeluaran per kapita dan Status desa "Maju" dengan target kinerja pada tahun 2023 sebesar 100%.

Pada tahun 2023, persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah bidang pemerintahan dan kesra yang terealisasi sebesar 83,33% dari target 100%, dengan ringkasan sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.14
Realisasi Capaian Indikator Persentase Ketercapaian Sasaran Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesra Tahun 2023

No	Uraian	Target	Realisasi
1	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah bidang pemerintahan dan kesra	100%	83,33%

Tabel 3.15
Target dan Realisasi Indikator Sasaran Misi ke-1 RPJMD

No	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja	Satuan	2021		2022		2023	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	persen	72,88	72,57	73.37	73.38	74,21	74,49
		Angka Kemiskinan	persen	5,97	7,15	5.69	6.45	5,41	6,46
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,22	71,1	71.34	71.31	71,47	71,54
3	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,46	8,48	8.51	8.74	8,56	8,98
4	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran per kapita	Rupiah	13.671.000	13.563.000	13.862.000	14.045.000	14.049.000	14.365.000
5	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan	Status desa"Maju"	Desa	25	29	28	37	31	40

Pada tabel diatas ketercapaian sasaran pembangunan daerah bidang pemerintahan dan kesra tahun 2023 sebesar 83,33% dengan target 100%. Capaian kinerja indikator persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah bidang pemerintahan dan kesra tahun 2023 didukung oleh ketercapaian indikator kinerja misi ke-1 RPJMD. Dari 6 (enam) indikator kinerja misi ke-1 RPJMD terdapat 1 (satu) indikator yang belum mencapai target yaitu indikator angka kemiskinan. Meskipun capaian belum mencapai target, namun realisasi kinerja pada keenam indikator meningkat pada setiap tahunnya. Rumusan penghitungan capaian sebagaimana berikut:

$$\frac{\textit{Jumlah indikator sasaran RPJMD yang memenuhi target pada misi ke} - 1}{\textit{Jumlah indikator sasaran RPJMD pada misi ke} - 1} \; x\, 100\%$$

$$\frac{5}{6}\, \mathrm{x}\, 100\% = 83,33\%$$

Perkembangan realisasi persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah bidang pemerintahan dan kesra tahun 2019-2022 dan perbandingan realisasi tahun 2023 dengan target 2023 disajikan pada gambar 3.1 berikut:

Gambar 3.1 Target dan Realisasi Persentase Ketercapaian Sasaran Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesra

Berdasarkan gambar diatas, dapat dilihat capaian kinerja sasaran pembangunan daerah bidang pemerintahan dan kesra disajikan mulai tahun 2021-2023, hal tersebut dikarenakan indikator kinerja tersebut baru ada pada perubahan kedua Rencana Strategis pada tahun 2021. Capaian indikator kinerja persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah bidang pemerintahan dan kesra meningkat pada setipa tahunnya. Pada tahun 2023 terealisasi sebesar 83,33%, capaian ini meningkat sebesar 16,66% dibandingkan tahun 2022. Sedangkan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021, capaian meningkat sebesar 50%.

Faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan dalam mendukung tercapai kinerja adalah:

1. Perumusan rancangan Kerjasama oleh pemrakarsa belum terkoordinasi dengan baik
2. Keterbatasan waktu penyelesaian sengketa yang memerlukan koordinasi dengan lintas sektor antara pihak yang bersengketa
3. Seleksi Beasiswa Penuh dilaksanakan dengan melibatkan pihak sekolah, pihak perguruan tinggi sehingga seleksi berjalan dalam waktu yang lama
4. Penyampaian rancangan produk hukum daerah dari OPD Pemrakarsa melebihi waktu tanggal penyampaian.
5. kurangnya sumber daya manusia (SDM)

Upaya-upaya penting yang telah dilakukan dalam tahun 2023 untuk mendukung pencapaian kinerja antara lain:

1. Tersedia Program kegiatan Pemberian Beasiswa ke Perguruan Tinggi melalui Bagian Kesra Kabupaten Belitung dapat lebih diperbanyak dan lebih beragam terutama untuk fasilitasi siswa siswi yang kurang mampu yang berprestasi sehingga dapat mendorong rata-rata lama sekolah di Kabupaten Belitung.
2. Melalui program Beruah Pemerintah Kabupaten Belitung memberikan bantuan pembangunan, renovasi atau rehabilitasi rumah ibadah di Kabupaten Belitung

3. Koordinasi dengan lintas sektor instansi pusat dan daerah dalam Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
4. Adanya Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Belitung.
5. Adanya Tim Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Belitung.
6. Adanya Keputusan Bupati Belitung Nomor 100.3.4/001/KEP/III/2023 Tentang Kelompok Kerja Harmonisasi Produk Hukum Daerah Kabupaten Belitung pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2023
7. Keputusan Bupati Belitung Nomor: 100.3.4/667/KEP/III/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Belitung Nomor: 100.3.4/045A/KEP/III/2023 tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Belitung pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2023
8. Adanya kerjasama yang baik dengan Organisasi Bantuan Hukum yang terverifikasi dari Kemenkumham di Kabupaten Belitung, sehingga bisa saling bersinergi dalam rangka penangananan dan penyelesaian permasalahan hukum.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja tahun 2023 atau untuk memperbaiki kinerja tahun 2023 melalui:

1. Adanya penambahan jumlah penerima beasiswa bagi siswa berperestasi maupun siswa tidak mampu dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Belitung
2. Bimbingan teknis terkait pertanahan untuk menambah pengetahuan sumber daya manusia (SDM) terkait pertanahan.
3. Optimalisasi pelaksanaan hibah melalui sosialisasi tentang juknis dan juklak pelaksanaan Bantuan Hibah kepada yayasan/Lembaga Penerima bantuan hibah tersebut.
4. membentuk tim koordinasi OPD untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan penataan administrasi pemerintahan

Dalam mendukung ketercapaian kinerja sasaran pembangunan daerah bidang pemerintahan dan kesra, Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung melaksanakan program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Adapun dokumentasi pelaksanaan program sebagai berikut:

Bimtek urusan di bidang pertanahan untuk Aparatur Pemerintah Daerah, Desa dan Perwakilan Masyarakat

koordinasi dan pembahasan revisi kesepakatan batas daerah antara Kabupaten Belitung dengan Kabupaten Belitung Timur

Rapat pembahasan terkait dengan permasalahan tanah/lahan eks. Tambak Udang yang terletak di Desa Sijuk

Pelaksanaan kegiatan lapangan penunjukkan batas-batas bidang tanah yang terletak di Dusun Tanjung Kelayang Desa Keciput

Rapat pembahasan upaya penyelesaian permasalahan tanah/lahan yang terletak di Jalan Kapten Saridin

Rakor Forkopimda Kabupaten Belitung

Rapat TKKSD Kabupaten Belitung

Sosialisasi dan Validasi IKK LPPD

Peninjauan dan pengecekan lokasi administrasi kewilayahan

Penandatangan MOU Pemerintah Kab. Belitung dengan Universitas Muhammadiyah Purwokerto dan Universitas Ibn Khaldun Bogor

Kegiatan Rapat Tim Pembina UKS/M Kabupaten Belitung

Monitoring Dan Evaluasi Sekolah Sehat

monitoring dan evaluasi penerima hibah organisasi keagamaan dan pendidikan agama pemerintah Kabupaten Belitung

Rencana penganggaran Bantuan Hukum untuk kelompok sasaran yang terfokus pada Perempuan, Anak, Disabilitas dan Masyarakat adat

Supervisi pelaporan Aksi HAM B-08 Pemerintah Kabupaten/kota tahun 2023 bersama Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Bangka Belitung

Pembahasan dan penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2024 Usulan Eksekutif

Dalam rangka pencapain kinerja sasaran meningkatnya pencapaian sasaran pembangunan daerah bidang perekonomian dan pembangunan tentunya didukung oleh program strategis yang dijabarkan dalam kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2023. Target, realisasi dan capaian kinerja keuangan dan SDM pada program yang mendukung sasaran pada tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.16
Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Program
Bidang Pemerintahan dan Kesra Tahun 2023

Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan		Rata-rata Capaian Sasprog/ Saskeg	Sasaran Output Kegiatan	Output Kegiatan					Anggaran			SDM			Efisiensi Dana		Efisiensi SDM	
				Indikator Output Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (OH)	Realisasi (OH)	%	Efisien	Tidak Efisien	Efisien	Tidak Efisien
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	**Terselesaikannya Sengketa Tanah Garapan**	**20**	**Tertibnya Administrasi Tanah Garapan**		**Persen**	**100**	**20**	**20**										
		20	Terlaksananya fasilitasi sengketa tanah garapan	Dokumen Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Berita Acara	5	1	20	77.002.900	27.857.198	36,18	1	1					
Jumlah SK-KP 1								20	**77.002.900**	**27.857.198**	36,18							
2	**Terwujudnya Pemerintahan Transparan dan Akuntabel**	**97,22**	**Penyelenggaraan Pemerintah Transparan Dan Akuntabel**		**persen**	**100**	**97,22**	**97,223**			96,16							
		100	Penyelenggaraan penataan administrasi pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Dokumen administrasi tata pemerintahan	dokumen	8	8	100	980.186.741	933.702.134	95,26	7	7	100	√		√	
		100	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	Dokumen kebijakan kesejahteraan rakyat	dokumen	9	9	100	14.590.990.800	14.204.288.349	97,35	8	8	100	√		√	
		91,67	Pelaksanaan koordinasi kebijakan dibidang Hukum	Produk hukum daerah yang terhamonisasi	persen	100	91,67	91,67	426.645.730	244.827.695	57,38	9	9	100				
Jumlah SK-KP 2								97,22	**15.997.823.271**	**15.382.818.178**	**96,16**	24	24					

Pada tabel 3.15 dijabarkan bahwa dalam mencapai sasaran meningkatnya pencapaian sasaran pembangunan daerah bidang pemerintahan dan kesra didukung oleh 2 (dua) Program dengan sasaran:

1. Terselesaikannya Sengketa Tanah Garapan
2. Terwujudnya Pemerintahan Transparan dan Akuntabel

Rata-rata capaian **sasaran program 1** : Terselesaikannya Sengketa Tanah Garapan sebesar 20%, capaian ini belum mencapai dari target yang ditetapkan sebesar 100% dengan didukung dengan dana sebesar Rp. 27.857.198 atau 36,18% dari anggaran sebesar Rp. 77.002.900,- dan indikator output kegiatan (IOK) sebanyak 1 (satu) indikator dari rencana sebanyak 1 (satu) indikator serta OH sebanyak OH 1 atau 100% dari rencana sebanyak 1 OH yang dilaksanakan oleh bagian Pemerintahan.
Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran program belum dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 20%, lebih rendah dari pada capaian penggunaan dana sebesar 36,18%.
Dari sisi penggunaan SDM, realisasi kinerja sasaran program belum dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 20% lebih rendah dari pada capaian penggunaan OH sebesar 100%.

Rata-rata capaian **sasaran program 2** : Terwujudnya Pemerintahan Transparan dan Akuntabel sebesar 97,22%, dan belum mencapai dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Capaian ini didukung dengan dana sebesar Rp. 15.382.818.178 atau 96,16 % dari anggaran sebesar Rp. 15.997.823.271,- dan indikator output kegiatan (IOK) sebanyak 3 (tiga) indikator dari rencana sebanyak 3 (tiga) indikator serta OH sebanyak OH 7 atau 100% dari rencana sebanyak 7 OH.
Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran program belum dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 97,22% dan belum mencapai 100%, walaupun penggunaan dana terealisasi sebesar 96,16%.
Dari sisi penggunaan SDM, realisasi kinerja sasaran program belum dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 97,22% lebih rendah dari pada capaian penggunaan OH sebesar 100%.

Pelaksanaan program yang mendukung sasaran meningkatnya pencapaian sasaran pembangunan daerah bidang pemerintahan dan kesra didukung oleh 3 (tiga) kegiatan dengan sasaran sebagai berikut:

1. Terlaksananya fasilitasi sengketa tanah garapan
2. Penyelenggaraan penataan administrasi pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
3. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti
4. Pelaksanaan Koordinasi Kebijakan Dibidang Hukum

Rata-rata capaian **sasaran kegiatan 1** Terlaksananya fasilitasi sengketa tanah garapan dengan indikator dokumen penyelesaian sengketa tanah garapan terealisasi sebesar 20%. Capaian sasaran kegiatan didukung dengan dana Rp.27.857.198,- atau 36,18% dari anggaran sebesar Rp.77.002.900,- dan dari indikator kinerja output kegiatan (IOK) sebanyak 1 kasus atau 20% dari rencana sebanyak 5 kasus, serta OH sebanyak 1 orang atau 100% dari rencana sebanyak 1 orang.

Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran kegiatan belum tercapai. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 20 % dan belum mencapai 100% walaupun capaian penggunaan dana mencapai sebesar 36,18%.
Dari sisi penggunaan SDM, realisasi kinerja sasaran kegiatan belum tercapai. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 20% dengan capaian penggunaan OH sebesar 100%.

Rata-rata capaian **sasaran kegiatan 2** Penyelenggaraan penataan administrasi pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan indikator dokumen administrasi tata pemerintahan sebesar 100%. Capaian sasaran kegiatan didukung dengan dana Rp.933.702.134,- atau 95,26% dari anggaran sebesar Rp.980.186.741,- dan dari indikator kinerja output kegiatan (IOK) sebanyak 8 Dokumen atau 100% dari rencana sebanyak 8 dokumen, serta OH sebanyak 7 orang atau 100% dari rencana sebanyak 7 orang.
Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran kegiatan telah dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 100 % lebih besar dari pada capaian penggunaan dana sebesar 95,26%.
Dari sisi penggunaan SDM, realisasi kinerja sasaran kegiatan belum tercapai. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 100% sama dengan capaian penggunaan OH sebesar 100%.

Rata-rata capaian **sasaran kegiatan 3** Pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti dengan indikator Dokumen kebijakan kesejahteraan rakyat sebesar 100%. Capaian sasaran kegiatan didukung dengan dana Rp.14.204.288.349,- atau 97,35% dari anggaran sebesar Rp.14.590.990.800,- dan dari indikator kinerja output kegiatan (IOK) sebanyak 9 Dokumen atau 100% dari rencana sebanyak 9 dokumen, serta OH sebanyak 8 orang atau 100% dari rencana sebanyak 8 orang.
Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran kegiatan telah dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 100 % lebih besar dari pada capaian penggunaan dana sebesar 97,35%.
Dari sisi penggunaan SDM, realisasi kinerja sasaran kegiatan telah dicapai secara secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 100% sama dengan capaian penggunaan OH sebesar 100%.

Rata-rata capaian **sasaran kegiatan 4** Pelaksanaan koordinasi kebijakan dibidang hukum dengan indikator Produk hukum daerah yang terhamonisasi sebesar 91,67%. Capaian sasaran kegiatan didukung dengan dana RP.244.827.695,- atau 57,38% dari anggaran sebesar Rp.426.645.730,- dan dari indikator kinerja output kegiatan (IOK) sebesar 100% dari rencana sebesar 91,67%, serta OH sebanyak 9 orang atau 100% dari rencana sebanyak 9 orang.
Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran kegiatan belum tercapai. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 91,67 % dan belum mencapai 100% walaupun realisasi penggunaan dana sebesar 57,38%.
Dari sisi penggunaan SDM, realisasi kinerja sasaran kegiatan telah dicapai secara secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 91,67% dengan capaian penggunaan OH sebesar 100%.

2.3 Sasaran Strategis 1.2: Meningkatnya Pencapaian sasaran Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan

Sasaran kedua yaitu meningkatnya pencapaian sasaran pembangunan daerah bidang perekonomian dan pembangunan terdapat 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah bidang perekonomian dan pembangunan. Target dan realisasi kinerja strategis ke-2 tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.17
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya Pencapaian Sasaran Pembangunan Daerah
Bidang Perekonomian dan Pembangunan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
1	Meningkatnya Pencapaian sasaran Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah bidang Perekonomian dan Pembangunan	persen	100	66,67	66,67	Belum tercapai

Capain sasaran strategis 1.2: Meningkatnya Pencapaian sasaran Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan dengan indikator persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah bidang perekonomian dan pembangunan tahun 2023 belum tersedia

Uraian kinerja atas indikator meningkatnya pencapaian sasaran pembangunan daerah bidang perekonomian dan pembangunan sebagai berikut:

2.3.1 Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah bidang perekonomian dan pembangunan

Pengukuran indikator kinerja diukur untuk mengetahui tingkat ketercapaian sasaran pembangunan di bidang perekonomian dan pembangunan dengan membandingkan ketercapaian jumlah indikator sasaran RPJMD yang memenuhi target pada misi ke-3 terhadap jumlah indikator sasaran RPJMD pada misi ke-3. Dalam RPJMD Kabupaten Belitung 2018-2023 terdapat 9 (sembilan) indikator kinerja yaitu Laju Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah kunjungan Wisatawan (domestik dan mancanegara), Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan terhadap PDRB, Nilai Omset Koperasi, Nilai Omset Usaha Mikro, Nilai investasi, Persentase pemenuhan infrastruktur kewilayahan, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persentase Cakupan Pelayanan Persampahan, dengan target kinerja pada tahun 2023 sebesar 100%.

Pada tahun 2023, persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah bidang perekonomian dan pembangunan realisasinya tercapai 66,67%, dengan ringkasan sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.18
Realisasi Capaian Indikator Persentase Ketercapaian Sasaran Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Tahun 2023

No	Uraian	Target	Realisasi
1	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah bidang perekonomian dan pembangunan	100%	66,67%

Tabel 3.19
Target dan Realisasi Indikator Sasaran Misi ke-3 RPJMD

No	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja	Satuan	2021		2022		2023	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	3,2-3,6	5,64	4,0-4,4	5,71	4,4-5,14	5,75
2	Meningkat nya pengembangan pariwisata	Jumlah kunjungan Wisatawan (domestik dan mancanegara)	Orang	150.000	184.570	250.00	301.906	400.000	301.870
3	Meningkatnya produksi pertanian dan perikanan	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan terhadap PDRB	Persen	27,83	28,17	27,83	26,82	27,83	26,56
4	Meningkatnya pengembangan koperasi dan usaha mikro	Nilai Omset Koperasi (dalam ribu)	Rupiah	80.651.293	93.098.521	83.070.832	94.183.859	85.562.956	96.586.234
		Nilai Omset Usaha Mikro (dalam ribu)	Rupiah	1.479.811.375	1.533.059.179	1.701.783.081	1.699.874.043	1.957.050.000	1.966.800.000
5	Meningkatnya investasi	Nilai investasi (dalam juta)	Rupiah	2.519.187	2.693.167,25	3.507.975	3.707.410,25	5.023.529	4.799.309,25
6	Meningkatnya infrastruktur kewilayahan	Persentase pemenuhan infrastruktur kewilayahan	Persen	54,35	57,17	57,96	58,85	59,94	64,90
7	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		67,86	68,09	68,37	69,25	68,88	68,90
8	Meningkatnya pengelolaan sampah	Persentase Cakupan Pelayanan Persampahan	Persen	15,50	16,73	15,75	16,81	16	16,93

Capaian sasaran strategis meningkatnya pencapaian sasaran pembangunan daerah bidang perekonomian dan pembangunan dengan indikator persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah bidang perekonomian dan pembangunan tahun 2023 tercapai 66,67%,. Dilihat dari realisasi kinerja dari 9 (sembilan) indikator yang mendukung misi ke-3 RPJMD, terdapat 3 (tiga) indikator yang belum mencapai target yaitu Jumlah kunjungan Wisatawan (domestik dan mancanegara), Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan terhadap PDRB dan Nilai investasi. Capaian kinerja pada tahun 2022 terealisasi sebesar 77,78%. Terdapat 7 (tujuh) indikator kinerja yang telah mencapai target dan 2 (dua) indikator yang belum mencapai target yaitu Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan terhadap PDRB dan Nilai Omset Usaha Mikro. Sedangkan realiasai kinerja pada tahun 2021 tercapai 100%.

Rumusan penghitungan capaian kinerja persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah bidang perekonomian dan pembangunan sebagai berikut:

$$\frac{Jumlah\ indikator\ sasaran\ RPJMD\ yang\ memenuhi\ target\ pada\ misi\ ke-3}{Jumlah\ indikator\ sasaran\ RPJMD\ pada\ misi\ ke-3}\ x\ 100\%$$

$$\frac{6}{9}\ x100\% = 66{,}67\%$$

Perkembangan realisasi persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah bidang perekonomian dan pembangunan tahun 2019-2023 dan perbandingan realisasi tahun 2023 dengan target 2023 disajikan pada gambar 3.2 berikut:

Gambar 3.2 Target dan Realisasi Persentase Ketercapaian Sasaran Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan

pada gambar diatas, dapat dilihat capaian kinerja sasaran pembangunan daerah bidang perekonomian dan pembangunan disajikan mulai tahun 2021-2023, hal tersebut dikarenakan indikator kinerja tersebut baru ada pada perubahan kedua Rencana Strategis pada tahun 2021. Capaian pada tahun 2023 tercapai sebesar 66,67% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Sedangkan capaian pada tahun 2022 mencapai 77,78% dan menurun 22,22% dibandingkan tahun 2021. Menurunnya capaian kinerja sasaran dikarenakan terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang mendukung misi ke-3 RPJMD belum mencapai target yang ditetapkan.

Faktor penghambat pelaksanaan kegiatan dalam mendukung tercapai kinerja adalah:

1. Kurangnya koordinasi antar OPD terutama dalam pelaporan kegiatan pengendalian inflasi
2. Data CSR perusahaan dan data pembanguan yang memerlukan CSR belum sinkron
3. Laporan pelaksanaan operasional dan keuangan BUMD sering terlambat
4. Kurangnya koordinasi dengan provinsi terkait data kelautan dan perikanan.
5. Kurangnya produk UMKM masuk dalam e-katalog lokal Kabupaten Belitung

6. Advokasi pengadaan barang dan jasa belum optimal

Upaya-upaya penting yang telah dilakukan dalam tahun 2023 untuk mendukung pencapaian kinerja antara lain:

1. Adanya kerjasama dengan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Belitung dengan melaksanakan pelatiha-pelatihan kerja yang dibutuhkan oleh masyarakat
2. Melaksanakan kerjasama dengan provinsi dalam penerbitan sertifikat halal bagi produk-produk UMKM
3. Melakukan operasi pasar dan gerakan pasar murah bekerjasama dengan Bappenas, BI KPw Bangka Belitung, Disperindag Provinsi, Bulog dan distributor bahan pokok di Kabupaten Belitung.
4. Adanya koordinasi yang baik dengan BUMD
5. Ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2023 tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan yang merupakan pedoman untuk memberikan arahan pelaksanaan program TJSLP dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan
6. Penyaluran gas LPG melalui Serasa (Saluran Elpiji Rakyat Melalui Desa) sehingga lebih tepat sasaran
7. TPID melakukan monitoring dan sidak pasar bekerjasama dengan forkopimdan dan APH dalam rangka pengendalian inflasi
8. Adanya Kerjasama dengan APH terkait pendampingan hukum pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Belitung
9. Terbentuknya tim clearing house Kabupaten Belitung
10. Mendorong serta mendampingi UMKM untuk memasukan produknya kedalam e-katalog lokal Kabupaten Belitung

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja tahun 2023 atau untuk memperbaiki kinerja tahun 2023 akan dilakukan:

1. Pelaksanaan Bazar-bazar yang menampilkan UMKM lokal
2. Mengoptimalkan peran PLUT sebagai wadah konsultasi bagi UMKM
3. Optimalisasi kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah guna mengendalikan inflasi di Kabupaten Belitung bekerjasama dengan APH dan forkopimda.
4. Mendorong produk UMKM agar masuk ke dalam e-katalog lokal Kabupaten Belitung
5. Jadwal pendampingan hukum terkait pelaksanaan pembangunan dilakukan pada awal tahun agar pelaksanaan kegiatan lebih optimal.
6. Mengoptimalkan kinerja tim clearing house Kabupaten Belitung
7. Melakukan sosialisasi, pelatihan, worshop dan pendampingan pada OPD dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
8. Peningkatan belanja PDN dalam pengadaan barang dan jasa

Dalam mendukung ketercapaian kinerja sasaran pembangunan daerah bidang perekonomian dan pembangunan, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung melaksanakan program perekonomian dan pembangunan. Adapun dokumentasi pelaksanaan program sebagai berikut:

Monitoring ke BUP. PT. Pelabuhan tanjong batu belitongBelitung

Rapat Evaluasi Kinerja BUMD Perumda Air Minum Tirta Batu Mentas

Monitoring dan Evaluasi Budi Daya Ikan Kerapu Keramba Apung di Desa Selat Nasik

Rapat Pengendalian Inflasi Kabupaten Belitung

Rapat Persiapan Rakor Pengendalian Inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Kabupaten Belitung

Monitoring penyaluran Gas LPG 3KG di Desa Padang Kandis

Monitoring Ketersediaan dan Harga Bahan Pokok

Monitoring Kegiatan Pasar Murah bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Monitoring Penyerahan Bantuan Dana CSR PT. PEGADAIAN

Monitoring Evaluasi Realisasi Fisik dan Anggaran Ke OPD, Kecamatan dan SMPN di Kabupaten Belitung

Monitoring Lapangan Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Pembahasan Penayangan Produk pada E-Katalog Lokal Kabupaten Belitung

Integrasi SiRUP dan SIPD RI TA 2024

Pelatihan E-Purchasing pada E-Katalog Lokal Kab. Belitung

Dalam rangka pencapain kinerja sasaran meningkatnya pencapaian sasaran pembangunan daerah bidang perekonomian dan pembangunan tentunya didukung oleh program strategis yang dijabarkan dalam kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2023. Target, realisasi dan capaian kinerja keuangan dan SDM pada program yang mendukung sasaran pada tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.20
Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Program
Bidang Perekonomian dan Pembangunan Tahun 2023

Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan		Rata-rata Capaian Sasprog/ Saskeg	Sasaran Output Kegiatan	Output Kegiatan					Anggaran			SDM			Efisiensi Dana		Efisiensi SDM	
				Indikator Output Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (OH)	Realisasi (OH)	%	Efisien	Tidak Efisien	Efisien	Tidak Efisien
3	**Terkendalinya Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Belitung**	**100**	**Meningkatnya Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Belitung**		**persen**	**100**	**100**	**100**										
		100	Terkendalinya Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Laporan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	dokumen	11	11	100	134.081.284	85.387.003	63,68	3	3	100	√		√	
		100	Administrasi Pembangunan sesuai dengan aturan yang berlaku	Dokumen Administrasi Pembangunan	laporan	13	13	100	668.230.775	585.763.762	87,66	6	6	100	√		√	
		100	Terlaksananya pengelolaan pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan ketentuan	Dokumen pengelolaan pengadaan barang dan jasa	dokumen	3	3	100	2.336.994.264	1.994.878.968	85,36	17	17	100	√		√	
		100	Terkendalinya Pelaksanaan Kebijakan Sumber Daya Alam	Dokumen Hasil Kebijkan Sumber Daya Alam	dokumen	2	2	100	109.109.020	88.724.515	81,32	1	1	100	√		√	
Jumlah SK-KP 3								**100**	**3.248.415.343**	**2.754.754.248**	**84,80**	27	27	100				

Pada tabel 3.19 diuraikan bahwa dalam mencapai sasaran meningkatnya pencapaian sasaran pembangunan daerah bidang administrasi perekonomian dan pembangunan didukung oleh satu program yaitu program perekonomian dan pembangunan dengan sasaran Terkendalinya Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Belitung. Rata-rata capaian sasaran program tahun 2023 sebesar 100% dengan didukung dana sebesar Rp.2.754.754.248 atau 84,80% dari anggaran sebesar Rp.3.248.415.343,- dan indikator output kegiatan (IOK) sebanyak 4 (empat) indikator dari rencana sebanyak 4 (empat) indikator serta OH sebanyak OH 28 atau 100% dari rencana sebanyak 28 OH terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu bagian perekonomian dan SDA, bagian administrasi pembangunan dan bagian pengadaan barang dan jasa.
Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran program telah dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 100%, lebih besar dari pada capaian penggunaan dana sebesar 84,80%.
Dari sisi penggunaan SDM, realisasi kinerja sasaran program telah dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 100% sama dengan capaian penggunaan OH sebesar 100%

Pelaksanaan program yang mendukung sasaran meningkatnya Pencapaian sasaran Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan didukung oleh 4 (empat) kegiatan dengan sasaran sebagai berikut:

1. Terkendalinya Kebijakan Pelaksanaan Perekonomian
2. Administrasi Pembangunan Sesuai Dengan Aturan yang Berlaku
3. Terlaksananya pengelolaan pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan ketentuan
4. Terkendalinya Pelaksanaan Kebijakan Sumber Daya Alam

Rata-rata capaian **sasaran kegiatan 1** terkendalinya kebijakan pelaksanaan perekonomian dengan indikator laporan pelaksanaan kebijakan perekonomian sebesar 100%. Capaian sasaran kegiatan didukung dengan dana Rp.85.387.003,- atau 63,68% dari anggaran sebesar Rp.134.081.284,- dan dari indikator kinerja output kegiatan (IOK) sebanyak 11 Dokumen atau 100% dari rencana sebanyak 11 dokumen, serta OH sebanyak 3 orang atau 100% dari rencana sebanyak 3 orang.
Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran kegiatan telah dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 100 % lebih besar dari pada capaian penggunaan dana sebesar 63,68%.
Dari sisi penggunaan SDM, realisasi kinerja sasaran kegiatan telah dicapai secara secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 100% sama dengan capaian penggunaan OH sebesar 100%.

Rata-rata capaian **sasaran kegiatan 2** administrasi pembangunan sesuai dengan aturan yang berlaku dengan indikator dokumen administrasi pembangunan terealisasi sebesar 100%. Capaian sasaran kegiatan didukung dengan dana Rp.585.763.762,- atau 87,66% dari anggaran sebesar Rp.668.230775,- dan dari indikator kinerja output kegiatan (IOK) sebanyak 13 Dokumen atau 100% dari rencana sebanyak 13 dokumen, serta OH sebanyak 6 orang atau 100% dari rencana sebanyak 6 orang.
Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran kegiatan telah dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 100 % lebih besar dari pada capaian penggunaan dana sebesar 87,66%.

Dari sisi penggunaan SDM, realisasi kinerja sasaran kegiatan telah dicapai secara secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 100% sama dengan capaian penggunaan OH sebesar 100%.

Rata-rata capaian **sasaran kegiatan 3** terlaksananya pengelolaan pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan ketentuan dengan indikator dokumen pengelolaan pengadaan barang dan jasa dengan realisasi indikator sebesar 100%. Capaian sasaran kegiatan didukung dengan dana Rp.1.994.878.968,- atau 85,36% dari anggaran sebesar Rp.2.336.994.264,- dan dari indikator kinerja output kegiatan (IOK) sebanyak 3 dokumen atau 100% dari rencana sebanyak 3 dokumen, serta OH sebanyak 17 orang atau 100% dari rencana sebanyak 17 orang.
Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran kegiatan telah dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 100 % lebih besar dari pada capaian penggunaan dana sebesar 85,36%.
Dari sisi penggunaan SDM, realisasi kinerja sasaran kegiatan telah dicapai secara secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 100% sama dengan capaian penggunaan OH sebesar 100%.

Rata-rata capaian **sasaran kegiatan 4** terkendalinya pelaksanaan kebijakan sumber daya alam dengan indikator dokumen hasil kebijakan Sumber Daya Alam terealisasi sebesar 100%. Capaian sasaran kegiatan didukung dengan dana Rp.88.724.515,- atau 81,32% dari anggaran sebesar Rp.109.109.020,- dan dari indikator kinerja output kegiatan (IOK) sebanyak 2 Dokumen atau 100% dari rencana sebanyak 2 dokumen, serta OH sebanyak 1 orang atau 100% dari rencana sebanyak 1 orang.
Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran kegiatan telah dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 100 % lebih besar dari pada capaian penggunaan dana sebesar 81,32%.
Dari sisi penggunaan SDM, realisasi kinerja sasaran kegiatan telah dicapai secara secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 100% sama dengan capaian penggunaan OH sebesar 100%.

2.4 Sasaran Strategis 1.3 : Meningkatnya Pencapaian sasaran Pembangunan Daerah Bidang Administrasi Umum

Sasaran ketiga yaitu meningkatnya pencapaian sasaran pembangunan daerah bidang administrasi umum terdapat 2 (dua) indikator kinerja yaitu persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah administrasi umum dan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).Target dan realisasi kinerja sasaran strategis ke-3 tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.21
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya Pencapaian Sasaran Pembangunan Daerah
Bidang Administrasi Umum

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
1	Meningkatnya Pencapaian sasaran Pembangunan Daerah Bidang Administrasi Umum	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah bidang Administrasi Umum	persen	100	n/a	-	Belum tersedia
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)		3,61	3,73	103,3	melampaui

Capaian Kinerja sasaran strategis 1.3 : Meningkatnya pencapaian sasaran pembangunan daerah bidang administrasi umum tahun 2023 dengan capaian indikator persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah bidang administrasi umum belum tersedia realisasinya dan capaian kinerja Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) tercapai sebesar 103,3%.

Uraian kinerja atas 2 (dua) indikator meningkatnya pencapaian sasaran pembangunan daerah bidang administrasi umum sebagai berikut:

2.4.1 Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah bidang administrasi umum

Pengukuran indikator kinerja diukur untuk mengetahui tingkat ketercapaian sasaran pembangunan di bidang administrasi umum dengan membandingkan ketercapaian jumlah indikator sasaran RPJMD yang memenuhi target pada misi ke-2 terhadap jumlah indikator sasaran RPJMD pada misi ke-2. Jumlah indikator kinerja pada misi-2 RPJMD Kabupaten Belitung terdiri. Pada RPJMD Kabupaten Belitung terdapat 4 (empat) indikator kinerja yaitu Indeks Reformasi Birokrasi, Opini BPK, Nilai SAKIP Kabupaten Belitung dan Indeks Profesionalitas ASN dengan target kinerja pada tahun 2023 sebesar 100%.

Pada tahun 2023, persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah bidang administrasi umum belum tersedia datanya dikarenakan terdapat indikator kinerja yang realisasinya menunggu rilis dari Badan Kepegawaian Negara dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, dengan ringkasan sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.22
Realisasi Capaian Indikator Persentase Ketercapaian Sasaran Pembangunan Daerah Bidang Administrasi Umum Tahun 2023

No	Uraian	Target	Realisasi
1	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah bidang administrasi umum	100%	Belum tersedia

Tabel 3.23
Target dan Realisasi Indikator Sasaran RPJMD Misi ke-2

No	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja	Satuan	2021		2022		2023	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Terwujudnya pelayanan birokrasi yg bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan	Indeks Reformasi Birokrasi		B	CC	BB	CC	BB	BB
2	Terciptanya Birokrasi yang Bersih, Transparan dan Akuntabel	Opini BPK		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	n/a
		Nilai SAKIP Kabupaten Belitung		BB	B	BB	B	BB	B
3	Terciptanya Birokrasi yang Inovatif dan Profesional	Indeks Profesionalitas ASN	Persen	75	59,44	75	71,56	76	n/a
4	Birokrasi yang mengedepankan pelayanan masyarakat yang berkualitas	Survey Kepuasan Masyarakat	Persen	85	84,8	87	86,88	88	88,28

Dari penjabaran tabel di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2023 dari 5 (lima) indikator kinerja yang mendukung misi ke-2 RPJMD, terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang telah mencapai target yaitu Indeks Reformasi Birokrasi tercapai kategori "BB" dan S urvey Kepuasan Masyarakat terealisasi sebesar 88,28%. Pada indikator Nilai SAKIP Kabupaten Belitung tercapai 63,52 dengan kategori "B" dan belum mencapai target "BB". Namun secara kuantitatif capaian kinerja meningkat dibandingkan capaian tahun 2022 dengan terealisasi sebesar 60,98. Capaian indikator kinerja Opini BPK pada tahun 2021 dan 2022 telah mencapai terget yaitu WTP, sedangkan capaian tahun 2023 belum dapat diukur dikarenakan masih menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan. Pada capaian kinerja Indeks Profesionalitas ASN, walaupun belum mencapai target namun realisasi tahun 2022 dengan realisasi 71,56% meningkat sebesar 12,12% dibandingkan tahun 2021 dengan realisasi 59,44%, sedangkan capaian kinerja tahun 2023 belum tersedia dikarenakan masih menunggu hasil evaluasi dari Badan Kepegawaian Negara.

Rumusan penghitungan capaian kinerja persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah bidang administrasi umum sebagai berikut:

$$\frac{Jumlah\ indikator\ sasaran\ RPJMD\ yang\ memenuhi\ target\ pada\ misi\ ke-2}{Jumlah\ indikator\ sasaran\ RPJMD\ pada\ misi\ ke-2} x100\%$$

Perkembangan realisasi persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah bidang administrasi umum tahun 2019-2023 dan perbandingan realisasi tahun 2023 dengan target 2023 disajikan pada gambar 3.3 berikut:

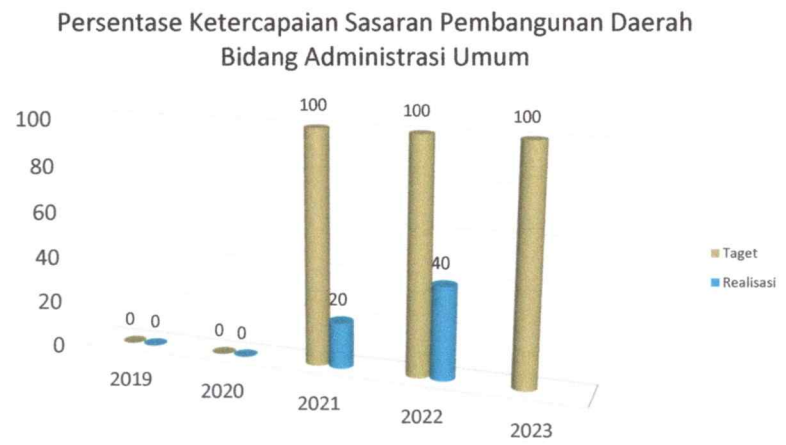

Gambar 3.3 Target dan Realisasi Persentase Ketercapaian Sasaran Pembangunan Daerah Bidang Administrasi umum

Pada gambar di atas dapat dilihat capaian indikator persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah bidang administrasi umum disajikan mulai tahun 2021-2023, hal tersebut dikarenakan indikator kinerja tersebut baru ada pada perubahan kedua Rencana Strategis pada tahun 2021. Capaian kinerja tahun 2022 sebesar 40%, meningkat sebesar 20% dibandingkan tahun 2021 dengan realisasi 20%. Sedangkan capaian kinerja tahun 2023 belum tersedia realisasinya dikarenakan masih menunggu rilis dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Kepegawaian Negara.

Faktor penghambat pelaksanaan kegiatan dalam mendukung tercapainya kinerja sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pengawasan kinerja pemerintah daerah dipengaruhi oleh nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang belum optimal
2. Kompetensi aparatur yang masih kurang karena belum optimalnya pengelolaan sistem manajemen aparatur
3. Kurangnya kesadaran dan komitmen bersama diantara seluruh elemen pemerintahan, karena reformasi birokrasi merupakan tanggungjawab Bersama segenap elemen pemerintahan

Upaya-upaya penting yang telah dilakukan dalam tahun 2023 untuk mendukung pencapaian kinerja antara lain:

1. Adanya komitmen pimpinan terkait pelaksanaan manajemen kinerja mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pembinaan kinerja, penilaian kinerja dan tindak lajut.
2. Menjadikan informasi dalam laporan kinerja sebagai umpan balik dalam perbaikan perencanaan
3. Tersedianya *e monev pro* yang salah satu itemnya meliputi e sakip Kabupaten Belitung dengan bekerja sama dengan pengembang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung.

4. Dalam meningkatkan profesionalitas ASN telah disediakan anggaran untuk pelaksanaan bimtek/diklat maupun untuk menempuh jenjang Pendidikan yang lebih tinggi bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung
5. Adanya Peraturan Bupati Belitung Nomor 50 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2023-2024.
6. Komitmen melaksanakan Reformasi Birokrasi ditunjukkan dengan ditetapkannya keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Nomor 188.45/001/VIII/2023 tentang tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2023
7. Adanya pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dipilah secara tematik diharapkan mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara lebih fokus

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja tahun 2023 atau untuk memperbaiki kinerja tahun 2023 akan dilakukan:

1. Membangun budaya kerja ASN BerAKHLAK di Kabupaten Belitung sebagai bentuk penguatan reformasi birokrasi
2. Melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga pengampu dalam rangka meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Belitung
3. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah terkait evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik
4. Meningkatkan kualitas SDM melalui diklat/bimtek untuk meningkatkan kompetensi pegawai.

Dalam mendukung ketercapaian kinerja sasaran pembangunan daerah bidang administrasi umum, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung melaksanakan program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota. Adapun dokumentasi pelaksanaan program sebagai berikut:

Asistensi Penyusunan Road Map RB di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepaulauan Babel Bersama KemenPANRB

Sosialisasi SAKIP OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Bersama dengan Tim BPKP Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

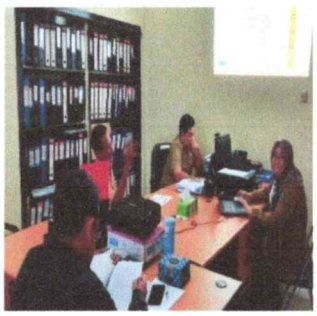

Asistensi penyusunan Laporan Kinerja Bersama OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung

Rapat Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2023

Rapat Pimpinan Bupati Belitung dengan OPD dalam rangka evaluasi kinerja triwulanan

2.4.2 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Indikator kinerja Survey Kepuasan Masyarakat dilakukan untuk mengetahui gambaran kepuasan pengguna layanan terhadap kualitas penyelenggaraan pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung, serta mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam memberikan pelayanan publik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Publik terdapat 9 unsur penilaian pelayanan meliputi persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, waktu, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan serta sarana dan prasarana. Hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat berupa angka dari skala (nilai interval) 1-4 yang kemudian dikonversikan dalam rentang 25-100 (nilai dasar 25). Rumusan pengukuran survey kepuasan masyarakat sebagai berikut:

$$SKM = \frac{Total\ dari\ nilai\ persepsi\ per\ unsur}{Total\ unsur\ yang\ terisi}\ x\ Nilai\ Penimbang$$

Tabel 3.24
Nilai Persepsi, NIlai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayan dan Kinerja Unit Organisasi

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (x)	Kinerja Unit Pelayanan (y)
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 -3,532	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat Baik

Sumber: Permenpan dan RB Nomor 14 Tahun 2017

Target kinerja tahun 2023 sebesar 3,61 terealisasi sebesar 3,73 atau 103%, dengan ringkasan sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.25
Realisasi Capaian Indikator Persentase Ketercapaian Sasaran Pembangunan Daerah Administrasi Umum Tahun 2023

No	Uraian	Target	Realisasi
1	Survey Kepuasan Masyarakat	3,61	3,73

Tabel 3.26
Perbandingan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah Tahun 2021-2023

No	Unsur Pelayanan	2021		2022		2023	
		Nilai Unsur Pelayanan	Kualitas Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Kualitas Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Kualitas Pelayanan
1	Persyaratan Pelayanan	3,534	Sangat Baik	3,724	Sangat Baik	3,695	Sangat Baik
2	Prosedur Pelayanan	3,541	Sangat Baik	3,644	Sangat Baik	3,727	Sangat Baik
3	Waktu Pelayanan	3,519	Baik	3,605	Sangat Baik	3,633	Sangat Baik
4	Biaya/Tarif Pelayanan	3,993	Sangat Baik	3,766	Sangat Baik	3,897	Sangat Baik
5	Produk Spesifikasi Jenis Layanan	3,534	Sangat Baik	3,724	Sangat Baik	3,688	Sangat Baik
6	Kompetensi Pelaksana	3,537	Sangat Baik	3,705	Sangat Baik	3,731	Sangat Baik
7	Perilaku Pelaksana	3,534	Sangat Baik	3,720	Sangat Baik	3,703	Sangat Baik
8	Sarana dan Prasarana	3,556	Sangat Baik	3,697	Sangat Baik	3,667	Sangat Baik
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan	3,698	Sangat Baik	3,897	Sangat Baik	3,887	Sangat Baik
Nilai SKM		3.60		3.72		3,73	
Nilai Konversi SKM Sekretariat Daerah		90,09		92,21		93,32	
Mutu Pelayanan		A		A		A	
Kinerja Unit Pelayanan		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik	

Sumber:Laporan SKM Sekretariat Daerah, Tahun 2021-2023

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung tahun 2023 mencapai 3.73 dengan target 3,61 atau terealisasi sebesar 103% dengan kategori "SANGAT BAIK". Pada 9 (sembilan) unsur pelayanan yang mendapatkan nilai terendah yaitu unsur waktu pelayanan dengan nilai 3,633, namun jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya unsur pelayanan ini meningkat sebesar 0,028 poin dari tahun 2022 dan meningkat 0,114 poin dibandingkan tahun 2021. Sedangkan unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu unsur biaya/tarif mendapatkan nilai 3,897, hal tersebut dikarenakan setiap pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung dalam menjalankan tugas dan fungsinya bersifat gratis bagi masyarakat Kabupaten Belitung. Selain itu unsur dengan nilai tertinggi yang lain adalah pada unsur penanganan pengaduan dengan nilai 3,887 dan unsur kompetensi pelaksanan dengan nilai 3,731. Sehingga dengan nilai yang sudah sangat baik maka ditahun-tahun mendatang berupaya mempertahankan kinerja semua unsur dan meningkatkan pelayanan dimasa mendatang.

Perkembangan realisasi Nilai Survey Kepuasan Masyarakat tahun 2020-2023 dan perbandingan realisasi tahun 2023 dengan target 2023 disajikan dalam gambar 3.4 berikut:

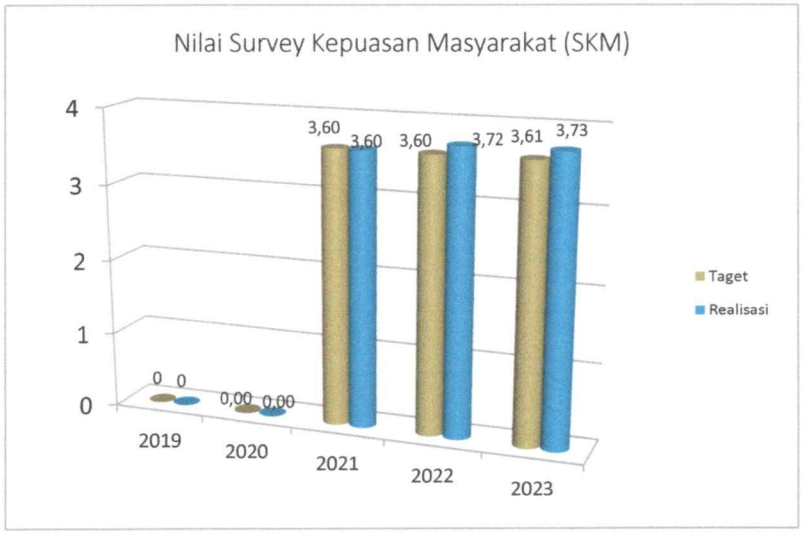

Gambar 3.4 Target dan Realisasi Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung

Berdasarkan gambar 3.4 capaian kinerja SKM yang berdasarkan nilai interval baru muncul pada perubahan kedua renstra sedangkan pada tahun 2019 dan 2020 diukur dengan mengkonversi nilai SKM sehingga capaiannya tidak dapat dipersandingkan. Capaian SKM tahun 2023 tercapai 3,73 dan melampaui target sebesar 3,61. Dibandingkan dengan capaian tahun 2022 meningkat sebesar 0,01 dan meningkat 0,13 dibandingkan dengan tahun 2021. Capaian semua unsur layanan termasuk dalam kategori mutu "A" dengan kinerja sangat baik. Hal ini dapat diartikan bahwa layanan yang diberikan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dinilai sangat baik oleh pengguna layanan. Capaian kinerja ini menjadi evaluasi terhadap pelayanan yang dilaksanakan selama tahun 2023. Namun, di dalam pelaksanaan kegiatan survey kepuasan masyarakat masih menemui hambatan. Faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan dalam mendukung ketercapaian kinerja sebagai berikut:

1. Belum tersedianya petugas khusus yang melayani pengisian kuesioner
2. Penginputan data secara online melalui halaman web belum terlaksana dengan optimal oleh responden
3. Keterbatasan/kurangnya peralatan elektronik dan jaringan internet bagi responden pada waktu pengisian kuesioner

Upaya-upaya penting yang telah dilakukan dalam tahun 2023 untuk mendukung pencapaian kinerja antara lain:

1. Adanya kemudahan persyaratan pelayanan
2. Pelayanan yang diberikan bersifat gratis
3. Tersedianya pengisian SKM melalui https://skm.belitung.go.id
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi mengenai pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat ke OPD/UPP
5. Ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Nomor: 188.45/001/VIII/2023 tentang Penetapan Standar Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2023

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja tahun 2023 atau untuk memperbaiki kinerja tahun 2023 akan dilakukan:

1. Memberikan kemudahan dalam pemberikan pelayanan
2. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung layanan
3. Komitem pegawai dalam memberikan pelayanan secara optimal
4. Diupayakan tersedia petugas khusus yang melayani pengisian kuesioner

Dalam mendukung ketercapaian kinerja sasaran pembangunan daerah bidang administrasi umum, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung melaksanakan program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota. Adapun dokumentasi pelaksanaan program sebagai berikut:

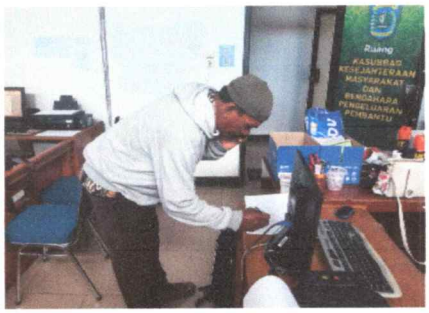

Pelayanan terkait penerima bantuan pemuka agama dari suak gual

Monitoring pelaksanaan SKM

Helpdesk LPSE memberikan pelayanan terkait cara pendaftaran akun SPSE kepada pelaku usaha bidang perhotelan

Konsultasi pelaku usaha terkait penanganan produk e-catalog di LPSE

Dalam rangka pencapain kinerja sasaran meningkatnya pencapaian sasaran pembangunan daerah bidang administrasi didukung oleh program strategis yang dijabarkan dalam kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2023. Target, realisasi dan capaian kinerja keuangan dan SDM pada program yang mendukung sasaran pembangunan daerah bidang administrasi umum pada tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.27
Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Program
Bidang Administrasi Umum Tahun 2023

Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan		Rata-rata Capaian Sasprog/ Saskeg	Sasaran Output Kegiatan	Output Kegiatan					Anggaran			SDM			Efisiensi Dana		Efisiensi SDM	
				Indikator Output Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (OH)	Realisasi (OH)	%	Efisien	Tidak Efisien	Efisien	Tidak Efisien
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	**Terwujudnya Pelayanan Administrasi Pemerinta-han Daerah yang Efektif dan Efisien**	**98,36**	**Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan**		**persen**	**100**	**100**	**100**										
			Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah		**persen**	**75**	**73,59**	**98,12**										
			Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Daerah		**persen**	**100**	**100**	**100**										
			Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur		**persen**	**100**	**100**	**100**										
			Persentase Pelayanan Administrasi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah		**persen**	**100**	**100**	**100**										
		100	Terselenggara-nya proses Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	Dokumen Hasil Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	10	10	100	84.277.645	72.578.370	86,12	2	2	100	√		√	
		100	Terselenggara-nya Administrasi Keuangan Perangkat	Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	laporan	2	2	100	21.320.726.488	18.192.430.216	85,33	5	5	100	√		√	

Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan		Rata-rata Capaian Sasprog/ Saskeg	Sasaran Output Kegiatan	Output Kegiatan					Anggaran			SDM			Efisiensi Dana		Efisiensi SDM	
				Indikator Output Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (OH)	Realisasi (OH)	%	Efisien	Tidak Efisien	Efisien	Tidak Efisien
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Daerah sesuai dengan SOP															
		82	Terselenggara-nya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan berlaku	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persen	100	82	82	313.000.000	160.420.973	51,25	2	2	100				
		100	Terselenggara-nya Administrari Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	persen	100	100	100	5.152.300.862	3.612.805.258	70,12	7	7	100	√		√	
		100	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai dengan Peraturan yang berlaku	Jenis Barang Milik Daerah	Jenis	6	6	100	5.483.778.800	4.806.261.400	87,65	2	2	100	√		√	
		100	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran.	persen	100	100	100	2.424.466.000	2.183.555.002	90,06	3	3	100	√		√	
		100	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	jenis	28	28	100	6.005.065.000	5.304.314.747	88,33	5	5	100	√		√	
		100	Tersedianya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	persen	100	100	100	1.362.946.166	1.292.476.642	94,83	1	1	100	√		√	

Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Rata-rata Capaian Sasprog/ Saskeg	Sasaran Output Kegiatan	Output Kegiatan					Anggaran			SDM			Efisiensi Dana		Efisiensi SDM	
			Indikator Output Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (OH)	Realisasi (OH)	%	Efisien	Tidak Efisien	Efisien	Tidak Efisien
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
	100	Tersedianya Fasilitasi Kerumahtangga-an Sekretariat Daerah	Kebutuhan kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Paket	11	11	100	1.687.321.200	1.457.531.500	86,38	2	2	100	√		√	
	100	Tersedianya Dokumen penataan organisasi yang sesuai dengan aturan	Dokumen penataan organisasi	dokumen	7	7	100	317.637.000	263.376.068	82,92	8	8	100	√		√	
	100	Terlaksananya Keprotokoleran , Komunikasi, dan dokumentasi Pimpinan sesuai dengan SOP	Laporan kegiatan Keprotokoleran, Komunikasi, dan dokumentasi Pimpinan	laporan	9	9	100	4.144.212.575	3.731.007.911	90,03	12	12	100	√		√	
Jumlah SK-KP 4							98,36	48.295.731.736	41.076.758.087	85,05	49	49					

Pada tabel 3.26 diuraikan bahwa dalam mencapai sasaran meningkatnya pencapaian sasaran pembangunan daerah bidang administrasi umum didukung oleh program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan sasaran terwujudnya pelayanan administrasi pemerintahan daerah yang efektif dan efisien. Rata-rata capaian sasaran program tahun 2023 sebesar 98,36% dengan didukung dana sebesar Rp.41.076.758.087 atau 85,05% dari anggaran sebesar Rp 48.295.731.736,- dan indikator output kegiatan (IOK) sebanyak 11 (sebelas) indikator dari rencana sebanyak 11 (sebelas) indikator serta OH sebanyak OH 51 atau 100% dari rencana sebanyak 51 OH terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu bagian umum, bagian organisasi dan bagian prokopimda.
Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran program telah dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output walaupun belum tercapai 100% yaitu sebesar 98,36%, lebih besar dari pada capaian penggunaan dana sebesar 85,05%.
Dari sisi penggunaan SDM, realisasi kinerja sasaran program belum tercapai. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 98,36% lebih rendah dari pada capaian penggunaan OH sebesar 100%

Pelaksanaan program yang mendukung sasaran meningkatnya Pencapaian sasaran Pembangunan Daerah bidang administrasi umum didukung oleh 11 (sebelas) kegiatan dengan sasaran sebagai berikut:

1. Terselenggaranya proses Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu
2. Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai dengan SOP
3. Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan berlaku
4. Terselenggaranya Administrari Umum Perangkat Daerah
5. Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai dengan Peraturan yang berlaku
6. Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Tersedianya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
9. Tersedianya Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
10. Tersedianya Dokumen penataan organisasi yang sesuai dengan aturan
11. Terlaksananya keprotokoleran, Komunikasi, dan dokumentasi Pimpinan sesuai dengan SOP

Rata-rata capaian **sasaran kegiatan 1** terselenggaranya proses perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator dokumen hasil perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah terealisasi sebesar 100%. Capaian sasaran kegiatan didukung dengan dana Rp.72.578.370,- atau 86,12% dari anggaran sebesar Rp.84.277.645,- dan dari indikator kinerja output kegiatan (IOK) sebanyak 10 Dokumen atau 100% dari rencana sebanyak 10 dokumen, serta OH sebanyak 2 orang atau 100% dari rencana sebanyak 2 orang.
Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran kegiatan telah dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 100 % lebih besar dari pada capaian penggunaan dana sebesar 986,12%.

Dari sisi penggunaan SDM, realisasi kinerja sasaran kegiatan telah dicapai secara secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 100% sama dengan capaian penggunaan OH sebesar 100%.

Rata- rata capaian **sasaran kegiatan 2** terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah sesuai dengan SOP dengan indikator dokumen keuangan perangkat daerah sebesar 100%. Capaian sasaran kegiatan didukung dengan dana Rp.18.192.430.216,- atau 85,33% dari anggaran sebesar Rp.21.320.726.488,- dan dari indikator kinerja output kegiatan (IOK) sebanyak 2 dokumen atau 100% dari rencana sebanyak 2 dokumen, serta OH sebanyak 5 orang atau 100% dari rencana sebanyak 5 orang.
Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran kegiatan telah dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 100 % lebih besar dari pada capaian penggunaan dana sebesar 85,33%.
Dari sisi penggunaan SDM, realisasi kinerja sasaran kegiatan telah dicapai secara secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 100% sama dengan capaian penggunaan OH sebesar 100%.

Rata- rata capaian **sasaran kegiatan 3** terselenggaranya administrasi kepegawaian perangkat daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan indikator terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah tercapai 82%. Capaian sasaran kegiatan didukung dengan dana Rp.160.420.973,- atau 51,25% dari anggaran sebesar Rp.313.000.000,- dan dari indikator kinerja output kegiatan (IOK) sebesar 82% atau dari rencana sebesar 100%, serta OH sebanyak 2 orang atau 100% dari rencana sebanyak 2 orang.
Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran kegiatan telah dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output walaupun belum tercapai 100 % akan tetapi lebih besar dari pada capaian penggunaan dana sebesar 51,25%.
Dari sisi penggunaan SDM, realisasi kinerja sasaran kegiatan telah dicapai secara secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 82% lebih rendah dari pada capaian penggunaan OH sebesar 100%.

Rata- rata capaian **sasaran kegiatan 4** terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah dengan indikator terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah tercapai 100%. Capaian sasaran kegiatan didukung dengan dana Rp.3.612.805.258,- atau 70,12% dari anggaran sebesar Rp.5.152.300.862,- dan dari indikator kinerja output kegiatan (IOK) sebesar 100% dari rencana sebesar 100%, serta OH sebanyak 7 orang atau 100% dari rencana sebanyak 7 orang.
Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran kegiatan telah dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 100 % lebih besar dari pada capaian penggunaan dana sebesar 70,12%.
Dari sisi penggunaan SDM, realisasi kinerja sasaran kegiatan telah dicapai secara secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 100% sama dengan capaian penggunaan OH sebesar 100%.

Rata- rata capaian **sasaran kegiatan 5** terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan indikator jenis barang milik daerah terealisasi sebesar 100%. Capaian sasaran

kegiatan didukung dengan dana Rp.4.806.261.400,- atau 87,65% dari anggaran sebesar Rp.5.483.778.800,- dan dari indikator kinerja output kegiatan (IOK) sebanyak 6 jenis atau 100% dari rencana sebanyak 6 jenis, serta OH sebanyak 2 orang atau 100% dari rencana sebanyak 2 orang.
Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran kegiatan telah dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 100 % lebih besar dari pada capaian penggunaan dana sebesar 87,65%.
Dari sisi penggunaan SDM, realisasi kinerja sasaran kegiatan telah dicapai secara secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 100% sama dengan capaian penggunaan OH sebesar 100%.

Rata- rata capaian **sasaran kegiatan 6** tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah dengan indikator pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran terealisasi 100%. Capaian sasaran kegiatan didukung dengan dana Rp 2.183.555.002,- atau 90,06% dari anggaran sebesar Rp.2.424.466.000,- dan dari indikator kinerja output kegiatan (IOK) sebesar 100% dari rencana sebesar 100%, serta OH sebanyak 3 orang atau 100% dari rencana sebanyak 3 orang.
Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran kegiatan telah dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 100 % lebih besar dari pada capaian penggunaan dana sebesar 90,06%.
Dari sisi penggunaan SDM, realisasi kinerja sasaran kegiatan telah dicapai secara secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 100% sama dengan capaian penggunaan OH sebesar 100%.

Rata- rata capaian **sasaran kegiatan 7** terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dengan indikator barang milik daerah dalam kondisi baik tercapai 100%. Capaian sasaran kegiatan didukung dengan dana Rp 5.304.314.747,- atau 88,33% dari anggaran sebesar Rp.66.005.065.000,- dan dari indikator kinerja output kegiatan (IOK) sebanyak 28 Jenis atau 100% dari rencana sebanyak 28 Jenis, serta OH sebanyak 5 orang atau 100% dari rencana sebanyak 5 orang.
Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran kegiatan telah dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 100 % lebih besar dari pada capaian penggunaan dana sebesar 88,33%.
Dari sisi penggunaan SDM, realisasi kinerja sasaran kegiatan telah dicapai secara secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 100% sama dengan capaian penggunaan OH sebesar 100%.

Rata- rata capaian **sasaran kegiatan 8** tersedianya administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan indikator administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah tercapai 100%. Capaian sasaran kegiatan didukung dengan dana Rp 1.292.476.642,- atau 94,83% dari anggaran sebesar Rp.1.362.946.166,- dan dari indikator kinerja output kegiatan (IOK) sebesar 100% atau dari rencana sebesar 100%, serta OH sebanyak 1 orang atau 100% dari rencana sebanyak 1 orang.
Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran kegiatan telah dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 100 % lebih besar dari pada capaian penggunaan dana sebesar 94,83%.

Dari sisi penggunaan SDM, realisasi kinerja sasaran kegiatan telah dicapai secara secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 100% sama dengan capaian penggunaan OH sebesar 100%.

Rata- rata capaian **sasaran kegiatan 9** tersedianya fasilitasi kerumahtanggaan sekretariat daerah dengan indikator kebutuhan kerumahtanggaan Sekretariat Daerah terealisasi sebesar 100%. Capaian sasaran kegiatan didukung dengan dana Rp 1.457.531.500,- atau 86,38% dari anggaran sebesar Rp.1.687.321.200,- dan dari indikator kinerja output kegiatan (IOK) sebanyak 11 paket atau 100% dari rencana sebanyak 11 paket , serta OH sebanyak 2 orang atau 100% dari rencana sebanyak 2 orang.
Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran kegiatan telah dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 100 % lebih besar dari pada capaian penggunaan dana sebesar 86,38%.
Dari sisi penggunaan SDM, realisasi kinerja sasaran kegiatan telah dicapai secara secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 100% sama dengan capaian penggunaan OH sebesar 100%.

Rata- rata capaian **sasaran kegiatan 10** tersedianya dokumen penataan organisasi yang sesuai dengan aturan dengan indikator Dokumen penataan organisasi terealisasi sebesar 100%. Capaian sasaran kegiatan didukung dengan dana Rp 263.376.068,- atau 82,92% dari anggaran sebesar Rp.317.637.000,- dan dari indikator kinerja output kegiatan (IOK) sebanyak 7 dokumen atau 100% dari rencana sebanyak 7 dokumen, serta OH sebanyak 8 orang atau 100% dari rencana sebanyak 8 orang.
Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran kegiatan telah dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 100 % lebih besar dari pada capaian penggunaan dana sebesar 82,92%.
Dari sisi penggunaan SDM, realisasi kinerja sasaran kegiatan telah dicapai secara secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 100% sama dengan capaian penggunaan OH sebesar 100%.

Rata- rata capaian **sasaran kegiatan 11** terlaksananya keprotokoleran, komunikasi, dan dokumentasi pimpinan sesuai dengan SOP dengan indikator laporan kegiatan keprotokoleran, komunikasi, dan dokumentasi pimpinan terealisasi sebesar 100%. Capaian sasaran kegiatan didukung dengan dana Rp 3.731.007.911,- atau 90,03% dari anggaran sebesar Rp.3.731.007.911,- dan dari indikator kinerja output kegiatan (IOK) sebanyak 9 laporan atau 100% dari rencana sebanyak 9 laporan, serta OH sebanyak 12 orang atau 100% dari rencana sebanyak 12 orang.
Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran kegiatan telah dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 100 % lebih besar dari pada capaian penggunaan dana sebesar 90,03%.
Dari sisi penggunaan SDM, realisasi kinerja sasaran kegiatan telah dicapai secara secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 100% sama dengan capaian penggunaan OH sebesar 100%.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah

Tahun 2023 merupakan tahun kelima atau tahun terakhir periode Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung tahun 2018-2023.

Tabel 3.28
Realisasi Kinerja dan Target Jangka Menengah Rencana Strategis Sekretariat Daerah

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah Renstra	Realiasi Kinerja				
			2019	2020	2021	2022	2023
Terwujudnya Pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	BB	C (40,20)	CC (53,94)	CC (54,62)	CC (57,71)	BB (75,14)
	Nilai SAKIP Kabupaten Belitung	BB	CC (52,14)	B (60,03)	B (60,90)	B (60,98)	B (63,52)
	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Kabupaten Belitung Untuk Komponen Pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja	31			22,78	25,1	26,41
Meningkatnya Pencapaian sasaran Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesra	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah bidang pemerintahan dam kesra	100			33,33	66,67	83,33
Meningkatnya Pencapaian sasaran Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah bidang Perekonomian dan Pembangunan	100			100	77,78	66,67
Meningkatnya Pencapaian sasaran Pembangunan Daerah Bidang Administrasi Umum	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah bidang Administrasi Umum	100			20	40	Belum tersedia
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	3,61			3,60	3,72	3,73

Realisasi capaian kinerja Sekretariat Daerah terhadap target jangka menengah berdasarkan data capaian yang tersaji pada tabel 3.27, realisasi capaian disajikan berdasarkan indikator tujuan dan sasaran pada perubahan kedua renstra yaitu terdapat 5 (lima) indikator baru yang menjadi tolak ukur ketercapaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung, dengan uraian sebagai berikut:

1. Indeks Reformasi Birokrasi, capaian indikator kinerja pada tahun 2023 mendapat predikat/kategori "BB" dengan nilai 75,14. Capaian ini telah tercapai sesuai target jangka menengah yaitu "BB" dan mengalami peningkatan yang signifikan selama 4 (empat) tahun berturut-tutut dengan capaian "CC".
2. Nilai SAKIP Kabupaten Belitung, capaian indikator pada tahun 2023 mendapatkan predikat "B" dan belum mencapai target jangka menengah dengan target predikat "BB". Namun, dilihat dari hasil penilaian maka capaiannya meningkat. Pemerintah Kabupaten Belitung akan melakukan perbaikan terhadap komponen evaluasi agar mencapai bobot yang maksimal dan berkomitmen dalam majemen kinerja agar lebih baik.

3. Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Kabupaten Belitung Untuk Komponen Pengukuran kinerja pelaporan kinerja, capaian indikator ini merupakan bagian dari komponen penilaian SAKIP Kabupaten Belitung. Dengan capaian sebesar 26,41 masih belum mencapai target kinerja jangka menengah yaitu sebesar 31. Namun, jika dibadingkan dengan realisasi tahun 2022 meningkat sebesar 1,31% dibandingkan tahun 2022 dan meningkat sebesar 3,63 dibandingkan dengan capaian tahun 2021.
4. Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah bidang pemerintahan dam kesra, capaian kinerja indikator sebesar 83,33% dan belum mencapai target jangka menengah yang ditetapkan 100%. Perkembangan capaian kinerja ini meningkat 16,67% dibandingkan dengan tahun 2022 dan meningkat sebesar 50% dibandingkan tahun 2021.
5. Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah bidang Perekonomian dan Pembangunan, capaian kinerja ini pada tahun 2023 tercapai sebesar 66,67% dan belum mencapai target jangka menengah yang ditetapkan 100%. Namun, dilihat dari capaian pada tahun 2022 yang merupakan tahun keempat renstra capaian ini menurun sebesar 11,11%.
6. Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah bidang Administrasi Umum, capaian indikator pada tahun 2023 tercapai belum tersedia capaiannya dikarenakan masih terdapat indikator kinerja yang realisasinya menunggu hasil rilis dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Kepegawaian Negara. Namun capaian kinerja ini meningkat 20% pada setiap tahunnya dengan realisasi capaian 20% pada tahun 2021 dan 40% pada tahun 2022.
7. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), capaian indikator ini mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Capaian pada tahun 2022 meningkat sebesar 0,12 dibandingkan dengan capaian tahun 2021. Capaian kinerja pada tahun 2023 tercapai 3,73 dan melampaui dari target jangka menengah sebesar 3,61.

C. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Dalam mencapai kinerja diperlukan sumber daya yang memadai terdiri dari sumber daya manusia, tersedianya anggaran dan tersedianya sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan kegiatan agar optimal. Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung terdiri dari 110 ASN yang meliputi 104 PNS dan 6 PPPK. Sedangkan anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan dengan pagu sebesar Rp. 67.617.973.250,- yang terjabarkan kedalam 4 (empat) program, 19 (sembilan belas) kegiatan dan 62 (enampuluh dua) sub kegiatan.

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya manusia dan anggaran diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Capaian kinerja sasaran tercapai atau melampaui 100%
b. Realisasi anggaran tidak mencapai 100%

Dalam mengukur tingkat efisensi penggunaan maka menggunakan rumusan sebagai berikut:

Efisiensi = Persentase Capaian Kinerja – Persentase Penyerapan Anggaran

Tabel 3.29
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Anggaran

No	Sasaran Strategis	Indikator	Persentase Capaian Kinerja	Persentase Capaian Anggaran	Efisiensi
1	Meningkatnya Pencapaian sasaran Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesra	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah bidang pemerintahan dan kesra	88,83	95,87	-
2	Meningkatnya Pencapaian sasaran Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah bidang Perekonomian dan Pembangunan	66,67	84,80	-
3	Meningkatnya Pencapaian sasaran Pembangunan Daerah Bidang Administrasi Umum	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah bidang Administrasi Umum	Belum tersedia	85,05	-
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	103	93,64	6,36

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran dikaitkan dengan capaian kinerja sebagaimana yang telah dijabarkan pada tabel di atas, bahwa dari 4 (empat) indikator sasaran kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung terdapat 3 (tiga) sasaran yang capaian kinerjanya belum mencapai 100% yaitu indikator Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah bidang pemerintahan dan kesra, Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah bidang Perekonomian dan Pembangunan dan Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah bidang Administrasi Umum sehingga belum dapat diukur tingkat efesiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja. Sedangkan capaian indikator Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan persentase capaian kinerja sebesar 103% dan persentase capaian anggaran sebesar 93,64% terdapat efisiensi sebesar 6,36%.

D. Kinerja Lainnya

1. Penghargaan/Apresiasi Lainnya

Pada tahun 2023 Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung mendapatkan 8 (delapan) penghargaan sebagai berikut:

a. Nominasi TPID Kabupaten/Kota Berkinerja Terbaik Kawasan Sumatera dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat pada tanggal 10 Juli 2023.

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

Berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI
Nomor 30a Tahun 2023
Memberikan Penghargaan Kepada

Kabupaten Belitung

NOMINASI TPID KAB/KOTA BERKINERJA TERBAIK KAWASAN SUMATERA

Jakarta 10 Juli 2023
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat

Airlangga Hartarto

b. Predikat Kategori Eka Acalapati dalam Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Tahun 2022 yang ditetapkan melalui keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.HN.03.05 Tahun 2023 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun 2022 tanggal 12 Oktober 2023.

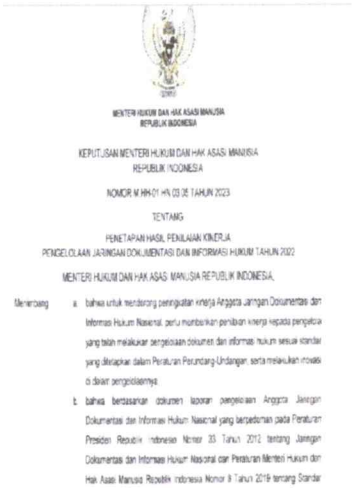
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR M.HH-01.HN.03.05 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN HASIL PENILAIAN KINERJA
PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM TAHUN 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa untuk mendorong peningkatan kinerja Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, perlu memberikan penilaian kinerja kepada pengelola yang telah melakukan pengelolaan dokumen dan informasi hukum sesuai standar yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan, serta melakukan inovasi di dalam pengelolaannya;

b. bahwa berdasarkan dokumen laporan pengelolaan Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar

PENGERTIAN TINGKAT PENETAPAN HASIL PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL TAHUN 2022

1. Kategori CAKUM GARUDA
2. Kategori TRI NUSANTARA
3. Kategori DWI TUNGGAL
4. Kategori EKA ACALAPATI

No.	Nama Instansi	Provinsi	Nilai
42.	Kabupaten Nganjuk	Jawa Timur	82
43.	Kabupaten Penajam Paser Utara	Kalimantan Timur	82
44.	Kabupaten Purworejo	Jawa Tengah	82
45.	Kabupaten Belitung	Kepulauan Bangka Belitung	81
46.	Kabupaten Boyolali	Jawa Tengah	81
47.	Kabupaten Kudus	Jawa Tengah	81
48.	Kabupaten Lampung Tengah	Lampung	81
49.	Kabupaten Sigi	Sulawesi Tengah	81
50.	Kabupaten Pacitan	Jawa Timur	80
51.	Kabupaten Buleleng	Bali	79
52.	Kabupaten Cilacap	Jawa Tengah	79
53.	Kabupaten Kuningan	Jawa Barat	79
54.	Kabupaten Pringsewu	Lampung	79
55.	Kabupaten Purwakarta	Jawa Barat	79

c. Predikat Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia Tahun 2022 Dalam Rangkaian Peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia ke-75 Tahun 2023 dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi pada tanggal 15 November 2023.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENGHARGAAN

NOMOR : M.HH-03.HA.02.01.01 TAHUN 2023
Diberikan kepada

KABUPATEN BELITUNG

Yang telah

Jakarta, 15 November 2023
a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

Dr. Dhahana Putra

d. Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Pubik yang diberikan oleh Ombudsman Republik Indonesia pada tanggal 14 Desember 2023

OMBUDSMAN

PIAGAM PENGHARGAAN

PENGANUGERAHAN PREDIKAT PENILAIAN KEPATUHAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK (OPINI PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK) TAHUN 2023

BERDASARKAN SK KETUA OMBUDSMAN RI NOMOR 418 TAHUN 2023 TENTANG HASIL PENILAIAN KEPATUHAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2023

DIBERIKAN KEPADA

PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

JAKARTA, 14 DESEMBER 2023
KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

KUALITAS TERTINGGI

MOHAMMAD NAJIH, S.H., M.HUM., PH.D.

e. Kepatuhan harmonisasi dan Kerjasama dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah yang diberikan oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung
f. Anugerah Rekor Batu Granit Terbesar Berbentuk Kepala Burung Garuda yang diberikan oleh Museum Rekor Indonesia (MURI)
g. Pemimpin terpopuler di media pemberitaan online pada ajang The 1st Indonesia GPR Award (IGA) 2023
h. Pemimpin berdampak di Media Digital Tahun 2023 pada Award The 2nd Indonesia DEI & ESG (IDEAS) 2023

2. Perbaikan SAKIP pada tahun 2023

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP pada Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2022 oleh Inspektorat Kabupaten Belitung Nomor 700.1.2.1/162/RIKin/INSPEK/2023 tanggal 9 Oktober 2023, Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung memperolah nilai 69,15 kategori nilai "B". Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama, masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja serta komitmen dalam manajemen kinerja. Beberapa rekomendasi dalam peningkatan kinerja yang perlu dilakukan oleh Sekretariat Daerah, yaitu:

a. Peningkatan dalam Perencanaan Kinerja melalui:
   1) Melakukan perbaikan pada penjejangan kinerja yang telah disusun dengan mempedomani PermenPANRB Nomor 89 Tahun 2021, dan selanjutnya memanfaatkan penjenjangan/cascading dan crosscutting kinerja tersebut sebagai dasar untuk penyempurnaan perencanaan kinerja secara keseluruhan
   2) Mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja tepat waktu pada website Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung
   3) Pemanfaatan target kinerja yang diperjanjikan untuk mengukur keberhasilan
b. Peningkatan dalam Pengukuran Kinerja melalui
   1) Pembuatan pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja
   2) Mencantumkan target capaian kinerja pada dokumen Rencana Aksi secara periodik (Per triwulan) untuk mempermudah melakukan pemantauan/pengukuran pencapaian target kinerja secara berkala/periodik
   3) Membuat pedoman teknis pengumpulan dan pengukuran data kinerja serta melaksanakan pengukuran data kinerja melalui mekanisme yang jelas secara bertahap dan terjadwal

4) Menyempurnakan Definisi Operasional atas Indikator Kinerja Utama (IKU)
5) Serta pemanfaatan teknologi informasi dalam sebuah aplikasi terintegrasi terkait kegiatan pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja.

c. Peningkatan dalam Pelaporan Kinerja melalui
   1) Melakukan proses supervise secara berjenjang dalam proses penyusunan laporan kinerja
   2) Mengungkapkan informasi yang memadai pada Laporan Kinerja BAB III Akuntabilitas tentang :
      - Analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka menengah
      - Analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya
      - Informasi efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja
      - Informasi target dan realisasi anggaran, pencapaian target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan yang menjadi kepedulian seluruh pegawai
   3) Serta mempublikasikan Dokumen Laporan Kinerja dalam website yang dimiliki oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung
d. Peningkatan dalam Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan melakukan
   1) Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja agar lebih menggambarkan tingkat akuntabilitas secara berjenjang dari level pegawai atas hingga pegawai bawah serta memastikan rekomendasi hasil evaluasi ditindaklanjuti dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan
   2) Peningkatan kompetensi SDM pada Sekreatriat Daerah Kabupaten Belitung melalui usulan Diklat maupun PPM terkait pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Tindak lanjut terhadap rekomendasi Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP pada Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2022, sebagai berikut

a. Peningkatan dalam Perencanaan Kinerja
   1) Perbaikan pada penjejangan kinerja yang telah disusun dengan mempedomasi PermenPANRB Nomor 89 Tahun 2021, dan selanjutnya memanfaatkan penjejangan/cascading dan crosscutting kinerja tersebut sebagai dasar untuk penyempurnaan perencanaan kinerja yang telah dilakukan melalui penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2024-2026 dan telah diupload di esr.menpan.go.id.
   2) Publikasi dokumen perencanaan (Renstra Setda Tahun 2024-2026) dan pelaporan (Laporan Kinerja Tahun 2023) akan diupload melalui web Sekretariat Daerah https://setda.belitung.go.id
   3) Telah dilakukan pengukuran kinerja pada tahun 2023 secara triwulan dengan melaporkan capaian kinerja Sekretariat Daerah berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang selaras dengan rencana aksi dan perjanjian kinerja (mulai dari level pimpinan sampai pelaksana).
b. Peningkatan dalam Pengukuran Kinerja
   1) Pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja dilakukan dengan menyusun SOP pegumpulan data dan SOP Pengukuran Kinerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung

2) Telah dilakukan perbaikan penyusunan Rencana aksi pada tahun 2024 yang dibuat secara per triwulan sehingga mempermudah dalam pengukuran capaian kinerja.
3) Pedoman teknis pengumpulan dan pengukuran data kinerja serta melaksanakan pengukuran data kinerja melalui mekanisme yang jelas secara bertahap dan terjadwal akan disusun dan dikoordinasikan dengan pimpinan dan untuk pelaksanaan pengukuran kinerja akan dilakukan secara berkala.
4) Definisi Operasional IKU 2018-2023 telah disusun dan ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas peraturan Bupati Belitung Nomor 26 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 dan dituangkan di dalam bab II dan bab III Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung. Penyempurnaan definisi operasional telah dilakukan pada penyusunan IKU tahun 2024-2026 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 Definisi operasional IKU telah disusun dan ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas peraturan Bupati Belitung Nomor 26 TAhun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 dan dituangkan di dalam bab II dan bab III Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung
5) Pemanfaatan teknologi informasi dalam sebuah aplikasi terintegrasi terkait kegiatan pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja telah dilakukan melalui Website Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Kabupaten Belitung (*e monev pro*) dan *sakip.go.id*

c. Peningkatan dalam Pelaporan Kinerja melalui
1) Supervisi secara berjenjang telah dilakukan melalui koordinasi dengan atasan mulai dari eselon III sampai dengan eselon II sesuai sesuai tanggungjawab masing-masing.
2) Pada laporan kinerja tahun 2023 telah dilakukan perbaikan penyajian data dan analisis kinerja yang terdapat pada bab III, meliputi:
   - Pada Laporan Kinerja telah disajikan evaluasi realisasi kinerja tahun berkenaan dengan target jangka menengah.
   - Analisis dan evaluasi realisasi kinerja telah disandingkan dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya (n-2, n-1 dan tahun n).
   - Informasi efisiensi atas penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja telah disajikan pada Laporan Kinerja tahun 2022 namun belum maksimal sehingga pada laporan kinerja tahun 2023 telah dilakukan perbaikan analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja berdasarkan sasaran strategis.
   - Informasi target dan realisasi anggaran dan pencapain target yang menjadi kepedulian seluruh pegawai telah dilengkapi pada Laporan Kinerja tahun 2023 serta ditandatanganinya Perjanjian Kinerja pada Sekretariat Daerah mulai level pimpinan sampai level pelaksana dan kemudian dilakukan pengawasan melekat oleh pimpinan kepada bawahan.
3) Publikasi dokumen perencanaan (Renstra Setda Tahun 2024-2026) dan pelaporan (Laporan Kinerja Tahun 2023) akan diupload melalui web Sekretariat Daerah https://setda.belitung.go.id

d. Peningkatan dalam Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
   1) Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja agar lebih menggambarkan tingkat akuntabilitas secara berjenjang dari level pegawai atas hingga pegawai bawah serta memastikan rekomendasi hasil evaluasi ditindaklanjuti dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan dengan mendokumentasikan aktivitas pelaksanaan penyusunan laporan kinerja dan melakukan rapat serta koordinasi terkait penyusunan capaian kinerja triwulan di lingkungan Sekretariat Daerah serta melakukan perbaikan laporan kinerja sebagaimana rekomendasi hasil evaluasi atas implementasi SAKIP pada Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung tahun 2022.
   2) Peningkatan kompetensi SDM pada Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung akan diindentifikasi dan mendorong pegawai untuk melakukan diklat dan didukung oleh tersedianya anggaran pendidikan dan pelatihan pegawai.

E. Akuntabilitas Keuangan

Capaian realisasi anggaran Sekretariat Daerah Tahun 2023 sebesar 87.61% dengan pagu anggaran sebesar RP.67.618.973.250 terealisasi sebesar Rp. 59.242.187.711. Dibandingkan dengan capaian Tahun 2022 menurun sebesar 6,17% dengan pagu sebesar RP.60.232.207.634,- terealisasi RP.60.237.102.593,- atau 93,78%, hal tersebut dikarenakan: pagu anggaran pada tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022 yang mempengaruhi pada persentase capaian realisasi anggaran yang jika dipersandingkan realisasi anggaran 2023 dan 2022 tidak jauh perbedaannya. Selain itu terdapat kegiatan yang realisasi anggarannya masih belum optimal diantaranya:

1. Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu sebesar Rp. 77.002.900,- terealisasi sebesar Rp. 27.857.198 atau 36,18%. Hal tersebut dikarenakan pelaksanaan kegiatan hanya sebatas berupa pemberian fasilitasi oleh Pemerintah Daerah dalam hal mediasi penyelesaian sengketa tanah garapan dilaksanakan sebatas yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kabupaten Belitung dalam hal ini menerima pengaduan/laporan dari masyarakat terkait dengan sengketa tanah yang terjadi antar masyarakat atau badan hukum/badan usaha, dan masyarakat dengan Pemerintah Daerah serta sebaliknya. Dalam hal penyelesaiannya perlu adanya keterlibatan dengan instansi terkait dan masalah dibidang pertanahan merupakan masalah yang sangat rawan, tidak hanya sekedar merupakan persoalan pemilikan dan tegaknya hukum tetapi juga menjadi persoalan politik. Pemerintah Kabupaten Belitung dalam hal ini menengahi permasalahan tersebut dalam upaya penyelesaiannya. Pemerintah dalam hal ini berperan selaku fasilitator dalam memediasi penyelesaian sengketa. Beberapa permasalahan sengketa tanah, sejauh ini masih dapat diselesaikan dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten Belitung melalui proses mediasi dan beberapa diantaranya belum dapat diselesaikan dikarenakan memerlukan waktu atau proses yang agak panjang antar pihak yang bersengketa yang mana pada akhirnya tidak atau belum tuntas diselesaikan pada tahun 2023 dan akan dilanjutkan kembali tahapan penyelesaiannya pada tahun 2024. Sehingga penyerapan belanja disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan.
2. Kegiatan Fasilitasi Dan koordinasi Hukum dengan pagu anggaran sebesar Rp.426.645.730,- terealisasi sebesar Rp.244.827.695,- atau 57,38%. Hal tersebut dikarenakan dari 3 (tiga) sub kegiatan pada kegiatan tersebut terdapat 1(satu) kegiatan

yang realisasinya belum maksimal yaitu pada sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum, yang disebabkan kegiatan fasilitasi bantuan hukum sifatnya insidentil, baru dicairkan apabila ada kasus atau permasalahan hukum yang terjadi, apabila tidak ada maka anggarannya tidak bisa direalisasikan.

3. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian dengan pagu Rp.134.081.284 terealisasi Rp.85.387.003,- atau 63,68%. Hal tersebut dikarenakan pelaksanaan seleksi Pemilihan Calon Direktur BUMD Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri dinyatakan batal hal ini tertuang dalam Berita Acara Nomor 01/BA/PANSEL/2023 yang menyatakan bahwa Jumlah Calon Pendaftar pada Pelaksanaan Seleksi Pemilihan Direksi Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri Kabupaten Belitung Periode 2024-2028 hanya 1 (satu) orang maka Tim Panitia Seleksi Pemilihan Direksi Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri Kabupaten Belitung Periode 2024-2028 tidak dapat dilanjutkan ketahap selanjutnya dan dinyatakan "BATAL" hal ini juga sesuai dengan Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi BUMD Pasal 46 ayat 1 (satu) menyatakan bahwa "Pelaksanaan Seleksi Administrasi dan UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) Calon Anggota Direksi"
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan pagu Rp. 313.000.000,- terealisasi sebesar Rp.160.420.973 atau 51,25%. Belum optimalnya capaian realisasi anggaran dikarenakan beberapa penyelenggara Diklat dan Bimtek tersebut mengadakan penundaan karena kuota peserta untuk pengadaan Diklat/Bimtek tersebut tidak mencukupi dan adanya beberapa kegiatan, pendidikan, pelatihan yang tidak memerlukan kontribusi dan kami telah melakukan pergeseran anggaran untuk biaya kontribusi tetapi dalam sistem SIPD tidak bisa dilakukan pergeseran atas biaya kontribusi tersebut.
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 5.152.300.862,- terealisasi Rp.3.612.805.258,- atau 70,12%. Hal tersebut dikarenakan pada pelaksanaan kegiatan tersebut bersifat rutinitas dan penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan dalam menunjang kinerja di lingkungan Sekretariat Daerah.

Rincian per jenis belanja dan per program Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.30 dan tabel 3.31 sebagai berikut:

Tabel 3.30
Anggaran dan Realisasi Keuangan Tahun 2023 Menurut Jenis Belanja

No	Jenis Belanja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Belanja Operasi	60.012.694.450	52.366.890.811	87,26
2	Belanja Modal	7.606.278.800	6.875.296.900	90,39
Jumlah		67.618.973.250	59.242.187.711	87,61

Gambar 3.5 Pagu dan Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Tahun 2023

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa total anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2023 sebesar Rp. 67.618.973.250.- yang terbagi atas belanja operasi sebesar Rp. 60.012.694.450,- dan belanja modal sebesar Rp.7.606.278.800,- dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 59.242.187.711,- atau tercapai sebesar 87,61%.

Tabel 3.31

Anggaran dan Realisasi Keuangan Tahun 2023 Menurut Program/Kegiatan

No	Jenis Belanja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
I	**Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan**			
1	Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	77.002.900	27.857.198	36,18
Jumlah Program I		**77.002.900**	**27.857.198**	**36,18**
II	**Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**			
1	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	980.186.741	933.702.134	95,26
2	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	14.590.990.800	14.204.288.349	97,35
3	Kegiatan Fasilitasi Dan koordinasi Hukum	426.645.730	244.827.695	57,38
Jumlah Program II		**15.997.823.271**	**15.382.818.178**	**96,16**
III	**Program Perekonomian Dan Pembangunan**			
1	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	134.081.284	85.387.003	63,68
2	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	668.230.775	585.763.762	87,66
3	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa	2.336.994.264	1.994.878.968	85,36
4	Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	109.109.020	88.724.515	81,32
Jumlah Program III		**3.248.415.343**	**2.754.754.248**	**84,80**
IV	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**			
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84.277.645	72.578.37	86,12
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21.320.726.488	18.192.430.216	85,33
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	313.000.000	160.420.973	51,25

No	Jenis Belanja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.152.300.862	3.612.805.258	70,12
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.483.778.800	4.806.261.40	87,65
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.424.466.000	2.183.555.002	90,06
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.005.065.000	5.304.314.747	88,33
8	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	1.362.946.166	1.292.476.642	94,83
9	Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	1.687.321.200	1.457.531.500	86,38
10	Kegiatan Penataan Organisasi	317.637.000	263.376.068	82,92
11	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	4.144.212.575	3.731.007.911	90,03
Jumlah Program IV		**48.295.731.736**	**41.076.758.087**	**85,05**
Jumlah Total		**67.618.973.250**	**59.242.187.711**	**87,61**

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa terdapat 4 (empat) program dan 19 (sembilan belas) kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung tahun 2023, dengan serapan anggaran tertinggi sebesar 97,74% pada program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. Sedangkan serapan pada program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar 85,05, program Perekonomian dan Pembangunan sebesar 84,80% dan Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan sebesar 36,18%.

4 PENUTUP

A. Kesimpulan Kinerja Tahun 2023

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2023 sebagai bentuk pertangungjawaban kinerja dan dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap pencapaian kinerja selama 1 (satu) tahun anggaran. Selain itu dalam laporan kinerja ini menyajikan keberhasilan maupun kendala dalam pencapaian sasaran strategis. Secara umum capaian sasaran strategis yang terjabarkan ke dalam 7 (tujuh) indikator kinerja pada tahun 2023 menunjukkan kinerja yang baik, dengan rincian sebagai berikut:

1. Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2023 dengan target 'BB" terealisasi "BB" atau tercapai 100%. Nilai hasil evaluasi tercapai 75,14 terdiri dari RB General dengan nilai 64,89 dan RB Tematik dengan nilai 10,25.
2. Nilai SAKIP Kabupaten Belitung dengan target kategori "BB" tercapai "B". Meskipun secara kategori belum mencapai target, namun secara kuantitas menunjukkan peningkatan capaian kinerja dengan nilai sebesar 63,52 meningkat 2,54 poin dibandingkan tahun 2022 dengan nilai 60,98.
3. Nilai Komponen Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja Pada Evaluasi SAKIP Kabupaten Belitung dengan target 31 terealisasi sebesar 26,41 dengan capaian pengukuran kinerja sebesar 16,16 dan pelaporan sebesar 10,25. Capaian ini meningkat sebesar 1,31 dibandingkan dengan capaian tahun 2021 dengan realisasi sebesar 25,1.
4. Persentase Ketercapaian Sasaran Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesra terealisasi sebesar 83,33% dari target kinerja 100%. Capaian kinerja ini meningkat 16,66% dibandingkan capaian tahun 2022 dengan realisasi 66,67%.
5. Persentase Ketercapaian Sasaran Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan tahun 2023 tercapai 66,67%.Capaian dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Dibandingkan capaian tahun menurun 22,22% dengan capaian sebesar 77,78%. Menurunnya capaian kinerja sasaran dikarenakan terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang mendukung misi ke-3 RPJMD belum mencapai target yang ditetapkan yaitu indikator Jumlah kunjungan Wisatawan (domestik dan mancanegara), Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan terhadap PDRB dan Nilai investasi.
6. Persentase Ketercapaian Sasaran Pembangunan Daerah Bidang Administrasi Umum, capaiannya belum tersedia dikarenakan masih menunggu rilis dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Kepegawaian Negara terkait capaian kinerja Opini BPK dan Indeks Profesionalitas ASN.
7. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dengan target 3,61 tercapai 3,73 dan meningkat 0,01 poin dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 3,72 dengan kategori "SANGAT BAIK".

Pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung pada tahun 2023 didukung adanya kebijakan pemerintah daerah yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan, komitmen pimpinan dalam mencapai kinerja yang telah ditetapkan, adanya kerjasama dan koordiansi yang baik dengan semua elemen penyelenggara pemerintahan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan menetapkan standar pelayanan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat Daerah dalam melaksankan tugas dan fungsinya. Dalam melaksanakan program-program dalam mendukung tercapainya kinerja sasaran strategis didukung oleh anggaran dengan pagu sebesar Rp. 67.618.973.250,- terealisasi Rp.59.242.187.711,- atau 87,61%. Walaupun dari pencapaian kinerja dan anggaran termasuk dalam kategori tinggi, akan tetapi masih ditemui kendala seperti kompetensi aparatur yang masih kurang karena belum optimalnya pengelolaan manajemen aparatur, monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan belum optimal sehingga berdampak pada belum maksimalnya capaian kinerja. Kendala yang dihadapi menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan dan pencapain kinerja di masa mendatang.

Selain itu, capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung dapat dilihat melalui penghargaan yang diterima yaitu penghargaan Nominasi TPID Kabupaten/Kota Berkinerja Terbaik Kawasan Sumatera, Predikat Kategori Eka Acalapati dalam Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Predikat Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia, Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggraan Pelayanan Pubik, Kepatuhan harmonisasi dan Kerjasama dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah, Anugerah Rekor Batu Granit Terbesar Berbentuk Kepala Burung Garuda, Pemimpin terpopuler di media pemberitaan online pada ajang The 1st Indonesia GPR Award (IGA) dan Pemimpin berdampak di Media Digital Tahun 2023 pada Award The 2nd Indonesia DEI & ESG (IDEAS). Dengan adanya penghargaan yang diterima dapat dijadikan motivasi agar berkinerja lebih optimal dalam pencapaian sasaran stategis Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung untuk tercapainya sasaran pembangunan Kabupaten Belitung.

B. Rencana Tindak Lanjut Tahun 2024

Berdasarkan pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kinerja pada tahun mendatang, yaitu:

1. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh perangkat daerah dan Instansi Pusat terkait perencanaan, pengukuran kinerja, pencapaian kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.
2. Meningkatakan koordinasi antar bagian dalam rangka peningkatan pelayanan publik.
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia sehingga lebih berkompeten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
4. Memanfaatkan aplikasi yang tersedia dalam mempermudah pelaksanaan tugas.

LAMPIRAN

LAMPIRAN I
TARGET REALISASI DAN CAPAIAN SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN

Sasaran Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (IKP)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Kinerja Program/Kegiatan				Anggaran			SDM		
				Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu (RP)	Realisasi (RP)	%	Target	Realisasi	%
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Terselesaikannya Sengketa Tanah Garapan**	**1.1**	**Tertibnya Administrasi Tanah Garapan**	Persen	100	20	**20**						
1.1	Terlaksananya fasilitasi sengketa tanah garapan	1.1.1.	Dokumen Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Berita Acara	5	1	20	77.002.900	27.857.198	36,18	1	1	100
Capaian Rata-Rata Kegiatan							**20**	**77.002.900**	**27.857.198**	36,18			
2	**Terwujudnya Pemerintahan Transparan dan Akuntabel**	**1.1**	**Penyelenggaraan Pemerintah Transparan Dan Akuntabel**	**persen**	**100**	**97,22**	**97,22**						
2.1	Penyelenggaraan penataan administrasi pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	2.1.1	Dokumen administrasi tata pemerintahan	dokumen	8	8	100	980.186.741	933.702.134,00	95,26	7	7	100
2.2	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	2.2.1	Dokumen kebijakan kesejahteraan rakyat	dokumen	9	9	100	14.590.990.800	14.204.288.349,00	97,35	8	8	100
2.3	Pelaksanaan koordinasi kebijakan dibidang Hukum	2.3.1	Produk hukum daerah yang terhamonisasi	persen	100	91,67	91,67	426.645.730	244.827.695,00	57,38	11	11	100
Capaian Rata-Rata							**97,22**	**15.997.823.271,00**	**15.382.818.178,00**	**96,16**	**26**	**26**	
3	**Terkendalinya Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Belitung**	**2.1**	**Meningkatnya Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Belitung**	**persen**	**100**	**100**	**100**						
3.1	Terkendalinya Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	3.1.1	Laporan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	dokumen	11	11	100	134.081.284	85.387.003,00	63,68	3	3	100
3.2	Administrasi Pembangunan sesuai dengan aturan yang berlaku	3.2.1	Dokumen Administrasi Pembangunan	laporan	13	13	100	668.230.775	585.763.762,00	87,66	6	6	100
3.3	Terlaksananya pengelolaan pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan ketentuan	3.3.1	Dokumen pengelolaan pengadaan barang dan jasa	dokumen	3	3	100	2.336.994.264	1.994.878.968,00	85,36	17	17	100
3.4	Terkendalinya Pelaksanaan Kebijakan Sumber Daya Alam	3.4.1	Dokumen Hasil Kebijkan Sumber Daya Alam	dokumen	2	2	100	109.109.020	88.724.515,00	81,32	1	1	100
Capaian Rata-Rata Kegiatan							**100**	**3.248.415.343,00**	**2.754.754.248,00**	**84,80**	**27**	**27**	**100**
4	**Terwujudnya Pelayanan Administrasi Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien**	**4.1**	**Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan**	**persen**	**100**	**100**	**100**						
		4.2	**Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah**	**persen**	**75**	**73,59**	**98,12**						
		4.3	**Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Daerah**	**persen**	**100**	**100**	**100**						
		4.4	**Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**persen**	**100**	**100**	**100**						
		4.5	**Persentase Pelayanan Administrasi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah**	**persen**	**100**	**100**	**100**						
4.1	Terselenggaranya proses Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	4.1.1	Dokumen Hasil Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	10	10	100	84.277.645,00	72.578.370,00	86,12	2	2	100
4.2	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai dengan SOP	4.2.1	Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	dokumen	2	2	100	21.320.726.488,00	18.192.430.216,00	85,33	5	5	100
4.3	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan berlaku	4.3.1	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persen	100	82	82	313.000.000,00	160.420.973,00	51,25	2	2	100
4.4	Terselenggaranya Administrari Umum Perangkat Daerah	4.4.1	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	persen	100	100	100	5.152.300.862,00	3.612.805.258,00	70,12	7	7	100
4.5	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai dengan Peraturan yang berlaku	4.5.1	Jenis Barang Milik Daerah	Jenis	6	6	100	5.483.778.800,00	4.806.261.400,00	87,65	2	2	100
4.6	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.6.1	Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran.	pesen	100	100	100	2.424.466.000,00	2.183.555.002,00	90,06	3	3	100
4.7	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.7.1	Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	Jenis	28	28	100	6.005.065.000,00	5.304.314.747,00	88,33	5	5	100
4.8	Tersedianya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4.8.1	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	persen	100	100	100	1.362.946.166,00	1.292.476.642,00	94,83	1	1	100
4.9	Tersedianya Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	4.9.1	Kebutuhan kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Paket	11	11	100	1.687.321.200,00	1.457.531.500,00		2	2	100
4.10	Tersedianya Dokumen penataan organisasi yang sesuai dengan aturan	4.10.1	Dokumen penataan organisasi	dokumen	7	7	100	317.637.000,00	263.376.068,00	82,92	8	8	100
4.11	Terlaksananya Keprotokoleran , Komunikasi, dan dokumentasi Pimpinan sesuai dengan SOP	4.11.1	Laporan kegiatan Keprotokoleran, Komunikasi, dan dokumentasi Pimpinan	laporan	9	9	100	4.144.212.575,00	3.731.007.911,00	90,03	12	12	100
Capaian Rata-Rata							**98,36**	**48.295.731.736,00**	41.076.758.087,00	**85,05**	**49**	**49**	100
Total								**67.618.973.250,00**	**59.242.187.711,00**	**87,61**			

LAMPIRAN II
PERBANDINGAN REALISASI SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Program (IKP) /Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Kinerja Program								
				Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Naik /(turun)	Capaian 2022	Capaian 2023	Naik (turun)	Target 2023	% Realisasi Terhadap Target 2023
1		2		3	5	4	6	8	7	9	10	11
1	**Terselesaikannya Sengketa Tanah Garapan**	**1.1**	**Tertibnya Administrasi Tanah Garapan**	Persen	-	20	-					
1.1	Terlaksananya fasilitasi sengketa tanah garapan	1.1.1.	Dokumen Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Berita Acara	-	1	-				5	20,00
					-		-					
2	**Terwujudnya Pemerintahan Transparan dan Akuntabel**	**1.1**	**Penyelenggaraan Pemerintah Transparan Dan Akuntabel**	**persen**	**96,67**	**97,22**	Naik	**96,67**	**97,22**	-	100	**96,67**
2.1	Penyelenggaraan penataan administrasi pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	1.1.1	Dokumen administrasi tata pemerintahan	dokumen	9	8	Tetap	90	100	Naik	8	100,00
2.2	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	1.2.1	Dokumen kebijakan kesejahteraan rakyat	dokumen	9	9	Tetap	100	100	Tetap	9	100,00
2.3	Pelaksanaan koordinasi kebijakan dibidang Hukum	1.3.1	Produk hukum daerah yang terhamonisasi	persen	100	91,67	Turun	100	91,67	Turun	100	91,67
3	**Terkendalinya Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Belitung**	**2.1**	**Meningkatnya Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Belitung**	**persen**	**100**	**100**	**Tetap**	**100**	**100**	-		**100**
3.1	Terkendalinya Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	2.1.1	Laporan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	dokumen	11	11	Tetap	100	100	Tetap	11	100,00
3.2	Administrasi Pembangunan sesuai dengan aturan yang berlaku	2.2.1	Dokumen Administrasi Pembangunan	laporan	13	13	Tetap	100	100	Tetap	13	100,00
3.3	Terlaksananya pengelolaan pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan ketentuan	2.3.1	Dokumen pengelolaan pengadaan barang dan jasa	dokumen	5	3	Turun	100	100	Tetap	3	100,00
3.4	Terkendalinya Pelaksanaan Kebijakan Sumber Daya Alam	2.4.1	Dokumen Hasil Kebijkan Sumber Daya Alam	Dokumen	2	2	Tetap	100	100	Tetap	2	100,00
4	**Terwujudnya Pelayanan Administrasi Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien**	**3.1**	**Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan**	**persen**	**100**	**100**	**Tetap**	**100**	**100**	**Tetap**	**100**	100
		3.2	**Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah**	**persen**	**64,59**	**73,59**	**Naik**	**86,12**	**98,12**	**Naik**	**75**	**98,12**
		3.3	**Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Daerah**	**persen**	**100**	**100**	**Tetap**	**100**	**100**	**Tetap**	**100**	**100**
		3.4	**Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**persen**	**100**	**100**	**Tetap**	**100**	**100**	**Tetap**	**100**	**100**
		3.5	**Persentase Pelayanan Administrasi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah**	**persen**	**100**	**100**	**Tetap**	**100**	**100**	**Tetap**	**100**	**100**
4.1	Terselenggaranya proses Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu		Dokumen Hasil Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	10	10	Tetap	100	100	Tetap	10	100,00
4.2	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai dengan SOP		Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	laporan	19	2	Turun	100	100	Tetap	2	100,00
4.3	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan berlaku		Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persen	88,23	82	Turun	88,23	82	Turun	100	82,00

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Program (IKP) /Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Kinerja Program								
				Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Naik /(turun)	Capaian 2022	Capaian 2023	Naik (turun)	Target 2023	% Realisasi Terhadap Target 2023
1		2		3	5	4	6	8	7	9	10	11
4.4	Terselenggaranya Administrari Umum Perangkat Daerah		Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	persen	100	100	Tetap	100	100	Tetap	100	100,00
4.5	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai dengan Peraturan yang berlaku		Jenis Barang Milik Daerah	jenis	26	6	Turun	100	100	Tetap	6	100,00
4.6	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran.	persen	100	100	Tetap	100	100	Tetap	100	100,00
4.7	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	Jenis	28	28	Tetap	100	100	Tetap	28	100,00
4.8	Tersedianya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	persen	100	100	Tetap	100	100	Tetap	100	100,00
4.9	Tersedianya Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		Kebutuhan kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Paket	11	11	Tetap	100	100	Tetap	11	100,00
4.10	Tersedianya Dokumen penataan organisasi yang sesuai dengan aturan		Dokumen penataan organisasi	dokumen	7	7	Tetap	100	100	Tetap	7	100,00
4.11	Terlaksananya Keprotokoleran , Komunikasi, dan dokumentasi Pimpinan sesuai dengan SOP		Laporan kegiatan Keprotokoleran, Komunikasi, dan dokumentasi Pimpinan	laporan	9	9	Tetap	100	100	Tetap	9	100,00

LAMPIRAN III

TARGET, REALISASI DAN CAPAIAN INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN

	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Rata-rata Capaian Sasprog/Saskeg	Sasaran Output Kegiatan	Output Kegiatan					Anggaran			SDM			Efisiensi Dana		Efisiensi SDM	
				Indikator Output Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (OH)	Realisasi (OH)	%	Efisien	Tidak Efisien	Efisien	Tidak Efisien
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	**Terselesaikannya Sengketa Tanah Garapan**	**20**	**Tertibnya Administrasi Tanah Garapan**		**Persen**	**100**	**20**	**20**										
		20	Terlaksananya fasilitasi sengketa tanah garapan	Dokumen Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Berita Acara	5	1	20	77.002.900	27.857.198	36,18	1	1					
			Jumlah SK-KP 1					20	**77.002.900**	**27.857.198**	36,18	1	1					
2	**Terwujudnya Pemerintahan Transparan dan Akuntabel**	**97,22**	**Penyelenggaraan Pemerintah Transparan Dan Akuntabel**		**persen**	**100**	**97,22**	**97,223**			96,16							
		100	Penyelenggaraan penataan administrasi pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Dokumen administrasi tata pemerintahan	dokumen	8	8	100	980.186.741,00	933.702.134,00	95,26	7	7	100	√		√	
		100	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	Dokumen kebijakan kesejahteraan rakyat	dokumen	9	9	100	14.590.990.800,00	14.204.288.349,00	97,35	8	8	100	√		√	
		91,67	Pelaksanaan koordinasi kebijakan dibidang Hukum	Produk hukum daerah yang terhamonisasi	persen	100	91,67	91,67	426.645.730,00	244.827.695,00	57,38	11	11	100				
			Jumlah SK-KP 2					97,22	**15.997.823.271,00**	**15.382.818.178,00**	**96,16**	26	26					
3	**Terkendalinya Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Belitung**	**100**	**Meningkatnya Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Belitung**		**persen**	**100**	**100**	**100**			84,80							
		100	Terkendalinya Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Laporan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	dokumen	11	11	100	134.081.284,00	85.387.003,00	63,68	3	3	100	√		√	
		100	Administrasi Pembangunan sesuai dengan aturan yang berlaku	Dokumen Administrasi Pembangunan	laporan	13	13	100	668.230.775,00	585.763.762,00	87,66	6	6	100	√		√	
		100	Terlaksananya pengelolaan pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan ketentuan	Dokumen pengelolaan pengadaan barang dan jasa	dokumen	3	3	100	2.336.994.264,00	1.994.878.968,00	85,36	17	17	100	√		√	
		100	Terkendalinya Pelaksanaan Kebijakan Sumber Daya Alam	Dokumen Hasil Kebijkan Sumber Daya Alam	dokumen	2	2	100	109.109.020,00	88.724.515,00	81,32	1	1	100	√		√	
			Jumlah SK-KP 3					100	**3.248.415.343,00**	**2.754.754.248,00**	**84,80**	27	27	100	√		√	
4	**Terwujudnya Pelayanan Administrasi Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien**	**98,36**	**Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan**		**persen**	**100**	**100**	**100**										
			Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah		**persen**	**75**	**73,59**	**98,12**										
			Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Daerah		**persen**	**100**	**100**	**100**										
			Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur		**persen**	**100**	**100**	**100**										
			Persentase Pelayanan Administrasi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah		**persen**	**100**	**100**	**100**										
		100	Terselenggaranya proses Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	Dokumen Hasil Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	10	10	100	84.277.645,00	72.578.370,00	86,12	2	2	100	√		√	
		100	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai dengan SOP	Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	laporan	2	2	100	21.320.726.488,00	18.192.430.216,00	85,33	5	5	100	√		√	
		82	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan berlaku	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persen	100	82	82	313.000.000,00	160.420.973,00	51,25	2	2	100				
		100	Terselenggaranya Administrari Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	persen	100	100	100	5.152.300.862,00	3.612.805.258,00	70,12	7	7	100	√		√	
		100	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai dengan Peraturan yang berlaku	Jenis Barang Milik Daerah	Jenis	6	6	100	5.483.778.800,00	4.806.261.400,00	87,65	2	2	100	√		√	

Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Rata-rata Capaian Sasprog/Saskeg	Sasaran Output Kegiatan	Output Kegiatan					Anggaran			SDM			Efisiensi Dana		Efisiensi SDM	
			Indikator Output Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (OH)	Realisasi (OH)	%	Efisien	Tidak Efisien	Efisien	Tidak Efisien
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	100	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran.	persen	100	100	100	2.424.466.000,00	2.183.555.002,00	90,06	3	3	100	√		√	
	100	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	jenis	28	28	100	6.005.065.000,00	5.304.314.747,00	88,33	5	5	100	√		√	
	100	Tersedianya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	persen	100	100	100	1.362.946.166,00	1.292.476.642,00	94,83	1	1	100	√		√	
	100	Tersedianya Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Kebutuhan kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Paket	11	11	100	1.687.321.200,00	1.457.531.500,00	86,38	2	2	100	√		√	
	100	Tersedianya Dokumen penataan organisasi yang sesuai dengan aturan	Dokumen penataan organisasi	dokumen	7	7	100	317.637.000,00	263.376.068,00	82,92	8	8	100	√		√	
	100	Terlaksananya Keprotokoleran , Komunikasi, dan dokumentasi Pimpinan sesuai dengan SOP	Laporan kegiatan Keprotokoleran, Komunikasi, dan dokumentasi Pimpinan	laporan	9	9	100	4.144.212.575,00	3.731.007.911,00	90,03	12	12	100	√		√	
		Jumlah SK-KP 4					98,36	48.295.731.736,00	41.076.758.087,00	85,05	49	49					
		Total						**67.618.973.250,00**	**59.242.187.711,00**	**87,61**							

LAMPIRAN IV
PERBANDINGAN REALISASI INDIKATOR OUPUT KEGIATAN (IOK)

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Output Kegiatan								
		Indikator Output Kegiatan		Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Naik/ turun	Capaian 2022	Capaian 2023	Naik/ turun
1		*2*		*3*	*4*	5	*6*	*7*	8	*9*
1	**Terselesaikannya Sengketa Tanah Garapan**	**Tertibnya Administrasi Tanah Garapan**		**persen**	**-**	**20**	**-**	**-**		**-**
1.1	Terlaksananya fasilitasi sengketa tanah garapan	a	Dokumen penyelesaian sengketa tanah garapan	Berita Acara	-	1	-	-	-	-
2	**Terlaksananya Pemerintahan Transparan dan Akuntabel**	**Penyelenggaraan Pemerintah Transparan Dan Akuntabel**		**persen**	**100**	**97,22**	**-**	**100**	**97,22**	**Turun**
2.1	Penyelenggaraan penataan administrasi pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	a	Jumlah Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan	dokumen	9	8	Turun	90	100	Naik
2.2	Penyelenggaraan penataan administrasi pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	b	Jumlah Dokumen Dokumen Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	dokumen	9	9	Tetap	100	100	Tetap
2.3	Pelaksanaan koordinasi kebijakan dibidang Hukum	c	Produk Hukum Daerah yang terharmonisasi	persen	100	91,67	Turun	100	91,67	Turun
3	**Terkendalinya Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Belitung**	**Meningkatnya Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Belitung**		**persen**	**100**	**100**	**Tetap**	**100**	**100**	**Tetap**
3.1	Terkendalinya Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	a	Laporan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	dokumen	11	11	Tetap	100	100	Tetap
3.2	Administrasi Pembangunan sesuai dengan aturan yang berlaku	b	Dokumen Administrasi Pembangunan	laporan	13	13	Tetap	100	100	Tetap
3.3	Terlaksananya pengelolaan pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan ketentuan	c	Dokumen pengelolaan pengadaan barang dan jasa	dokumen	5	3	Tetap	100	100	Tetap
3.4	Terkendalinya Pelaksanaan Kebijakan Sumber	d	Dokumen Hasil Kebijkan Sumber Daya	Dokumen	2	2	Tetap	100	100	Tetap
4	**Terwujudnya Pelayanan Administrasi Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien**	**Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan**		**persen**	**100**	**100**	**Tetap**	**100**	**100**	**Tetap**
		Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah		**persen**	**64,59**	**68,41**	**Naik**	**86,12**	**91,21**	**Naik**
		Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Daerah		**persen**	**100**	**100**	**Tetap**	**100**	**100**	**Tetap**
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur		**persen**	**100**	**100**	**Tetap**	**100**	**100**	**Tetap**

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Output Kegiatan									
			Indikator Output Kegiatan	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Naik/ turun	Capaian 2022	Capaian 2023	Naik/ turun
			Persentase Pelayanan Administrasi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	**persen**	**100**	**100**	**Tetap**	**100**	**100**	**Tetap**
4.1	Terselenggaranya proses Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	a	Dokumen Hasil Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	10	10	Tetap	100	100	Tetap
4.2	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai dengan SOP	b	Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	laporan	19	2	Turun	100	100	Tetap
4.3	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan	c	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persen	88,23	82	Turun	88,23	82	Turun
4.4	Terselenggaranya Administrari Umum Perangkat Daerah	d	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	persen	100	100	Tetap	100	100	Tetap
4.5	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai dengan Peraturan yang berlaku	e	Jenis Barang Milik Daerah	jenis	26	6	Turun	100	100	Tetap
4.6	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	f	Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran.	persen	100	100	Tetap	100	100	Tetap
4.7	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang	g	Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	jenis	28	28	Tetap	100	100	Tetap
4.8	Tersedianya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	h	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	persen	100	100	Tetap	100	100	Tetap
4.9	Tersedianya Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	i	Kebutuhan kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Paket	11	11	Tetap	100	100	Tetap
4.10	Tersedianya Dokumen penataan organisasi yang sesuai dengan aturan	j	Dokumen penataan organisasi	dokumen	7	7	Tetap	100	100	Tetap
4.11	Terlaksananya Keprotokoleran , Komunikasi, dan dokumentasi Pimpinan sesuai dengan SOP	k	Laporan kegiatan Keprotokoleran, Komunikasi, dan dokumentasi Pimpinan	laporan	9	9	Tetap	100	100	Tetap

LAMPIRAN V
JUMLAH PROGRAM PRIORITAS YANG TERCAPAI SESUAI TARGET
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG

No	Unit Kerja	Target Jumlah PP yang Mencapai Target	Realisasi Jumlah PP	%
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-
Jumlah		-	-	-

LAMPIRAN VI
JUMLAH KEGIATAN PRIORITAS YANG TERCAPAI SESUAI TARGET
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG

No	Unit Kerja	Target Jumlah KP yang Mencapai Target	Realisasi Jumlah KP	%
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-
Jumlah		-	-	-

LAMPIRAN VII
JUMLAH PROYEK PRIORITAS STRATEGIS YANG TERCAPAI SESUAI TARGET
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG

No	Unit Kerja	Target Jumlah PPS yang Mencapai Target	Realisasi Jumlah PPS	%
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-
Jumlah		-	-	-

LAMPIRAN VIII
JUMLAH PROYEK STRATEGIS NASIONAL YANG TERCAPAI SESUAI TARGET
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG

No	Unit Kerja	Target Jumlah PSN yang Mencapai Target	Realisasi Jumlah PSN	%
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-
Jumlah		-	-	-

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH KAB. BELITUNG TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H.MZ.HENDRA CAYA, S.E., M.Si

Jabatan : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu.

Nama : H. SAHANI SALEH, S.Sos

Jabatan : BUPATI BELITUNG

Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpandan, 25 Oktober 2023

Pihak Kedua,	Pihak Kesatu,
BUPATI BELITUNG,	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG,
H. SAHANI SALEH, S.Sos.	**H.MZ. HENDRA CAYA, S.E.,M.Si**
	Pembina Utama Madya
	NIP. 196509041990031004

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIAT DAERAH KAB. BELITUNG

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	BB
		Nilai SAKIP Kabupaten Belitung	BB
		Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Evaluasi SAKIP Kabupaten Belitung	26%
		Nilai Komponen Pelaporan Kinerja pada Evaluasi SAKIP Kabupaten Belitung	12%
2	Meningkatnya pencapaian sasaran pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan Kesra	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100%
3	Meningkatnya pencapaian sasaran pembangunan daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	100%
4	Meningkatnya pencapaian sasaran pembangunan daerah Bidang Administrasi Umum	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah Bidang Administrasi Umum	100%
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	3,61

	Program/Kegiatan		Anggaran	Ket.
A	**Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan**	**Rp**	**77.002.900,00**	**P-APBD**
1	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp	77.002.900,00	P-APBD
B	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**	**Rp**	**48.295.731.736,00**	**P-APBD**
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Rp	84.277.645,00	P-APBD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	21.320.726.488,00	P-APBD
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp	313.000.000,00	APBD
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	5.152.300.862,00	P-APBD
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	5.483.778.800,00	P-APBD
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	2.424.466.000,00	P-APBD

7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	6.005.065.000,00	P-APBD
8	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp	1.362.946.166,00	P-APBD
9	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Rp	1.687.321.200,00	P-APBD
10	Penataan organisasi	Rp	317.637.000,00	APBD
11	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Rp	4.144.212.575,00	P-APBD
C	**Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat**	**Rp**	**15.997.823.271,00**	**P-APBD & DABA**
1	Administrasi Tata Pemerintahan	Rp	980.186.741,00	P-APBD
2	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Rp	14.590.990.800,00	P-APBD & DABA
3	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Rp	426.645.730,00	APBD
D	**Program Perekonomian Dan Pembangunan**	**Rp**	**3.248.415.343,00**	**P-APBD**
1	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Rp	134.081.284,00	P-APBD
2	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Rp	668.230.775,00	P-APBD
3	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp	2.336.994.264,00	P-APBD
4	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Rp	109.109.020,00	APBD
	Total Anggaran	**Rp**	**67.618.973.250,00**	

Tanjungpandan, 25 Oktober 2023

BUPATI BELITUNG,

H. SAHANI SALEH, S.Sos.

SEKRETARIS DAERAH KAB. BELITUNG,

H. M. HENDRA CAYA, S.E., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 196509041990031004

LAMPIRAN X

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			FLAFOND ANGGARAN (APBD)		REALISASI			SISA ANGGARAN	
				INDUK (Rp)	PERUBAHAN (Rp)	KEUANGAN (Rp)	KEU (%)	FISIK (%)	RUPIAH	(%)
1	**PROGRAM : PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**			**97.002.900**	**77.002.900**	**27.857.198**	**36,18**	**100,00**	**49.145.702**	**63,82**
	1.1	Kegiatan : Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam		97.002.900	77.002.900	27.857.198	36,18	100,00	49.145.702	63,82
		1.1.1	Sub Kegiatan : Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	97.002.900	77.002.900	27.857.198	36,18	100,00	49.145.702	63,82
2	**PROGRAM : PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**			**15.373.322.921**	**15.997.823.271**	**15.382.818.178**	**96,16**	**100,00**	**615.005.093**	**3,84**
	2.1	Kegiatan : Administrasi Tata Pemerintahan		1.015.686.391	980.186.741	933.702.134	95,26	100,00	46.484.607	4,74
		2.1.1	Sub Kegiatan : Penataan Administrasi Pemerintahan	661.002.450	596.814.450	581.084.029	97,36	100,00	15.730.421	2,64
		2.1.2	Sub Kegiatan : Pengelolaan Adminitrasi Kewilayahan	109.102.500	109.101.000	88.714.776	81,31	100,00	20.386.224	18,69
		2.1.3	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	245.581.441	274.271.291	263.903.329	96,22	100,00	10.367.962	3,78
	2.2	Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		13.930.990.800	14.590.990.800	14.204.288.349	97,35	100,00	386.702.451	2,65
		2.2.1	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	6.316.768.500	6.976.768.500	6.699.128.060	96,02	100,00	277.640.440	3,98
		2.2.2	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	5.320.234.450	5.320.234.450	5.288.035.986	99,39	100,00	32.198.464	0,61
		2.2.3	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	2.293.987.850	2.293.987.850	2.217.124.303	96,65	100,00	76.863.547	3,35
	2.3	Kegiatan : Fasilitasi dan koordinasi Hukum		426.645.730	426.645.730	244.827.695	57,38	100,00	181.818.035	42,62
		2.3.1	Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	84.676.600	84.676.600	84.564.350	99,87	100,00	112.250	0,13
		2.3.2	Sub Kegiatan : Fasilitasi Bantuan Hukum	212.429.680	212.429.680	41.420.905	19,50	100,00	171.008.775	80,50
		2.3.3	Sub Kegiatan : Pendokumentasian Produk Hukum Dan Pengelolaan Informasi Hukum	129.539.450	129.539.450	118.842.440	91,74	100,00	10.697.010	8,26
3	**PROGRAM : PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**			**3.547.983.593**	**3.248.415.343**	**2.754.754.248**	**84,80**	**100,00**	**493.661.095**	**15,20**
	3.1	Kegiatan :Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		93.261.284	134.081.284	85.387.003	63,68	100,00	48.694.281	36,32
		3.1.1	Sub Kegiatan : Koordinasi, sinkronisasi, Monitoring Dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD Dan BLUD	31.438.900	72.258.900	31.819.963	44,04	100,00	40.438.937	55,96
		3.1.2	Sub Kegiatan : Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	61.822.384	61.822.384	53.567.040	86,65	100,00	8.255.344	13,35
	3.2	Kegiatan : Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		109.109.020	109.109.020	88.724.515	81,32	100,00	20.384.505	18,68
		3.2.1	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi,Dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan Dan Perikanan	55.946.750	55.946.750	45.201.655	80,79	100,00	10.745.095	19,21
		3.2.2	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Evaluasi Kebijakan Energi Dan Air	53.162.270	53.162.270	43.522.860	81,87	100,00	9.639.410	18,13
	3.3	Kegiatan : Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		1.001.933.425	668.230.775	585.763.762	87,66	100,00	82.467.013	12,34
		3.3.1	Sub Kegiatan : Pengendalian Dan Evaluasi Program Pembangunan	929.325.150	595.705.000	515.926.806	86,61	100,00	79.778.194	13,39

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			FLAFOND ANGGARAN (APBD)		REALISASI			SISA ANGGARAN	
				INDUK (Rp)	PERUBAHAN (Rp)	KEUANGAN (Rp)	KEU (%)	FISIK (%)	RUPIAH	(%)
		3.3.2	Sub Kegiatan : Pengelolaan Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	72.608.275	72.525.775	69.836.956	96,29	100,00	2.688.819	3,71
	3.4	Kegiatan : Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa		2.343.679.864	2.336.994.264	1.994.878.968	85,36	100,00	342.115.296	14,64
		3.4.1	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa	332.277.325	332.277.325	294.884.225	88,75	100,00	37.393.100	11,25
		3.4.2	Sub Kegiatan : Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	383.683.139	413.683.139	399.123.514	96,48	100,00	14.559.625	3,52
		3.4.3	Sub Kegiatan : Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan barang Dan Jasa	1.627.719.400	1.591.033.800	1.300.871.229	81,76	100,00	290.162.571	18,24
4	**PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**			**42.583.843.611**	**48.295.731.736**	**41.076.758.087**	**85,05**	**100,00**	**7.218.973.649**	**14,95**
	4.1	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja		60.015.465	84.277.645	72.578.370	86,12	100,00	11.699.275	13,88
		4.1.1	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.209.100	34.471.280	23.433.220	67,98	100,00	11.038.060	32,02
		4.1.2	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9.134.575	9.134.575	9.097.200	99,59	100	37.375	0,41
		4.1.3	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.619.225	7.619.225	7.568.400	99,33	100	50.825	0,67
		4.1.4	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	9.166.300	9.166.300	9.110.550	99,39	100,00	55.750	0,61
		4.1.5	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	7.819.025	7.819.025	7.759.400	99,24	100,00	59.625	0,76
		4.1.6	Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.067.240	16.067.240	15.609.600	97,15	100,00	457.640	2,85
	4.2	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		21.160.726.488	21.320.726.488	18.192.430.216	85,33	100,00	3.128.296.272	14,67
		4.2.1	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	20.994.850.527	21.154.850.527	18.035.126.111	85,25	100,00	3.119.724.416	14,75
		4.2.2	Sub Kegiatan : Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	165.875.961	165.875.961	157.304.105	94,83	100,00	8.571.856	5,17
	4.3	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		313.000.000	313.000.000	160.420.973	51,25	100,00	152.579.027	48,75
		4.3.1	Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	60.000.000	60.000.000	54.500.000	90,83	100,00	5.500.000	9,17
		4.3.2	Sub Kegiatan : Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	253.000.000	253.000.000	105.920.973	41,87	100,00	147.079.027	58,13
	4.4	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah		3.580.205.762	5.152.300.862	3.612.805.258	70,12	100,00	1.539.495.604	29,88
		4.4.1	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	200.000.000	200.000.000	198.977.500	99,49	100,00	1.022.500	0,51
		4.4.2	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	260.281.962	260.281.962	244.281.000	93,85	100,00	16.000.962	6,15
		4.4.3	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	200.000.000	200.000.000	198.835.000	99,42	100,00	1.165.000	0,58
		4.4.4	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.309.950.000	1.656.773.000	1.252.777.417	75,62	100,00	403.995.583	24,38
		4.4.5	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	92.573.800	48.421.900	37.147.400	76,72	100,00	11.274.500	23,28
		4.4.6	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	1.400.000.000	2.644.424.000	1.538.521.941	58,18	100,00	1.105.902.059	41,82

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			FLAFOND ANGGARAN (APBD)		REALISASI			SISA ANGGARAN	
				INDUK (Rp)	PERUBAHAN (Rp)	KEUANGAN (Rp)	KEU (%)	FISIK (%)	RUPIAH	(%)
		4.4.7	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	100.000.000	125.000.000	124.865.000	99,89	100,00	135.000	0,11
		4.4.8	Sub Kegiatan : Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	17.400.000	17.400.000	17.400.000	100,00	100,00	0	0,00
	4.5	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang		2.733.778.800	5.483.778.800	4.806.261.400	87,65	100,00	677.517.400	12,35
		4.5.1	Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		2.950.000.000	2.584.000.000	87,59	100,00	366.000.000	12,41
		4.5.2	Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel	196.500.000	196.500.000	155.700.000	79,24	100,00	40.800.000	20,76
		4.5.3	Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	2.139.278.800	1.939.278.800	1.732.296.000	89,33	100,00	206.982.800	10,67
		4.5.4	Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	398.000.000	398.000.000	334.265.400	83,99	100,00	63.734.600	16,01
	4.6	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah		2.418.466.000	2.424.466.000	2.183.555.002	90,06	100,00	240.910.998	9,94
		4.6.1	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	21.120.000	27.120.000	24.341.560	89,76	100,00	2.778.440	10,24
		4.6.2	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	1.269.000.000	1.269.000.000	1.127.137.221	88,82	100,00	141.862.779	11,18
		4.6.3	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.128.346.000	1.128.346.000	1.032.076.221	91,47	100,00	96.269.779	8,53
	4.7	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang		5.858.815.000	6.005.065.000	5.304.314.747	88,33	100,00	700.750.253	11,67
		4.7.1	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45.000.000	45.000.000	4.480.000	9,96	100,00	40.520.000	90,04
		4.7.2	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau lapangan	703.865.000	850.115.000	696.480.261	81,93	100,00	153.634.739	18,07
		4.7.3	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	575.000.000	575.000.000	556.910.578	96,85	100,00	18.089.422	3,15
		4.7.4	Sub Kegiatan : Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	4.534.950.000	4.534.950.000	4.046.443.908	89,23	100,00	488.506.092	10,77
	4.8	Kegiatan : Administrasi Keuangan Dan Operasional Kepala		983.483.996	1.362.946.166	1.292.476.642	94,83	100,00	70.469.524	5,17
		4.8.1	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	190.983.996	570.446.166	545.297.942	95,59	100,00	25.148.224	4,41
		4.8.2	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	62.500.000	62.500.000	53.178.700	85,09	100,00	9.321.300	14,91
		4.8.3	Sub Kegiatan : Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	600.000.000	600.000.000	564.000.000	94,00	100,00	36.000.000	6,00
		4.8.4	Sub Kegiatan : Penyediaan Pakaian Dinas Dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	130.000.000	130.000.000	130.000.000	100,00	100,00	0	0,00
	4.9	Kegiatan : Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		1.834.971.200	1.687.321.200	1.457.531.500	86,38	100,00	229.789.700	13,62
		4.9.1	Sub Kegiatan : Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	969.125.600	994.125.600	933.882.300	93,94	100,00	60.243.300	6,06

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			FLAFOND ANGGARAN (APBD)		REALISASI			SISA ANGGARAN	
				INDUK (Rp)	PERUBAHAN (Rp)	KEUANGAN (Rp)	KEU (%)	FISIK (%)	RUPIAH	(%)
		4.9.2	Sub Kegiatan : Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	568.661.000	593.661.000	424.114.600	71,44	100,00	169.546.400	28,56
		4.9.3	Sub Kegiatan : Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	297.184.600	99.534.600	99.534.600	100,00	100,00	-	0,00
	4.10	Kegiatan : Penataan Organisasi		317.637.000	317.637.000	263.376.068	82,92	100,00	54.260.932	17,08
		4.10.1	Sub Kegiatan : Pengelolaan Kelembagaan Dan Analisis Jabatan	107.035.000	107.035.000	94.321.568	88,12	100,00	12.713.432	11,88
		4.10.2	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelayanan Publik Dan Tata Laksana	80.680.000	80.680.000	51.230.750	63,50	100,00	29.449.250	36,50
		4.10.3	Sub Kegiatan : Peningkatan Kinerja Dan Reformasi Birokrasi	41.430.000	41.430.000	34.435.750	83,12	100,00	6.994.250	16,88
		4.10.4	Sub Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	46.405.000	46.405.000	43.452.000	93,64	100,00	2.953.000	6,36
		4.10.5	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	42.087.000	42.087.000	39.936.000	94,89	100,00	2.151.000	5,11
	4.11	Kegiatan : Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi pimpinan		3.322.743.900	4.144.212.575	3.731.007.911	90,03	100,00	413.204.664	9,97
		4.11.1	Sub Kegiatan : Fasilitasi Keprotokolan	676.202.800	857.452.800	821.283.640	95,78	100,00	36.169.160	4,22
		4.11.2	Sub Kegiatan : Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1.674.379.500	2.196.683.175	1.840.784.272	83,80	100,00	355.898.903	16,20
		4.11.3	Sub Kegiatan : Pendokumentasi Tugas Pimpinan	972.161.600	1.090.076.600	1.068.939.999	98,06	100,00	21.136.601	1,94
	TOTAL			**61.602.153.025**	**67.618.973.250**	**59.242.187.711**	**87,61**	**100,00**	**8.376.785.539**	**13,60**

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BELITUNG